

GLOBALISASI HUKUM

Penulis:

Dr. Soesi Idayanti S.H., M.H.



Cipta Media Nusantara
2022

GLOBALISASI HUKUM

Penulis : Dr. Soesi Idayanti S.H., M.H.
Editor : Maharani Dewi
Tata Letak : Eka Tresna Setiawan, S.Ag.
Sampul : Nabilx

Diterbitkan Oleh:

Cipta Media Nusantara (CMN), 2022

Anggota IKAPI: 270/JTI/2021

Alamat : Jl. Jemurwonosari 1/39, Wonocolo, Surabaya

Email : contact@ciptapublishing.id

Web : www.ciptapublishing.id

ISBN : 978-623-8041-17-6

vi + 167 halaman, 15,5 cm x 23 cm

Cetakan Pertama, November 2022

Isi Tanggung Jawab Penulis

© All Rights Reserved

Ketentuan Pidana Pasal 112-119

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebagai manusia yang diciptakan oleh sang pencipta dengan penuh akal pikiran maka hendaknya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup wajib kita syukuri. Maka, penulis haturkan beribu-ribu terima kasih kepada pencipta langit, bumi dan seisinya, penerbit, editor, pembaca dan semua orang yang terlibat dalam penulisan buku ini sehingga penulis mampu menyelesaikan proses kepenulisan buku ini.

Buku berjudul **GLOBALISASI HUKUM** ini telah ditulis oleh penulis dalam rangka untuk memberikan berbagai manfaat teoritis dan juga praktis tidak hanya untuk kalangan akademisi namun juga dikalangan masyarakat awam yang ingin mengetahui dan mempelajari tentang apa itu globalisasi, globalisasi hukum, serta dampak apa yang terjadi setelah adanya globalisasi.

GLOBALISASI HUKUM terdiri dari 13 bab dan terdiri dari 4-6 sub bab pada tiap babnya. Buku ini akan menjadi sebuah solusi praktis untuk memahami apa itu globalisasi dari mulai pengertian, sejarah perkembangan, dampak positif, dampak negatif serta kaitannya dengan kehidupan kita. Di masa sekarang kita tidak bisa menafikkan bahwa semua hal mengalami perkembangan khususnya di era globalisasi, baik itu dari bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, kenegaraan dan kebangsaan dan lainnya.

Oleh karenanya itu, ditulisnya buku ini diharapkan mampu memberikan berbagai manfaat nyata untuk para pembaca. Namun, penulis menyadari bahwa banyak ketidaksempurnaan dalam proses penulisan buku ini sehingga diharapkan para pembaca akan memberikan feedback pada penulis berupa saran dan kritikan yang membangun untuk buku yang akan terbit di masa mendatang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1	
PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian Globalisasi	3
B. Neoliberalisme Dan Mitos Pasar Bebas.....	7
C. Globalisasi, Karakteristik & Implikasinya.....	9
D. Strategi Globalisasi.....	10
BAB 2	
HAKIKAT DAN KONSEP PERSPEKTIF GLOBAL.....	15
A. Pengertian Perspektif Global	15
B. Perspektif Global Dilihat Dari Sudut Ilmu-Ilmu Sosial Dan Ilmu Lain Yang Terkait Perspektif Global Dari Visi Geografi	20
C. Perspektif Global Dari Visi Sejarah.....	22
D. Perspektif Global Dari Visi Ekonomi	22
E. Perspektif Global Dari Visi Politik.....	24
F. Perspektif Global Visi Sosiologi.....	25
G. Perspektif Global Dari Visi Antropologi	26
BAB 3	
TUJUAN DAN DIMENSI PERSPEKTIF GLOBAL	29
A. Tujuan Perspektif Global	29
B. Dimensi Dalam Era Globalisasi	31
C. Model Kerjasama Dalam Globalisasi.....	37
D. Peran Negara Dalam Globalisasi	41
BAB 4	
DAMPAK MUNCULNYA GLOBALISASI BAGI MASYARAKAT DUNIA..	45
A. Dampak Globalisasi Terhadap Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara	45

B. Pengaruh Globalisasi Terhadap Kehidupan Masyarakat Indonesia.....	50
C. Penyebab Terjadinya Globalisasi.....	53
D. Ciri-Ciri Globalisasi	54
E. Dampak Positif Dan Negatif Globalisasi Bagi Masyarakat.....	56

BAB 5

RUANG LINGKUP DAN FAKTOR-FAKTOR PERMASALAHAN SOSIAL DAN TANTANGAN AKIBAT GLOBALISASI

A. Ruang Lingkup Globalisasi.....	59
B. Faktor-Faktor Penyebab Globalisasi.....	61
C. Permasalahan Sosial Akibat Globalisasi.....	62
D. Tantangan Globalisasi Di Tingkat Lokal Dan Nasional	65

BAB 6

DINAMIKA KOMUNIKASI GLOBAL

A. Revolusi Digital.....	67
B. Perkembangan Komunikasi Global	69
C. Arus Informasi dan Dampaknya.....	70
D. Interkoneksi Dan Interpedensi Masyarakat Dunia	73
E. Interaksi Masyarakat Terbuka.....	74
F. Dunia dan Masyarakat Tanpa Batas (<i>Borderless World</i>)	76

BAB 7

KAPITALIS DI ERA GLOBALISASI.....

A. Lahirnya Kapitalis.....	79
B. Sifat-Sifat Dasar Sistem Kapitalis	82
C. Prinsip-prinsip Dan Bentuk Kapitalisme.....	84
D. Segi Negatif Dan Kelemahan Kapitalisme	85
E. Dampak Sistem Ekonomi Kapitalisme.....	92
F. Bagaimana Indonesia Menghadapi Globalisasi	95

BAB 8

PASAR BEBAS.....

A. Pengertian, Ciri Dan Kelemahan Pasar Bebas	99
B. Negara APEC Siap Wujudkan Perdagangan Bebas	100
C. Pro Kontra Pasar Bebas.....	102

D. Sikap Beberapa Negara Dalam Perdagangan Bebas	104
--	-----

BAB 9

GLOBALISASI DAN BUDAYA.....	109
------------------------------------	------------

A. Globalisasi Dalam Kebudayaan Tradisional Di Indonesia.....	110
---	-----

B. Perubahan Budaya Dalam Globalisasi	110
---	-----

C. Pengaruh Globalisasi Terhadap Budaya Bangsa.....	112
---	-----

D. Globalisasai Informasi Sebagai Hambatan / Kendala Bagi Ketahanan Nasional.....	117
--	-----

E. Upaya-Upaya Pencegahan Terhadap Dampak Negatif Globalisasi Informasi	119
--	-----

F. Peran Pendidikan Di Era Globalisasi	119
--	-----

BAB 10

PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PERADABAN.....	125
---	------------

A. Pengaruh Positif Dari Globalisasi.....	127
---	-----

B. Pengaruh Negatif Dari Globalisasi.....	128
---	-----

C. Isu-Isu Globalisasi.....	131
-----------------------------	-----

D. Globalisasi dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga dan Kesehatan Mental.....	136
---	-----

E. Dampak Globalisasi Secara Psikologi.....	137
---	-----

F. Pengaruh Globalisasi Terhadap Budaya Dalam Keluarga.....	140
---	-----

BAB 11

GLOBALISASI HUKUM.....	143
-------------------------------	------------

A. Globalisasi.....	143
---------------------	-----

B. Globalisasi hukum	148
----------------------------	-----

C. Sistem Hukum Global dalam Perspektif Politik Hukum Nasional..	149
--	-----

D. Dampak Globalisasi Hukum	152
-----------------------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA	162
----------------------	-----



BAB
1

PENDAHULUAN

Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu. Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi ini. Globalisasi menyentuh seluruh aspek penting kehidupan. Konsep akan globalisasi menurut Robertson (1992), mengacu pada penyempitan dunia secara insentif dan peningkatan kesadaran kita akan dunia, yaitu semakin meningkatnya koneksi global dan pemahaman kita akan koneksi tersebut. Di sini penyempitan dunia dapat dipahami dalam konteks institusi modernitas dan intensifikasi kesadaran dunia dapat dipersepsikan refleksif dengan lebih baik secara budaya. Pengertian lain dari globalisasi seperti yang dikatakan oleh Barker (2004) adalah bahwa globalisasi merupakan koneksi global ekonomi, sosial, budaya dan politik yang semakin mengarah ke berbagai arah di seluruh penjuru dunia dan merasuk ke dalam kesadaran kita. Produksi global atas produk lokal dan lokalisasi produk global Globalisasi adalah proses dimana berbagai peristiwa, keputusan dan kegiatan di belahan dunia yang satu dapat membawa konsekuensi penting bagi berbagai individu dan masyarakat di belahan dunia yang lain.(A.G. Mc.Grew, 1992). Proses perkembangan globalisasi pada awalnya ditandai kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Bidang tersebut merupakan penggerak globalisasi. Dari kemajuan bidang ini kemudian mempengaruhi sektor-sektor lain dalam kehidupan, seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain.

Pengembangan sumber daya manusia yang berwawasan masa depan bukan hanya di satu bidang saja tetapi berbagai bidang dan

diperlukan semangat deregulasi. Pengaruh asing memasuki bidang pengembangan sumber daya manusia, selain tidak bisa dicegah dalam era globalisasi tidak perlu disesali melainkan sebagai cambuk kelenturan kebijakan di bidang pendidikan sekaligus tantangan bagi pengelola pendidikan di Indonesia.

Soedjatmoko (1991:97) menggambarkan sifat-sifat dan kemampuan yang harus dimiliki manusia Indonesia dimasa mendatang sebagai berikut:

1. Orang harus serba tahu atau well Informed, serta harus selalu menyadari bahwa proses belajar tidak akan pernah selesai untuk menjawab dunia yang secara terus menerus mengalami perubahan secara cepat.
2. Harus kreatif dalam memberikan jawaban terhadap tantangan baru, serta punya kemampuan mengantisipasi setiap perkembangan.
3. Mempunyai kepekaan terhadap keadilan sosial dan solidaritas sosial.
4. Memiliki harga diri dan kepercayaan pada diri sendiri berdasarkan iman yang kuat.
5. Sanggup mengidentifikasi dimensi-dimensi moral dan etis dalam perubahan sosial satau pilihan teknologi serta sanggup menalar secara moral, agama untuk masalah perkembangan-perkembangan baru.

Menurut Ulrich Teicher (1997:54) manusia masa depan harus mempunyai persyaratan kualitas dan kemampuan sebagai berikut;

1. Fleksibel
2. Mampu dan bersedia untuk berpartisipasi dalam inovasi serta menjadi kreatif
3. Mampu menguasai hal-hal yang tidak menentu atau seringkali berubah- ubah
4. Mampu bekerja dalam tim
5. Tertarik dan siap belajar seumur hidup

6. Mampu mengambil tanggung jawab yang diserahkan kepadanya
7. Mampu menyiapkan diri untuk melakukan internasionalisasi pasar kerja melalui pengertiannya tentang budaya.
8. Cakap dan terampil dalam berbagai hal yang berupa keterampilan dasar dan umum sebagai pendukung profesinya.

Ciri-ciri di atas mencerminkan kepribadian manusia seutuhnya, jasmani dan rohani yang meliputi keilmuan, keterampilan, kejelasan nilai-nilai hidup, dan moralitas yang tinggi. Kesiapan Indonesia menghadapi era perdagangan bebas tingkat ASEAN 2003 yang sekarang sudah mulai berlangsung, dan APEC tahun 2020 dalam beberapa tahun mendatang sepertinya masih cukup memprihatinkan. Suka atau tidak suka Indonesia menghadapi *European Free Trade Agreement (EFTA)*, *North Atlantic Free Trade Agreement (NAFTA)*, *Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)*, *Latin American Free Trade Assosiation (LAFTA)*, *Trans Atlantic Free trade Agreement (TAFTA)*, *East Asia Economic Caucus (EAEC)*, *African Financial Community (AFC)*, *Central American economy Union (CAEU)*, *Caribbean Community (Coricom)*, *General Agreement on Tariff and Trade (GATT)*, dalam putaran Uruguay yang sekarang berkembang menjadi *World Trade Orgaiation (WTO)*.

A. Pengertian Globalisasi

Istilah global mempunyai ruang lingkup dunia, dan bila dikaitkan dengan ruang lingkup bangsa atau Internasional. Dalam sejarah fenomena pendidikan yang mencakup antar bangsa dengan istilah pendidikan internasional (*international education*). Ini dapat didefinisikan sebagai hubungan antar bangsa yang pada hakekatnya bernuansakan pendidikan. Dalam konkritisasinya merupakan kerja sama antar bangsa dalam bidang pendidikan. Pendidikan yang mempunyai ciri khusus diharapkan menjadi sarana timbulnya saling mengerti dan saling menghargai diantara bangsa-bangsa yang berkaitan. Kalau sebelumnya telah disinggung tentang pendidikan sebenarnya ada bidang-bidang yang termasuk ke dalam

ruang lingkup inter dependensi tersebut. Kewajiban mengenai adanya Interdependensi menumbuhkan dugaan bahwa bangsa-bangsa, masing-masing tidak sepenuhnya dapat memecahkan atau memecahkan masalah yang dihadapi.

1. Apa globalisasi?

Secara ekonomi, globalisasi merupakan proses ke dalam sebuah system ekonomi global (Mansour Fakih,2001). Globalisasi setidaknya melibatkan penciptaan atau ekonomi dunia yang tidak hanya merupakan otalitas dan perekonimian nasional, melainkan sebuah realita independen yang kokoh. Alira modal, komoditas teknologi dan tenaga kerja berskala besar dan berjangka panjang melintasi perbatasan Negara merupakan definisi dan proses globalisasi (James Petras, 1999).

2. Bagaimana globalisasi terjadi?

Ada tiga hal mendasar yang selalu dirujuk oleh pakar untuk menjelaskan perkembangan pesat globalisasi;

- a. kemajuan teknologi atau sering disebut sebagai revolusi informasi,
- b. permintaan pasar dunia,
- c. logika kapitalisme.

3. Kapan globalisasi terjadi ?

Globalisasi terjadi ketika ditetapkannya formasi social global baru dengan ditandai oleh diberlakukannya secara global suatu mekanisme perdagangan melalui penciptaan kebijakan *free-trade*, yakni berhasil ditanda tanganinya kesepakatan internasional tentang pedagangan pada bulan April tahun 1994 di Maroko. Kesepakatan ini merupakan suatu perjanjian internasional, perdagangan yang dikenal dengan *General Agreement On Tarif and Trade* (GATT). GAAT merupakan suatu kumpulan aturan internasional yang mengatur perilaku perdagangan antar pemerintah. Pada tahun 1995, suatu organisasi pengawasan perdagangan dan kontrol perdagangan. Kontrol dunia yang dikenal sebagai *World Trade Organization* (WTO) didirikan. Organisasi global ini sejak didirikan mengambil alih GATT. WTO dirancang bukan sebagai organisasi monitoring bagi Negara-

negara yang tidak mematuhi GATT, melainkan akan bertindak berdasar komplin yang diajukan oleh anggotanya. Dengan demikian WTO merupakan salah satu actor dan forum perundingan antar perdagangan dari mekanisme globalisasi yang terpenting.

4. Mengapa globalisasi?

Kapitalisme di Asia Timur yang selama ini dijadikan teladan keberhasilan pembangunan dan keberhasilan kapitalisme dunia ketiga tengah mengalami kebangkrutan. Namun Negara-negara kapitalis atau imperial pusat telah mampu mengantisipasi hal tersebut, untuk mempercepat laju kapitalisme diperlukan sebuah proses yang disebut dengan globalisasi. Krisis terhadap pembangunan yang terjadi saat ini pada dasarnya merupakan bagian dari krisis sejarah dominasi dan eksploitasi manusia atas manusia manusia yang lain, yang diperkirakan telah berusia lebih dari lima ratus tahun. Proses ini pada dasarnya dapat dibagi ke dalam tiga periode;

a. Fase pertama :

periode kolonialisme yakni perkembangan kapitalisme di Eropa yang mengharuskan ekspansi secara fisik untuk memastikan perolehan bahan baku mentah. Berakhirnya kolonialisme telah memasukkan dunia pada era neo kolonialisme, ketika modus dominasi dan penjajahan tidak lagi fisik dan secara langsung melainkan melalui penjajahan teori dan ideologi.

b. Fase ke dua :

ini dikenal sebagai era pembangunan atau era developmentalisme dan ditandai dengan masa kemerdekaan negara dunia ketiga secara fisik, tetapi pada era developmentalisme ini didominasi negara-negara bekas penjajah terhadap bekas koloni mereka tetap dipertahankan melalui control teori dan proses perubahan social mereka. Dengan kata lain pada fase ke dua ini kolonialisme tidak terjadi secara fisik, melainkan melalui hegemoni yakni dominasi cara pandang dan ideology serta diskursus yang dominant melalui produksi pengetahuan.

c. Fase ke tiga :

Yang terjadi menjelang abad duapuluh satu ditandai dengan liberalisme segala bidang yang dipaksakan melalui Stuctural Adjustment Program (SAP) oleh lembaga financial global, dan disepakati oleh rezim GATT dan perdagangan bebas, suatu organisasi global yang dikenal dengan WTO. Sejak saat itulah dunia memasuki era yang dikenal dengan globalisasi.

5. Dimana globalisasi terjadi?

Sejak kapitalisme membutuhkan ekspansi modal untuk mempercepat lajunya, maka ia membutuhkan sesuatu yang dapat menembus wilayah-wilayah baik secara geografis maupun ke dalam aspek-aspek sosial dan personil yang semakin lama semakin banyak dari kehidupan manusia. Misalnya untuk menekan biaya produksi maka dibutuhkan bahan-bahan mentah yang murah, tenaga kerja murah, intervensi negara yang sekecil-kecilnya, pendek kata globalisasi mirip sekali dengan misi suci 3G (Gold, Gospel, Glory) dari para kolonialis masa lalu.

6. Siapa aktor-aktor dari globalisasi?

Globalisasi sebagai suatu proses pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam system ekonomi dunia pada dasarnya diperankan oleh tiga aktor utama proses tersebut. Pertama adalah TNC (Trans National Corporation), yakni perusahaan multinasional yang besar yang dengan dukungan Negara-negara yang diuntungkan oleh TNC tersebut membentuk suatu hewan peserikatan perdagangan global yang dikenal dengan WTO (World Trade Organization) yang menjadi aktor kedua. Selama dua decade menjelang berakhirnya abad lalu perusahaan TNC tersebut meningkat secara kuantitas dari sekitar 7000 TNC pada 1970 menjadi 37.000 TC pada 1990. Pada saat tersebut mereka menguasai 67 % perdagangan dunia antar TNC dan menguasai 34,1% dari total perdagangan global yang mampu mengontrol. Kini ada 100 TNC yang mampu mengontrol sampai 75 % perdagangan global (Peter Marcus, The Language Of Globalization, 2000). Kewenangan lainnya adalah mendesak atau mempengaruhi serta memaksa Negara-negara untuk melakukan penyesuaian kebijakan nasionalnya bagi kelancaran proses pengintegrasian ekonomi nasional kedalam ekonomi global.

B. Neoliberalisme Dan Mitos Pasar Bebas

Paham neoliberalisme secara prinsipil berbeda dengan paham liberalisme yang lama, hanya karena waktu, konteks pemunculannya kembali serta skala dan strateginya yang berbeda sudah tentu jawabannya berlainan. Dengan demikian neoliberalisme merupakan kembalinya paham liberalisme lama di era yang baru. Para penganut paham ekonomi neoliberalisme percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dicapai sebagai hasil normal dari kompetisi bebas. Kompetisi yang agresif adalah hasil dari kepercayaan bahwa pasar bebas adalah cara yang efisien dan tepat untuk mengalokasikan sumber daya alam rakyat yang langka untuk memenuhi kebutuhan manusia. Harga barang dan jasa selanjutnya menjadi indikator apakah sumber daya telah habis atau masih banyak. Jika harganya murah maka berarti persediaan masih memadai. Harga mahal artinya produknya mulai langka, apabila harga tinggi orang akan tertarik untuk menanam modal. Oleh sebab itu harga menjadi tanda apa yang harus diproduksi. Itulah sebabnya ekonomi neoliberalim tidak menggiring pemerintah untuk ikut campur, serahkan saja pada mekanisme dan hukum pasar untuk bekerja. Pendirian neoliberal pada prinsipnya tidak bergeser dari paham liberalisme yang dipikirkan oleh Adam Smith dalam bukunya *the Wealth of Nation* (1776).

Dalam perjalanan kapitalisme selanjutnya di akhir abad 20 pertumbuhan dan akumulasi kapital dari golongan kapitalis menjadi lambat dan salah satu hambatannya adalah proteksi, paham keadilan social, kesejahteraan bagi rakyat, dan berbagai tradisi adapt pengelolaan sumber daya alam berbasis rakyat dan sebagainya. Untuk itu, kapitalisme memerlukan suatu strategi baru untuk mempercepat pertumbuhan dan akumulasi capital dan strategi yang ditempuh adalah menyingkirkan segenap rintangan bagi investasi dan pasar bebas. Gagasan perlindungan hak milik intelektual, good governance, penghapusan subsidi, program proteksi pada rakyat, deregulasi, penguatan civil society, program anti korupsi, dianggap sebagai program yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu diperlukan suatu tatanan perdagangan global, dan sejak itulah gagasan globalisasi dimunculkan. Dengan demikian globalisasi pada dasarnya berpijak pada kebangkitan kembali paham liberalisme, suatu paham yang dikenal sebagai neoliberalisme.

Apa yang menjadi pendirian neoliberalisme dicirikan sebagai berikut:

1. Kebijakan pasar bebas yang mendorong perusahaan-perusahaan swasta dan pilihan konsumen
2. Penghargaan atas tanggung jawab personel dan inisiatif kewiraswastaan.
3. Menyingkirkan birokrasi dan parasit pemerintah yang tak pernah mampu.

Aturan dasar kaum neoliberal adalah meliberalisasikan perdagangan dan financial, biarkan pasar menentukan harga, akhiri inflansi, (stabilisasi ekonomi makro dan privatisasi) kebijakan pemerintah haruslah menyingkir dari penghalang jalan (Chomsky, 1999). Paham inilah yang saat ini mengglobal dengan mengembangkan consensus yang dipaksakan dan dikenal sebagai globalisasi sehingga terciptalah sebuah tata dunia.

Secara lebih spesifik pokok-pokok pendirian neoliberal meliputi :

1. Membebaskan perusahaan swasta dari campur tangan pemerintah. Yaitu dengan menjauhkan pemerintah dari campur tangan di bidang-bidang perburuhan, investasi, serta membiarkan mereka memiliki ruang untuk mengatur diri sendiri, untuk tumbuh dengan menyediakan kawasan pertumbuhan, seperti otorita Batam, NAFTA, AFTA dan lain-lain.
2. Menghentikan subsidi negara kepada rakyat karena hal itu selain bertentangan dengan prinsip pasar bebas serta persaingan bebas.
3. Penghapusan ideologi kesejahteraan bersama dan pemilikan komunal seperti yang masih banyak dianut oleh masyarakat tradisional. Paham kesejahteraan dan pemilikan bersama tersebut dianggap menghalangi pertumbuhan. Akibat dari prinsip tersebut adalah membiarkan manajemen sumber daya alam untuk diserahkan pada ahlinya, dan bukan pada masyarakat tradisional atau masyarakat adapt yang tidak

mampu mengelola sumber daya alam secara efisien dan efektif, dan yang lebih penting harus mengacu pada etika pengelolaan lingkungan

C. Globalisasi, Karakteristik & Implikasinya

Globalisasi adalah kecenderungan umum terintegrasinya kehidupan masyarakat domestik/lokal ke dalam komunitas global di berbagai bidang. Pertukaran barang dan jasa, pertukaran dan perkembangan ide-ide mengenai demokratisasi, hak asasi manusia (HAM) dan lingkungan hidup, migrasi dan berbagai fenomena human trafficking lainnya yang melintas batas-batas lokalitas dan nasional kini merupakan fenomena umum yang berlangsung hingga ke tingkat komunitas paling lokal sekalipun. Pendek kata, komunitas domestik atau lokal kini adalah bagian dari rantai perdagangan, pertukaran ide dan perusahaan transnasional.

Dalam hal perburuhan kita juga adalah anggota ILO (*International Labor Organization*) yang semakin memperhatikan prinsip-prinsip penerapan HAM dalam kehidupan kaum buruh. Demikian pula dalam isu-isu yang berhubungan dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup, kita termasuk salah satu negara yang menandatangani Protokol Kyoto yang mengatur pengurangan emisi karbon dan sejumlah gas lainnya yang mengancam keberadaan ozon dan menimbulkan efek pemanasan global.

Melihat implikasi yang isunya begitu beragam tetapi begitu mendalam dan spesifik konteks persoalannya, globalisasi bukanlah fenomena hitam putih yang bisa secara mudah dan cepat dikelola. Fenomena ini berada di sekitar dan bahkan embedded dengan berbagai kepentingan kita. Global governance di berbagai area -yang sebagian sudah disebut tadi- tidak saja menggambarkan kompleksitas persoalannya, tetapi juga sekaligus menawarkan ide atau bahkan aturan main alternatif untuk mengelola dan menyelesaikan persoalan-persoalan di seputar isu-isu itu.

Eksplorasi berbagai ide, inisiatif dan tindakan yang berasal dari kalangan domestik atau lokal (*local genuines*) oleh karenanya perlu secara serius dilakukan agar pertentangan global versus lokal

tidak menemukan jalan keluar yang ekstrim, yaitu *either simply 'join the club' or 'go to hell with globalization'*. Proses 'glokalisasi' yang menggabungkan arus globalisasi dari atas dengan berbagai tradisi, nilai atau ide lokal adalah salah satu tema yang perlu mendapat kajian mendalam.

Proses *globalization from below* dengan demikian perlu dikembangkan untuk menandingi dan sekaligus mendampingi proses hiper-globalisasi yang selama ini digambarkan secara amat menakutkan. Pertanyaannya: bagaimana melakukan itu?

D. Strategi Globalisasi

Pada level negara/pemerintah, proses itu bisa dilakukan dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang dituntun oleh strategi penyesuaian yang cocok untuk merespon perubahan-perubahan di tingkat global. Penelitian oleh Nanang Pamuji Mugasejati dkk. (Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL UGM & Balitbang Deplu, 2000) merekomendasikan 5 (lima) strategi penyesuaian yang secara teoretik bisa diadopsi. Rekomendasi ini ditawarkan setelah terlebih dahulu mengidentifikasi 2 (dua) macam rute yang selama ini dilalui ketika perubahan-perubahan di tingkat global mempengaruhi tingkah laku negara dan masyarakat di tingkat domestik.

Rute pertama menggambarkan proses perubahan di tingkat global yang menyebabkan munculnya institusi internasional. Institusi ini kemudian memiliki peluang untuk mempengaruhi negara dan masyarakat domestik. Di rute yang pertama ini peran lembaga-lembaga formal antar-negara di tingkat internasional adalah sentral.

Rute kedua menggambarkan proses perubahan di tingkat global yang menyebabkan munculnya institusi trans-nasional. Institusi ini kemudian mempengaruhi terutama masyarakat domestik tetapi juga negara. Di rute yang kedua inilah kita melihat peran komunitas internasional, seperti komunitas epistemik, dalam mempengaruhi masyarakat domestik.

Berikut ini 5 (lima) strategi penyesuaian yang diajukan.

1. Pertama, strategi otonomi nasional. Dalam strategi ini mengurangi dalam jumlah besar atau bahkan menghentikan sama sekali kontak dengan dunia internasional yang dianggap akan membahayakan kedaulatan dan otonomi dalam pengambilan kebijakannya. Dalam bidang ekonomi, kasus Kuba dan Korea Utara adalah contoh ekstrim ketika mereka mengambil jalan isolasi. Dalam isu non-ekonomi, seperti hak asasi manusia (HAM) dan demokratisasi, sejumlah negara membuat kebijakan yang membatasi warganya terhadap akses informasi atau partisipasi politik guna mencegah intervensi nilai-nilai global.
2. Strategi kedua adalah pengakuan timbal balik (*mutual recognition*). Strategi ini masih menyisakan keputusan atau kebijakan politik sebagai otoritas negara, akan tetapi menyerahkan proses integrasi ekonomi domestik ke dalam pasar internasional ditentukan oleh kekuatan pasar. Negara berusaha menciptakan kebijakan yang sesuai dengan keinginan pasar dan bekerjasama dengan negara lain dalam bentuk konsultasi yang tidak mengikat.
3. Strategi ketiga adalah koordinasi. Strategi ini menekankan pada pentingnya kerjasama antar-negara agar kebijakan nasional masing-masing bisa saling bersesuaian. Tujuannya menghindarkan pay-off yang tidak diinginkan bersama. Strategi ini mendorong negara untuk aktif dalam berbagai perundingan internasional yang berupaya membentuk institusi-institusi internasional dalam isu-isu tertentu.
4. Strategi keempat: adalah harmonisasi eksplisit (*explicit harmonization*) atau kolaborasi. Dalam strategi ini negara menerima adanya joint-adjustment dalam kebijakan nasionalnya. Di sini berlaku juga proses monitoring yang dilakukan oleh institusi internasional untuk menjamin adanya kepatuhan terhadap setiap kesepakatan yang berlaku. Ini berlaku secara substantif maupun prosedural. Kebijakan Negara yang menyesuaikan berbagai kesepakatan dalam bidang investasi internasional di Negara-negara OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) seperti termuat

dalam MAI (*Multilateral Agreement on Investment*) adalah contoh penerapan kebijakan ini.

5. Strategi kelima adalah federalist mutual governance. Strategi ini mendorong negara untuk menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada institusi internasional dengan membentuk suatu organ supra-negara. Uni Eropa dalam batas-batas tertentu adalah contoh sebuah istitusi internasional yang memiliki organ-organ supra-negara untuk mengatur bidang-bidang tertentu. Salah satunya adalah rejim moneter yang menerbitkan dan mengatur peredaran mata uang Euro di negara-negara anggotanya.

Terakhir, pada level individual atau masyarakat, kita bisa mengadopsi strategi yang ditawarkan oleh Brechen & Costello (1994) yang mereka sebut sebagai 'Strategi Liliput'. Strategi ini menekankan pada aksi non-negara atau non-pemerintah yang bisa dilakukan oleh para aktivis masyarakat, buruh, akademisi, pengusaha, partai politik, atau bahkan aparat negara yang *concern* terhadap proses globalisasi yang merugikan banyak kalangan masyarakat. Inilah guidelines-nya :

1. Linking self-interest with common interest
2. Linking the global to the local
3. Linking North and South
4. Linking constituences across borders
5. Linking particular interest with wider commonalities
6. Linking issues and constituencies
7. linking the threatened with the marginalized
8. Linking different power sources
9. Linking struggle against targeted institutions
10. Linking resistance with institutional change
11. Linking economic issues and democratization

Riza Noer Arfani. Alumnus HI UGM tahun 1992. Semasa mahasiswa pernah aktif di Jama'ah Musholla Fisipol (JMF). Meraih gelar MA dari Syracuse University, USA, pada tahun 1996. Sekarang

dosen tetap merangkap sebagai sekretaris Jurusan HI UGM. Aktif juga di Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan (PPSK). Tulisannya banyak dimuat di beberapa surat kabar dan Jurnal Ilmiah.



BAB
2

HAKIKAT DAN KONSEP PERSPEKTIF GLOBAL

Kita dilahirkan dan hidup di dalam masyarakat yang kaya dengan tradisi, budaya, nilai, sikap, dan adat istiadat. Dunia ini kaya dengan keberbedaan (*diversity*) dan keragaman (*mutiplicity*) tentang pandangan, bahasa, agama, adat istiadat, budaya dan sebagainya yang menjadikan kita sebagai makhluk yang unik. Dalam perkembangannya kita mengalami berbagai kemajuan dalam kesadaran dan pandangan. Wawasan Nusantara misalnya, merupakan pandangan modern yang melihat bukan perbedaan tetapi persamaan, bukan terpisahkan tetapi terhubung. Sebagai contoh antara orang Sunda dengan orang Batak bukan adanya perbedaan tetapi adanya persamaan yaitu warga negara Indonesia yang ramah-tamah. Antara pulau Jawa dan Sumatra bukan dipisahkan oleh selat Sunda tetapi dihubungkan oleh selat Sunda. Pandangan modern seperti itu menyebabkan dunia menjadi semakin sempit, yang didukung oleh perkembangan IPTEK yang begitu cepat, terutama dalam bidang komunikasi dan informasi. Dengan demikian ada kecenderungan bahwa dalam kehidupan kita tidak ada lagi batas-batas negara yang secara tradisional membatasi hubungan antara manusia di satu negara dengan negara lainnya.

A. Pengertian Perspektif Global

Perspektif global adalah suatu cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian atau kegiatan dari sudut kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional. Oleh karena itu, sikap dan perbuatan kita juga diarahkan untuk kepentingan global. Perspektif global adalah suatu pandangan yang timbul akibat suatu kesadaran bahwa hidup dan kehidupan ini untuk kepentingan global yang lebih luas. Dalam cara berpikir seseorang harus berpikir

global, dan dalam bertindak dapat secara lokal (think globally and act locally). Oleh karena itu, harus kita camkan betul bahwa yang kita lakukan dan perbuat akan mempengaruhi dunia secara global. Hal ini harus ditanamkan pada diri murid bahwa kehidupan kita ini adalah bagian dari kehidupan dunia. Kita tidak dapat berkembang tanpa adanya hubungan dan komunikasi dengan dunia luar, kita hidup karena adanya saling ketergantungan. Oleh karena itu, sebagai guru sebaiknya mempersiapkan diri sebagai komunikator atau penghubung dengan dunia luar tersebut. Untuk itu maka guru harus:

1. Tertarik dan peduli terhadap kejadian dan kegiatan pada masyarakat lokal, nasional, dan global.
2. Secara aktif mencari dan menyimpan informasi yang bersifat dunia.
3. Mempunyai sifat terbuka, mau menerima setiap adanya pembaruan.
4. Mampu menyeleksi informasi untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat kita.

Untuk dapat memiliki pandangan global seperti itu, maka Anda sekarang akan kami ajak untuk memahami terlebih dahulu tentang istilah lain yang berkaitan dengan global yaitu globalisasi. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan globalisasi tersebut?

Dari istilahnya saja kita sebenarnya dapat memahami bahwa globalisasi mengandung pengertian proses. Istilah lainnya yang senada adanya strukturisasi yaitu proses perstrukturian, reformasi proses pembentukan ulang atau pembaharuan, industrialisasi yaitu proses pengindustrialisasian.

Istilah globalisasi saat ini menjadi sangat populer karena berkaitan dengan gerak pembangunan Indonesia, terutama berkaitan dengan sistem ekonomi terbuka, dan perdagangan bebas. Era globalisasi ditandai dengan adanya persaingan yang semakin tajam, padatnya informasi, kuatnya komunikasi, dan keterbukaan. Tanpa memiliki kemampuan ini maka Indonesia akan tertinggal jauh dan terseret oleh arus globalisasi yang demikian dahsyat.

Ada beberapa penjelasan yang dikemukakan oleh para ahli di antaranya adalah John Huckle (Miriam Steiner, 1996) yang menyatakan bahwa globalisasi adalah "suatu proses dengan mana kejadian, keputusan dan kegiatan di salah satu bagian dunia menjadi suatu konsekuensi, yang signifikan bagi individu dan masyarakat di daerah yang jauh". Ahli lainnya adalah Albrow (Yaya, 1998) mengemukakan bahwa globalisasi adalah *".. keseluruhan proses di mana manusia di bumi ini diinkorporasikan (dimasukkan) ke dalam masyarakat dunia tunggal, masyarakat global. Karena proses ini bersifat majemuk, maka kita pun memandang globalisasi di dalam kemajemukan"*.

Arus Globalisasi di Indonesia pada mulanya sangat terasa pada aspek ekonomi. Hal ini ditandai dengan adanya APEC, dan AFTA yang semuanya menjurus pada perdagangan bebas. Namun, semakin ke depan aspek politik, budaya dan hukum mulai terasa terutama dengan adanya LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang bekerja dalam lingkup internasional. Selain itu dalam bidang politik, gaung reformasi sangat cepat merambat ke seluruh dunia, di mana komentar dan opini internasional sangat deras masuk ke Indonesia. Ini didukung oleh kemajuan teknologi komputer yang sangat canggih. Demikian pula halnya dalam aspek budaya yang didukung oleh teknologi elektronik, maka dunia semakin sempit. Setiap hari kita dapat menyaksikan kejadian-kejadian di seluruh dunia dalam waktu beberapa menit saja. Ahli lainnya yaitu Hamijoyo, (Mimbar, 1990) menjelaskan ciri-ciri yang berkaitan dengan globalisasi ini seperti berikut:

1. Globalisasi perlu didukung oleh kecepatan informasi, kecanggihan teknologi, transportasi dan komunikasi yang diperkuat oleh tatanan organisasi dan manajemen yang tangguh.
2. Globalisasi telah melampaui batas tradisional geopolitik. Batas tersebut saat ini harus tunduk pada kekuatan teknologi, ekonomi, sosial politik dan sekaligus mempertemukan tatanan yang sebelumnya sulit dipertemukan.
3. Adanya saling ketergantungan antarnegara.

4. Pendidikan merupakan bagian dari globalisasi. Penyebaran dalam hal gagasan, pembaruan dan inovasi dalam struktur, isi dan metode pendidikan dan pengajaran sudah lama terjadi yang menunjukkan globalisasi. Ini telah lama terjadi melalui literatur, atau kontak antar pakar dan mahasiswa.

Sebagaimana sudah diutarakan pada bagian awal modul ini, bahwa globalisasi menunjukkan dunia yang semakin sempit, ketergantungan antara bangsa semakin besar. Globalisasi adalah proses penduniaan, artinya segala aktivitas diperhitungkan untuk kepentingan dunia. Ini disebabkan oleh saat ini tidak ada lagi suatu bangsa yang homogen dan statis. Setiap bangsa berkembang berkat interaksi dengan bangsa lainnya. Kita harus terbuka dengan dunia luar, tetapi kita harus tetap kokoh dengan akar budaya bangsa kita.

Globalisasi mempunyai dampak baik positif maupun negatif. Sebagaimana dikemukakan oleh Tilaar (1998) bahwa dampak positifnya akan menyebabkan munculnya masyarakat megakompetisi, di mana setiap orang berlomba untuk berbuat yang terbaik untuk mencapai yang terbaik pula. Untuk berkompetisi ini diperlukan kualitas yang tinggi. Dalam era globalisasi adalah era mengejar keunggulan dan kualitas, sehingga masyarakat menjadi dinamis, aktif dan kreatif.

Globalisasi ini dapat melanda berbagai bidang kehidupan, Emil Salim (Mimbar, 1989) mengemukakan ada empat bidang kekuatan yang membuat dunia menjadi semakin transparan yaitu perkembangan IPTEK yang semakin tinggi, perkembangan bidang ekonomi yang mengarah pada perdagangan bebas, lingkungan hidup, dan politik. Pendapat lain dikemukakan oleh Tilaar (1998) Era globalisasi adalah suatu tatanan kehidupan manusia yang secara global telah melibatkan seluruh umat manusia. Menurutnya globalisasi secara khusus memasuki tiga arena penting dalam kehidupan manusia yaitu ekonomi, politik dan budaya. Hal ini didukung dua kekuatan yaitu bisnis dan teknologi sebagai tulang punggung globalisasi, maka ketiga arena bidang kehidupan tersebut menempatkan manusia dan lembaga-lembaganya dengan berbagai tantangan, kesempatan dan peluang.

Gelombang globalisasi dalam bidang tersebut akan berdampak terhadap bidang lainnya, yaitu bidang sosial terutama karena didukung oleh kemajuan dalam teknologi transportasi dan komunikasi modern. Selanjutnya HAR Tilaar, mengemukakan ciri era globalisasi, yaitu adanya era masyarakat terbuka. Yang dimaksud dengan era masyarakat terbuka dapat dibagi dalam dua hal, yaitu:

1. Dalam bidang ekonomi, ditandai dengan adanya pasar bebas, yang menuntut kemampuan, kreasi yang menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi.
2. Di dalam bidang politik ditandai dengan berkembangnya nilai demokrasi dalam masyarakat yang demokratis, yaitu suatu masyarakat di mana setiap anggotanya ikut aktif dalam kehidupan bersama dan menciptakan kehidupan bersama yang lebih baik. Sedangkan masyarakat yang demokratis adalah masyarakat yang menghormati nilai Hak Asasi Manusia (HAM), merupakan masyarakat madani yang hak dan kewajibannya dihargai dan dijunjung tinggi.

Proses globalisasi akan melahirkan kesadaran global di mana manusia saat ini merasa satu dengan lainnya, saling tergantung dan saling membutuhkan, saling memberi dan saling membantu. Ini dimungkinkan oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang demikian cepat sehingga dapat menyatukan umat manusia. Globalisasi ditandai dengan cepatnya perubahan, oleh karena itu, kita harus menguasai IPTEK. Dalam hal ini Tilaar mengisyaratkan konsep inovasi yang dituntut dalam era globalisasi, yaitu:

1. Dalam era globalisasi kita berada pada suatu masyarakat yang terbuka, dan penuh kompetisi. Ini berarti bahwa masyarakat berada dalam kondisi yang menghasilkan yang terbaik.
2. Masyarakat di dalam era globalisasi menuntut kualitas yang tinggi baik dalam jasa, barang, maupun investasi modal. Kualitas berada di atas kuantitas.
3. Era globalisasi merupakan suatu era informasi dengan sarana-sarannya yang dikenal sebagai information superhighway. Oleh sebab itu, pemanfaatan informasi superhighway

merupakan suatu kebutuhan masyarakat modern dan dengan demikian perlu dikuasai masyarakat.

4. Era globalisasi merupakan era komunikasi yang sangat cepat dan canggih. Oleh sebab itu, penguasaan terhadap sarana-sarana komunikasi seperti bahasa, merupakan syarat mutlak.
5. Era globalisasi ditandai dengan maraknya kehidupan bisnis. Oleh sebab itu, kemampuan bisnis, manajer, merupakan tuntutan masyarakat masa depan.
6. Era globalisasi merupakan era teknologi dan oleh sebab itu, anggota- anggotanya harus melek digital.

B. Perspektif Global Dilihat Dari Sudut Ilmu-Ilmu Sosial Dan Ilmu Lain Yang Terkait Perspektif Global Dari Visi Geografi

1. Geografi

- a. Ilmu keruangan yang mengkaji berbagai fenomena dalam konteks keruangannya
- b. Ruang yang dikonsepsikan dalam geografi yaitu permukaan bumi yang tiga dimensi, terdiri atas muka bumi yang berupa darat, perairan serta kolom udara diatasnya
- c. Ruang permukaan bumi secara bertahap ukuran dan jaraknya mulai dari tingkat local, regional sampai ke tingkat global.
- d. Oleh karena itu perspektif global adalah perspektif keruangan yang bertahap dari perspektif lokal, regional, sampai ke perspektif global.

Contoh-contoh:

- a. Perkembangan perkembangan suatu tempat (local) – akibat penambahan penduduk, sosial ekonomi, budaya – berkembang luas bersambung dengan kota. Kota bertambah penduduknya akibat urbanisasi (perpindahan penduduk dari desa ke kota, perluasan kawasan kota, dan perubahan cara hidup sebagai orang kota)

- b. Pengamatan perkembangan keruangan (tempat) yang lebih luas (regional) – kawasan regional Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, Asia Barat dan seterusnya. Kawasan tersebut berkembang akibat pergeseran fungsi lain menjadi pertanian, pemukiman, kawasan pertanian menjadi kawasan industri, jalan, lapangan golf, dan seterusnya, membawa dampak pada perubahan tata air, tatanan kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan, perubahan cuaca dan seterusnya.
- c. Perkembangan interaksi serta interpedensi keruangan itu, tidak hanya terjadi antar regional (di dalam negeri) namun juga menembus batas-batas negara.
 - 1) Interaksi keruangan Indonesia dengan Singapura, Malaysia, Filipina, bahkan juga Australia. Ini terjadi karena perkembangan transportasi dan media elektronik (radio, tv, faximile, internet). Interaksi keruangan antar regional ini tercermin dari pakaian, makanan, kesenian, dan perundangan, sehingga nampak terjadi sebagai saling ketergantungan.
 - 2) Perspektif geografi atau keruangan yang paling luas adalah perspektif global. Dalam bidang geografi dikenal adanya konsep dasar globalisme, dan konsep bumi sebagai planet. Konsep ini mengungkapkan bahwa bumi sebagai planet. Konsep ini mengungkapkan bahwa bumi sebagai global atau suatu planet itu berdampak luas terhadap kondisi alamiah dan kondisi kehidupan yang mendunia. Dalam bentuk bumi sebagai globe atau planet, dipermukaannya terdapat sifat-sifat yang sama di seluruh dunia, dan sekaligus juga terdapat perbedaan. Perspektif global bagi studi geografi tidak asing. Angin, arus laut, pasang surut, iklim, cuaca, selain ada lingkup local, dan regional, juga lingkup globalnya. Peristiwa/masalah local (penggundulan hutan, kebakaran hutan, pemanasan global) dapat menjadi masalah global.

C. Perspektif Global Dari Visi Sejarah

1. Emmanuel Kant (abad XVIII) mengungkapkan bahwa sejarah dan Geografi merupakan ilmu dwi tunggal. Artinya jika Sejarah mempertanyakan suatu peristiwa “kapan” terjadi, masih belum lengkap jika tidak dipertanyakan “dimana” tempat kejadiannya. Jadi dimensi waktu dengan ruang/tempat saling melengkapi. Perspektif sejarah mengacu pada konsep waktu.
2. Perspektif sejarah suatu peristiwa, membawa citra kepada kita tentang suatu pengalaman masa lampau yang dapat dikaji hari ini, untuk memprediksi kejadian yang akan datang.
3. Kita mengenal tokoh-tokoh, bangunan bersejarah (keajaiban dunia), perang diberbagai kawasan (khususnya perang dunia), pertemuan-pertemuan internasional, (konfrensi AA di Bandung 1955 misalnya) prilaku dan peradabannya telah berpengaruh global dalam berbagai aspek sosial budaya, ekonomi, dan sosial politik.

D. Perspektif Global Dari Visi Ekonomi

1. Ilmu ekonomi menyangkut beberapa aspek yang meliputi:
 - a. Menentukan pilihan
 - b. Keinginan yang tak terbatas
 - c. Persediaan sumber daya alam terbatas, bahkan ada yang langka
 - d. Kegunaan alternatif sumber daya, dan
 - e. Penggunaan hari ini dan hari esok
2. Dari aspek-aspek tersebut, jelas bahwa perspektif ekomomi terkait dengan waktu, hari ini dan hari esok. Sedangkan apa yang diperspektifkan terutama berkenan yang “cenderung” tidak terbatas, persediaan sumber daya itu terbatas bahkan langka, dan adanya penggunaan alternatif sumber daya.
3. Perspektif ke hari esok atau masa yang akan datang terkait luas dengan pertumbuhan penduduk, kemajuan dan penerapan IPTEK,

dalam proses produksi serta distribusi, kebutuhan yang cenderung tak terbatas kuantitasnya, dan akhirnya persediaan sumber daya yang terbatas bahkan langka. Sedangkan penggunaan sumber daya alternatif, sangat berkaitan dengan IPTEK dan kecenderungan kebudayaan.

4. Pertumbuhan penduduk dunia yang cepat (ingat 7 Juli 1986, terjadi peristiwa jumlah penduduk dunia yang ke 5 milyar, dan tahun 2000 mampir hampir 8 milyar) apa konsekuensinya? Peningkatan produksi untuk persediaan dan pelayanan kebutuhan hidup pertumbuhan penduduk yang cepat itu. Sementara sumber daya alam terbatas dan sifatnya ada yang terbaharukan dan tak terbaharukan.
5. Teknologi telah memungkinkan memproduksi yang lebih besar melalui industriisasi. Sementara, sepertinya dapat mengatasi kebutuhan hidup yang diperlukan oleh laju pertumbuhan penduduk baru.
6. Akibatnya kebutuhan manusia diarahkan pada:
 - a. Harus menguasai teknologi
 - b. Menstabilkan jumlah penduduk
 - c. Mengembangkan tatanan sosial yang mampu hidup produktif dan sejahtera secara terpadu, dengan ekonomi yang seimbang.
7. Teknologi, industrialisasi, komunikasi telah mendatangkan masalah baru yaitu berbagai pencemaran udara (debu), zat kimia, suara, air, tanah, dan bahkan pencemaran moral. Ini semua indikator munculnya kerusakan lingkungan hidup, dan kerusakan moral bangsa, jauh dari kepribadian aslinya.
8. Dalam menghadapi perspektif global ekonomi beberapa perekonomian pasar bebas, beralihnya kawasan ekonomi maju dari Atlantik ke Pasifik, dan kebangkitan ekonomi Asia Afrika membawa konsekuensi persiapan dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, produksi, mental, dan akhlak yang tinggi, sebagai konsekuensi arus globalisasi.

E. Perspektif Global Dari Visi Politik

1. Ilmu politik mempelajari Negara, tujuan-tujuan Negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara negara dengan warga negaranya dengan negara-negara lain.
2. Menurut konsep ini, Ilmu Politik mengadakan studi mengenai negara dengan tujuannya, lembaga-lembaga yang melaksanakan tujuan, hubungan dengan warga negaranya, serta hubungan negara dengan negara-negara lainnya.
3. Dalam sorotan perspektif global, aspek hubungan dengan negara lain merupakan hal yang pokok. Hubungan dengan negara lain, khususnya hubungan negara RI dengan negara tetangga yang kita sebut hubungan regional; dengan negara-negara lain pada umumnya kita sebut hubungan antar bangsa atau hubungan internasional dan akhirnya dengan semua negara di dunia ini, yang kita sebut hubungan global.
4. Konotasi hubungan global sesungguhnya lebih menyeluruh dan tak terlalu normal. Jadi berbeda dengan hubungan bilateral dan hubungan multilateral.
5. Secara politik negara dengan tujuan dan lembaga-lembaganya dari waktu ke waktu mengalami perkembangan.
6. Contohnya: RI – awal perjuangan diutamakan hal pengakuan dan hubungan politik, sebagai modal pengembangan di dunia internasional. Berkembanglah kerjasama melalui konferensi AA, Gerakan non Blok, ASEAN, politik bebas aktif yang menempatkan kedudukan Indonesia terhormat di tengah-tengah dua raksasa adikuasa (AS + Rusia) sebagai negara non blok, dan perwujudan pembangunan politik di dunia internasional pada tingkat global.
7. Politik bebas aktif, menyebabkan Indonesia mampu terlibat dalam penyelesaian politik di Kamboja, Filipina, Bosnia, Palestina, dan Israel, dan lain-lain.
8. Setiap perubahan politik di Negara-negara lain yang telah maju (Uni Sovyet, RRC, Jerman, Jepang, USA, dan lain-lain)

harus diantisipasi dan diperhitungkan pengaruhnya terhadap perkembangan politik Indonesia.

9. Konsep glasnost (keterbukaan) dan terhadap Perestroika dari Gorbachev dari Rusia, perang dingin, runtuhnya tembok Berlin, bubarnya Uni Sovyet dan Yugoslavia harus diantisipasi dampaknya terhadap perkembangan politik di Indonesia, sehingga harus diperhatikan, khususnya dampak negatifnya.

F. Perspektif Global Visi Sosiologi

1. Sosiologi adalah studi tentang fenomena yang timbul akibat hubungan kelompok- kelompok umat manusia, studi manusia dan lingkungan manusia dalam hubungan satu sama lain.
2. Obyek yang menjadi sorotan utamanya yaitu hubungan antar manusia, terutama dalam lingkungan yang terbentuk oleh manusia sendiri yaitu lingkungan sosial.
3. Hubungan dan interaksi sosial makin lama makin luas dan makin berkembang dari dua orang sampai kelompok, antara bangsa dan bangsa lain. Luasnya interaksi sosial mulai dari keluarga, teman main, para tetangga, lokal dusun, regional propinsi, sampai ke tingkat global antar bangsa di dunia.
4. Motif interaksi sosial yang terjadi tampak beragam, ada yang bermotif ekonomi, budaya, politik, bahkan agama.
5. Dampak kemajuan IPTEK di bidang transportasi dan komunikasi, interaksi sosial makin intensif dan makin meluas. Interaksi telah menembus batas-batas local, regional, nasional, internasional sampai global sekaligus, karena adanya penerapan dan pemanfaatan media elektronika seperti radio, TV, faximile, telepon, internet, yang telah mengintensifkan interaksi sosial meskipun ada yang tidak langsung.
6. Interaksi sosial langsung (tatap muka) yang semakin luas membawa perubahan sosial, kemajuan sosial yang berdampak luas terhadap opini, kecerdasan, nalar dan wawasan manusia yang mengalaminya.

7. Interaksi sosial tak langsung melalui pengetahuan, pengenalan teknologi yang terbawa oleh satu pihak lain melalui berbagai media, berdampak luas pada tatanan sosial baik material dan non material.
8. Misalnya pakaian, peralatan, berbagai jenis produk makanan dan perangkat kasar yang lain, tidak hanya dimanfaatkan oleh orang tertentu, melainkan telah memasuki kehidupan segala lapisan masyarakat secara local, regional bahkan global. Dampak non material, misalnya adanya pergeseran nilai dan norma yang diadopsi dari negara lain melalui media elektronik maupun cetak.
9. Tentu hal-hal yang negatif layak diantisipasi supaya tidak merusak kepribadian/jatidiri budaya bangsa. Ini artinya sosiologi sebagai studi ilmiah tentang kehidupan sosial umat manusia harus mengembangkan kemampuan perspektif global dalam menyimak masalah-masalah global, yang mengancam kehidupan umat manusia, serta mencari metode pemecahannya.

G. Perspektif Global Dari Visi Antropologi

1. Antropologi budaya – Ilmu Budaya – merupakan studi tentang manusia dan kebudayaannya. (Kuncaningrat 1990)
2. EA Hoebel (1982) - Antropologi sebagai studi tentang manusia dengan pekerjaannya lebih menitik beratkan kepada kebudayaan sebagai hasil pengembangan akal pikiran manusia.
3. Konsep kerja yang dikemukakan Hoebel juga lebih berkonotasi budaya daripada hasil gerak tangan dan otot semata-mata. Di sinilah kedudukan utama Antropologi, khususnya Antropologi Budaya sebagai Ilmu Sosial.
4. Sudut pandang Antropologi terhadap perspektif global, terarah pada keberadaan dan perkembangan budaya dengan kebudayaan dalam konteks global. Namu demikian sorotan dan kajiannya, tidak terlepas mulai dari tingkat local, regional, nasional, internasional sampai ke tingkat global yang sedang mengarus ini.
5. Hakikatnya, perkembangan aspek kehidupan apapun yang mengarus mulai dari tingkat local sampai global, dasarnya terletak

pada budaya dengan kebudayaan yang menjadi milik otentik umat manusia

6. Kemampuan manusia mengubah tatanan kehidupannya sampai mengglobal adalah kelebihan manusia di banding dengan makhluk lainnya.

Contoh :

Bangunan - dari gubuk reot sampai pencakar langit yang kokoh

Jalan - dari jalan setapak, jalan desa sampai jalan tol dan Jembatan layang

Kendaraan - mulai dari di tarik manusia, hewan sampai kendaraan ruang angkasa

Pakaian - mulai dari kulit kayu sampai wool dan serat Sintetis

Alat tulis - mulai dari arang, bulu angsa sampai bolpoint, Computer, faximile, dan internet.

Semua contoh itu adalah hasil pengembangan akal pikiran manusia atau hasil pengembangan budaya sebagai perkembangan kebudayaan.

7. Oleh karena itu proses dan arus global dalam kehidupan, sesungguhnya adalah proses global kemampuan budaya atau proses kebudayaan, termasuk di dalamnya perkembangan IPTEK (kesatuan ilmu pengetahuan dan teknologi)
8. Sudut pandang antropologi terhadap perspektif global, berarti mengamati, menghayati dan memprediksi perkembangan kebudayaan secara menyeluruh yang aspek serta unsure-unsurnya itu berkaitan satu sama lain terintegrasi dalam kehidupan manusia.
9. Secara perspektif meningkatnya pendapatan masyarakat (ekonomi) terkait dengan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan dirinya menggunakan peralatan mengolah sumber daya (budaya).
10. Pendidikan tidak dapat dilepaskan dari interaksi sosial yang dilakukan oleh anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan.
11. Perkembangan budaya (daya pikir) dengan kebudayaan (hasil

daya pikir) sebagai satu kesatuan, berjalan menembus waktu (hari kemarin, hari ini dan esok mencapai tatanan global) terlebih setelah majunya media elektronik (radio, telepon, TV, faximile, internet) yang menurut “Marshall Mc Cluhan” 1974 menyebabkan terjadinya global village, dusun global yang mencerminkan tertembusnya batas-batas lokal dan regional membentuk tatanan kehidupan mendunia (global). Peristiwa-peristiwa tingkat dunia dalam bidang olah raga, pertemuan politik ataupun bencana alam di bagian dunia ini dapat kita ikuti melalui media elektronik tersebut. Akibatnya peristiwa dunia seperti itu sudah menjadi pengetahuan sehari-hari.

12. Tentu semua peristiwa itu dapat berdampak positif dan negatif, sehingga pandai- pandailah kita menyaringnya, supaya membawa manfaat dalam kehidupan selanjutnya.



BAB
3

TUJUAN DAN DIMENSI PERSPEKTIF GLOBAL

Sebagaimana telah diuraikan bahwa perspektif global merupakan suatu cara pandang terhadap berbagai masalah kehidupan dunia yang semakin lama dirasakan semakin sempit. Hal ini disebabkan oleh kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam teknologi komunikasi, sehingga dunia menjadi semakin kecil. Suatu peristiwa yang terjadi di suatu belahan dunia akan dengan cepat diketahui dan bahkan mempengaruhi belahan dunia lainnya.

A. Tujuan Perspektif Global

Para mahasiswa, kini saatnya kita untuk membuka mata, agar tidak tertuju pada masalah yang sempit saja, masalah lokal saja. Tempat yang kita diami ini merupakan bagian dari dunia. Oleh karena itu, kita harus memahami dunia ini. Dengan demikian maka tujuan dari diberikannya perspektif global (Marryfield, 1997) adalah:

1. mendorong mahasiswa untuk mempelajari lebih banyak tentang materi dan masalah yang berkaitan dengan masalah global;
2. mendorong para guru untuk mempelajari masalah yang berkaitan dengan masalah lintas budaya; dan
3. mengembangkan dan memahami makna perspektif global baik dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam pengembangan profesinya.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka peran Anda sebagai guru adalah:

1. memberikan bekal pengetahuan kepada siswa tentang pentingnya pengetahuan global dalam memahami masalah-masalah dunia;
2. meningkatkan kesadaran dan wawasan anak didik sebagai landasan dalam melakukan tindakan yang berdampak global; dan
3. memberikan contoh dan teladan dalam aktivitas sehari-hari, yang mempunyai pengaruh terhadap masalah global.

Perspektif global bertitik tolak dari masalah hidup sehari-hari, misalnya antara lain masalah kelaparan, pengangguran, pestisida, dan pengungsi. Semua ini memiliki dampak yang besar terhadap masalah global. Kita menyadari bahwa ilmu pengetahuan tidak dapat dibatasi pada masalah lokal atau nasional saja. Kita hidup dalam masyarakat informasi, dimana teknologi komunikasi dapat menjangkau dan mengakses secara global. Oleh karena itu, masalah tersebut akan dengan cepat memberikan dampak secara global. Dalam kaitannya dengan globalisasi ini, Makaminan Makagiarsar (Mimbar. 1990) mengutip sajaknya Mahatma Gandhi seperti berikut:

Biarkan jendela dan pintu rumahku tetap terbuka lebar
sehingga semua angin dari utara dan selatan dari
timur dan barat
dapat meniup ke rumahku
tetapi jangan sampai meruntuhkan fundamen
rumahku

Sajak tersebut menunjukkan kepada kita tentang adanya keterbukaan terhadap berbagai pembaruan, tetapi masih mengandung unsur seleksi "jangan sampai meruntuhkan fundamen rumahku".

Sebagaimana sudah dikemukakan bahwa kita memang harus terbuka, tetapi kita juga dapat menyeleksi apakah pengaruh dan arus dari luar itu dapat kita terima sesuai dengan nilai budaya kita. Sebaliknya nilai budaya kita yang menghambat proses globalisasi harus kita tinggalkan.

B. Dimensi Dalam Era Globalisasi

Dalam kaitannya dengan budaya dalam era globalisasi ini, Makagiansar (Mimbar, 1990) mengajukan empat dimensi, yaitu:

1. Afirmasi atau penegasan dari dimensi budaya dalam proses pembangunan- an bangsa dan masyarakat. Pembangunan akan hampa jika tidak diilhami oleh kebudayaan bangsanya. Nilai budaya suatu bangsa menjadi landasan bagi pembangunan suatu negara, serta merupakan alat seleksi bagi pengaruh luar yang sudah tak terkendali lagi.
2. Mereafirmasi dan mengembangkan identitas budaya dan setiap kelompok manusia berhak diakui identitas budayanya.
3. Partisipasi, bahwa dalam pengembangan suatu bangsa dan negara partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan. Partisipasi rakyat ini bukan hanya dari sekelompok atau beberapa kelompok masyarakat saja, akan tetapi dari seluruh masyarakat bangsa ini.
4. Memajukan kerja sama budaya antar bangsa. Ini dimaksudkan agar adanya saling mengisi, saling mengilhami sehingga adanya kemajuan dan peningkatan antar budaya bangsa.

Saat ini tidak ada suatu bangsa pun yang statis dan homogen. Setiap bangsa berkembang karena adanya interaksi dengan bangsa lain. Dengan demikian maka sistem nilai budaya dan nilai lainnya akan saling mempengaruhi satu sama lain.

Berdasarkan hal tersebut maka sistem pembelajaran interdisiplin ilmu sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi globalisasi yang demikian cepat tersebut. IPS merupakan bidang ilmu antardisiplin, sehingga melalui IPS perspektif global dapat ditumbuh kembangkan.

Marilah kita melihat satu per satu dari disiplin IPS ini walaupun dalam pembahasannya akan selalu terkait dengan disiplin ilmu lainnya baik dalam rumpun IPS maupun di luar IPS. Ini disebabkan oleh suatu masalah tidak dapat ditinjau dari satu disiplin ilmu saja. Selain itu masalah global berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan

dan bidang ilmu. Berikut ini akan diuraikan contoh bidang IPS yang berkaitan dengan masalah globalisasi.

1. Ekonomi

Regionalisasi dalam bidang ekonomi merupakan awal dari proses globalisasi. ASEAN sebagai suatu kerja sama negara-negara Asia Tenggara menyadari pentingnya suatu kerja sama dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu, timbullah berbagai kesepakatan antarnegara ASEAN untuk membentuk lembaga ekonomi regional. Munculnya berbagai lembaga perekonomian antara bangsa yang menunjukkan bahwa suatu negara tidak dapat lagi sendirian dalam hidup dan membangun bangsanya. Misalnya, Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Asia Pacific Economic Corporation (APEC), AFTA dan sebagainya.

Saat ini, kita merasakan bahwa krisis moneter yang melanda negeri kita ini, dirasakan pula oleh negara lain di hampir seluruh negara Asia Tenggara dan Asia Timur termasuk Jepang dan Korea Selatan. Di belahan Eropa, Rusia juga mengalami krisis serupa. Perubahan kurs mata uang di satu negara akan mempengaruhi negara lainnya. Sehingga akan merubah arus ekspor dan impor.

Dalam era globalisasi adanya keterbukaan dalam sistem perdagangan yang dikenal dengan sistem perdagangan bebas. Untuk ini persaingan antara negara satu dengan yang lainnya akan sangat ketat. Untuk itu maka kita harus meningkatkan kualitas semua mata dagangan kita tanpa kecuali.

Keterkaitan dan ketergantungan antara negara semakin besar. Faktor inilah yang mendorong kerja sama antara negara. Susanto (1997) mencontohkan bahwa negara Asia Timur sangat membutuhkan pasar di negara maju Eropa dan Amerika. Begitu pula halnya dengan negara berkembang memiliki ketergantungan ekonomi yang besar terhadap negara maju, baik sebagai konsumen maupun sebagai produsen.

Fenomena seperti ini menunjukkan bahwa kerja sama ekonomi antara negara semakin diperlukan baik secara bilateral, maupun multilateral. Kerja sama seperti ini harus saling menguntungkan kedua belah pihak, baik sebagai produsen maupun konsumen. Suatu

negara yang akan memasuki era globalisasi mau tidak mau harus berperan dalam kerja sama ekonomi. Ia harus berperan dalam perdagangan bebas dan pasar bebas.

2. Geografi

Era pengkotak-kotakan dunia dari sudut pandang geopolitik mulai luntur, dan tergantikan oleh regionalisme ekonomi yang merupakan cikal-bakal dan merupakan proses antara menuju masyarakat global.

Beberapa perubahan terjadi di beberapa bagian dunia, misalnya robohnya Tembok Berlin, terpecahnya Uni Soviet, Yugoslavia, dan Cekoslovakia membawa pengaruh terhadap perubahan dunia lainnya. Perubahan seperti ini tanpa direncanakan secara matang, akan tetapi terjadi secara spontan karena adanya pengaruh dari sistem ekonomi global.

Perkembangan ekonomi, politik dan budaya saat ini tidak lagi mengenal batas geografis. Ini berarti bahwa tidak ada kekuatan dari pemegang otonomi daerah, negara, bahkan benua untuk membendung globalisasi.

Hubungan antara negara yang satu dengan lainnya tidak terbatas oleh batas wilayah geografis, batas negara, atau batas administrasi. Oleh karena itu, globalisasi merupakan penduniaan tanpa tapal batas.

Gejala geografi yang paling dirasakan oleh pengaruh musim, seperti El- Nino, La-Nina, isu tentang lingkungan, transportasi, kependudukan, dan masalah pengungsi.

Pada bagian awal modul ini telah dibicarakan tentang bagaimana pengaruh kebakaran hutan terhadap negara-negara tetangga di wilayah ASEAN. Dengan demikian, maka kebakaran hutan bukan lagi menjadi masalah negara yang bersangkutan akan tetapi menjadi masalah dunia. Akibat buruk dari kebakaran hutan bukan saja asap yang mengganggu kesehatan manusia, mengganggu penerbangan, akan tetapi memberikan andil terhadap kerusakan ozon. Apabila ozon rusak atau bolong, maka seluruh dunia, seluruh umat manusia akan merasakan akibatnya. Fungsi ozon adalah menyaring sinar ultra violet sinar matahari,

apabila sinar ultra violet ini tidak tersaring maka kehidupan di dunia akan hancur.

Hal lain yang berkaitan dengan lingkungan ini, misalnya pembuang limbah beracun, dan limbah nuklir. ini juga akan berakibat terganggunya ekosistem kita. Limbah tersebut akan merambah ke mana-mana, ke berbagai negara sehingga akan mengakibatkan terganggunya kesehatan umat manusia.

Uraian tersebut adalah beberapa contoh saja tentang tinjauan geografis yang berkaitan dengan masalah global.

Hal lain yang berkaitan dengan kekayaan alam juga berkaitan dengan masalah global. kekayaan ikan di laut, apakah kita dapat membatasi gerakan ikan di perairan kita agar tidak keluar dari perairan kita? Apakah ikan itu milik kita atau milik dunia? Usaha apa yang harus kita lakukan agar ikan di perairan kita tetap milik kita. Kita harus memahami karakteristik ikan; kapan musim bertelur, di mana posisi berkumpulnya plankton sebagai makan ikan, pada musim apa ikan berkumpul di arena yang mana. Ini masalah global yang berkaitan dengan perairan di seluruh dunia. Kita tidak dapat mencegah ikan untuk pergi keluar perairan kita. Oleh karena itu, kita harus mengetahui pengetahuan tentang ikan secara global.

Para mahasiswa sekalian, itulah tinjauan dari bidang geografi tentang masalah yang kita hadapi sehubungan dengan globalisasi. Walaupun kita penduduk salah satu negara, namun kita tidak dapat hanya berpikir dan bertindak hanya untuk masalah lokal, tetapi juga masalah global.

3. PPKN (Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan)

PPKN merupakan bidang studi atau mata pelajaran yang terdapat pada kurikulum sekolah dari mulai SD sampai SMU. PPKN ini pada dasarnya bermuatan materi Pancasila, dan kewarganegaraan, yang melandasi kehidupan bernegara. Oleh karena itu, dalam pembahasannya akan berkaitan antara lain dengan ilmu politik, hukum, kenegaraan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Ini erat sekali kaitannya dengan masalah global karena masalah- masalah yang berkaitan dengan politik dan kenegaraan ini adalah universal

seperti hak asasi manusia, demokrasi, keadilan dan sebagainya tak terlepas dari masalah global.

Negara merupakan bagian penting dari suatu jalinan internasional, oleh karena itu, peran negara dalam globalisasi sangat besar. Ini disebabkan oleh kemajuan teknologi, sehingga suatu negara terkomunikasikan melalui berbagai media seperti satelit, internet, televisi yang mampu menghubungkan suatu tempat dengan tempat lainnya dengan melewati batas-batas negara.

Kita dapat mengakses informasi ke berbagai sumber yang ada di negara lain secara langsung, misalnya melalui internet untuk mengetahui koleksi buku-buku di perpustakaan suatu negara, atau untuk mengetahui program studi yang dibuka di universitas tertentu. Kita dapat melihat suatu kejadian di belahan dunia tertentu melalui berita CNN di televisi, kita dapat menghubungi saudara yang menjadi TKI di suatu negara dengan menggunakan telepon jarak jauh. Komunikasi seperti ini membuktikan bahwa hubungan-hubungan seperti itu sudah melewati batas negara.

Mobilitas manusia dari suatu negara ke negara lainnya juga dapat dilakukan dengan mudah, teknologi perhubungan dengan munculnya berbagai pesawat modern dapat menghubungkan manusia suatu negara dengan negara lainnya dengan sangat cepat. Banyak warga negara suatu negara yang belajar di luar negerinya. Ini membuktikan bahwa globalisasi mampu memberikan akses yang cepat dan tinggi bagi orang yang memiliki kemampuan baik kemampuan intelektual maupun kemampuan materiil.

Dengan pengaruh globalisasi yang pesat, apakah suatu negara masih mempunyai peran dalam membentuk nilai dan norma dalam masyarakatnya?

Dalam kaitannya dengan ini, Ohmae (Susanto, 1998) dalam bukunya "The end of the nation state" menyatakan bahwa peran negara makin lama makin berkurang dan hilang di era globalisasi ini. Ini disebabkan oleh timbulnya arus sirkulasi yang dia sebut 4Is (baca: empat I es) yaitu Investment, Industry, Information Technology, dan Individual Consumer.

Dalam investasi kita melihat bahwa arus modal dapat mengalir melewati batas-batas negara. Seorang investor dapat menanamkan modalnya di suatu negara tertentu. Dalam dunia Industri, perusahaan multinasional mengadakan ekspansi ke berbagai tempat di negara mana saja. Masih ingatkah Anda bahwa industri pesawat terbang boeing memiliki 6000 perusahaan yang menyebar di negara-negara di seluruh dunia. Begitu pula dengan individual consumers bahwa mereka dapat saja pergi ke suatu negara hanya untuk berbelanja, dengan melewati batas negara.

Keadaan seperti diuraikan tadi merupakan permasalahan yang kita hadapi, yang sebenarnya sudah berlangsung cukup lama dan akan mempengaruhi terhadap peran suatu negara. Keadaan tersebut dalam era globalisasi ini jelas mengurangi peran negara. Namun demikian seperti dikatakan oleh Ohmae apakah peran negara akan benar-benar hilang? Tentunya ini memerlukan pengkajian yang sangat cermat. Yang sudah pasti adalah berubahnya peran negara sesuai dengan derasnya arus globalisasi.

4. Sejarah Dan Budaya

Para mahasiswa, Anda sebagai guru yang mendidik anak didik tentunya harus menyadari betul tentang kondisi seperti itu. Kita tidak boleh terpukau, dan diam sehingga tertinggal oleh arus globalisasi. Akan tetapi, juga jangan terbawa arus, sehingga lupa dan meninggalkan nilai budaya kita sendiri.

Dalam bidang sejarah sesungguhnya globalisasi sudah terjadi cukup lama. Kita sudah mengetahui tentang perjalanan panjang Columbus, untuk mengelilingi dunia. Pengaruhnya adanya perlombaan di negara-negara Eropa untuk datang ke Asia Tenggara dalam rangka mencari rempah-rempah.

Dalam kaitannya dengan budaya, globalisasi ini lebih dahsyat lagi pengaruhnya karena menyentuh semua orang dari semua lapisan secara langsung. Pengaruh film, misalnya memberikan pengaruh terhadap perilaku manusia dalam berpakaian, bertindak, berbicara dan sebagainya. Ini yang paling dikuatirkan karena tidak semua orang mempunyai ketahanan yang kokoh untuk menyaring pengaruh negatif dari budaya ini.

C. Model Kerjasama Dalam Globalisasi

Kuang-Sheng-Siao (Susanto, 1997) mengemukakan model-model kerja sama ekonomi seperti berikut:

1. Zona perdagangan bebas, daerah di mana penurunan tarif dan berbagai hambatan diturunkan secara bersama supaya arus komoditas barang dan jasa dapat bergerak bebas.
2. Persetujuan tarif; pembentukan sebuah sistem tarif yang sama dipakai untuk mengeliminasi kompetensi intra regional dan mendukung usaha kerja sama dalam menghadapi tantangan.
3. Pasar bersama; selain arus bebas dari komoditas dan jasa, bahan baku produk, tenaga kerja dan modal dapat ditransfer secara bebas.
4. Aliansi ekonomi; harmonisasi total di dalam kesejahteraan sosial, transportasi, moneter, dan kebijakan ekonomi nasional lainnya.
5. Integrasi ekonomi secara penuh. Menurut Susanto, kerja sama ekonomi antarnegara terutama di tingkat regional umumnya dari bidang perdagangan, kemudian memasuki sumber daya dan kebijakan ekonomi regional. Walaupun dalam pelaksanaannya kerja sama seperti ini tidak selalu berjalan mulus, karena kondisi dan kepentingan nasional negara masing-masing yang berbeda-beda.

Selain ASEAN sebagai salah satu bentuk kerja sama negara-negara Asia Tenggara, terdapat bentuk-bentuk kerja sama lainnya dalam bidang ekonomi antara lain AFTA dan APEC di kawasan Asia, NAFTA di Amerika bagian utara, dan EEC di Eropa. Selain kerja sama regional terdapat pula kerja sama dunia seperti "*World Trade Organization*" (WTO). Bentuk kerja sama ini masih banyak namun dalam modul ini akan dibahas model kerja sama yang menyangkut negara ASEAN. Ini tidak berarti bahwa model kerja sama lainnya tidak penting, namun sebagai contoh maka dua model kerja sama ekonomi tersebut cukup memberikan wawasan kepada mahasiswa program Penyetaraan D-II PGSD.

1. Asean Free Trade Areas (AFTA)

AFTA adalah salah satu perwujudan kerja sama ekonomi regional, Asia Tenggara dalam rangka perdagangan bebas. Pembentukan AFTA ini dirasakan sangat penting oleh negara-negara ASEAN karena dianggap dapat menguntungkan. Selain itu, AFTA merupakan perwujudan kerja sama ASEAN dalam bidang ekonomi khususnya perdagangan yaitu sebagai *Asean Economic Cooperation* (AEC), atau kerja sama Ekonomi Asean.

Selanjutnya Susanto (1997) menjelaskan bahwa untuk mempromosikan kerja sama ASEAN ini digunakan tiga alat yaitu:

- a. Liberalisasi perdagangan yang telah dinegosiasikan untuk komoditi tertentu.
- b. Persetujuan industrial complementarity (penambahan industri) yang dinegosiasikan melalui inisiatif sektor swasta.
- c. Kesepakatan bersama proyek-proyek industri.

Untuk selanjutnya, Kerja sama Ekonomi ASEAN ini terus mencari arah dan berkembang misalnya membentuk kerja sama Intra ASEAN, dan mengembangkan kebijakan ekonomi untuk menghadapi mitra dagang dan ekonomi ASEAN.

2. Asian Pasific Economic Cooperation (APEC)

APEC merupakan kerja sama antarnegara Pasific termasuk Kanada dan Amerika. Oleh karena itu, Indonesia selain sebagai anggota AFTA juga sebagai anggota APEC. Masih segar dalam ingatan kita bahwa konferensi APEC dilaksanakan di Istana Bogor pada tahun 1995. Dan kita sebagai bangsa Indonesia merasa bangga atas prestasi tersebut.

Menurut Kuang-Sheng Siao (Susanto, 1998), APEC dicetuskan oleh East-Wast Center di Hawaii yang menginginkan kerja sama ekonomi negara- negara Pasifik. Amerika dan Jepang sangat mendukung gagasan ini, karena mereka sangat berkepentingan dan APEC dipandang sebagai penyeimbang kekuatan ekonomi antara Jepang, Barat dan Timur. APEC dibentuk pada tahun 1989 di Canberra Australia.

Pada mulanya Indonesia juga tidak terlalu antusias dengan dibentuknya APEC ini, karena dikuatirkan menjadi alat negara tertentu untuk menekan Indonesia untuk membuka pasar. Namun pada akhirnya Indonesia juga melihat adanya peluang bahwa suksesnya perwujudan APEC dilihat dari tiga sisi (Susanto, 1998).

- a. Pendekatan yang pragmatis dalam penerapan area-area substansial
- b. yang terdapat di dalamnya untuk kepentingan bersama.
- c. Pendekatan yang sensitif terhadap model-model pelaksanaan APEC.
- d. Konsultasi dan lobi yang ulet oleh Australia dalam pengembangan konsep APEC.

Selanjutnya Susanto menjelaskan bahwa pada dasarnya APEC bukan area perdagangan bebas ataupun blok perdagangan. APEC harus dilihat sebagai peluang langkah kerja sama yang bersifat terbuka dan bebas di mana negara masing-masing menyiapkan rencana liberalisasi ekonomi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Selain itu, Luhulima, dan Pengestu (Susanto, 1998) menyatakan bahwa proses keputusan juga diambil melalui proses konsultasi dan konsensus. Jadi APEC hanya merupakan forum kerja sama terbuka dan bebas di antara negara-negara anggota. Jadi APEC tidak mempunyai kekuatan hukum.

Prinsip APEC menurut Susanto yang mengutip pendapat Luhulima adalah:

1. Tujuan APEC adalah untuk mempertahankan pertumbuhan dan pengembangan dalam regional untuk meningkatkan standar kehidupan dan pertumbuhan ekonomi dunia.
2. APEC seharusnya memperkuat sistem perdagangan multilateral dan menghindari pembentukan blok perdagangan regional.
3. APEC sebaiknya berkonsentrasi pada isu-isu ekonomi untuk meningkatkan kepentingan kerja sama dan mempromosikan interdependensi konstruktif dengan memperlancar arus barang, jasa, modal, dan teknologi.

Berdasarkan prinsip keterbukaan, ruang lingkup kerja APEC menjadi luas dan meliputi pertukaran informasi dan konsultasi mengenai kebijakan untuk mempertahankan pembangunan, promosi penyesuaian dan memperkecil disparitas ekonomi, serta memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi global dan pembangunan; promosi perdagangan regional, investasi, pengembangan sumber daya manusia dan transfer teknologi.

Pada Pertemuan Tingkat Tinggi di Bogor, sebagaimana dikemukakan Luhulima (Susanto, 1998) mengeluarkan Deklarasi Bogor tentang prinsip APEC seperti berikut:

1. Mengadopsi sebuah program komprehensif untuk merealisasikan perdagangan bebas dan terbuka di kawasan Asia Pasifik melalui adopsi cita-cita perdagangan dan investasi bebas terbuka di kawasan Asia Pasifik.
2. Mencapai program APEC di dalam liberalisasi perdagangan pada tahun 2000.
3. Menjalankan proses liberalisasi ke seluruh kawasan pada tahun 2000.

Kerja sama ekonomi antarnegara terutama dalam negara sekawasan merupakan langkah strategis dan progresif dalam proses mempersiapkan diri menjadi partisipan yang handal di era global. Melalui kerja sama seperti ini setiap negara belajar untuk membuka pasar dan meningkatkan sarana dan prasarananya. Pembukaan pasar ini diperlukan dengan menciptakan iklim investasi yang sehat serta didukung oleh penurunan tarif dan bea masuk untuk memudahkan masuknya barang, jasa, modal dan teknologi. Selain itu juga dibutuhkan kemantapan sistem legal yang didukung oleh instansi terkait, dalam mengimplementasikan semua kebijakan dan peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah.

Keberhasilan kerja sama ini diperlukan didukung oleh adanya persamaan visi dan tujuan, penciptaan sistem dan prosedur penunjang, serta kebijakan ekonomi yang mendukung perdagangan bebas. Dukungan dari negara yang sudah maju sangat diperlukan terutama untuk peningkatan kemampuan teknis dan manajerial, pembentukan sistem bersama tentang hukum, prosedur dan

administrasi perdagangan bebas, kerja sama antar pemerintah, serta dukungan pemerintah terhadap investor swasta.

D. Peran Negara Dalam Globalisasi

Dalam kaitannya dengan globalisasi ini, maka peran negara mengalami pergeseran yang semula memberikan perlindungan, dan mengatur, ke arah yang sifatnya membentuk sikap, kesadaran dan wawasan.

1. Membentuk Wawasan Kebangsaan (*nation character building*)

Ini penting karena akan memberikan landasan kuat terhadap bangsa dalam menghadapi gelombang globalisasi. Kebijakan pendidikan harus mulai diarahkan terhadap pendidikan global untuk memberikan pengetahuan yang luas tentang masalah-masalah global sehingga masyarakat tidak terpukau seperti disebutkan di atas. Ini disebabkan oleh negara tidak memungkinkan untuk melakukan sensor terhadap semua informasi. Masyarakat juga harus memiliki kemampuan untuk melakukan sensor sendiri. Oleh karena itu, pendidikan harus diarahkan untuk:

- a. Memperluas wawasan dan persepsi anak didik yang berkaitan dengan permasalahan global.
- b. Meningkatkan kesadaran anak didik kita, bahwa mereka bukan saja sebagai warga negara Indonesia tetapi juga warga dunia.
- c. Memberikan wawasan untuk mengkaji ulang nilai dan budaya yang ada, apakah masih dapat kita gunakan dan sesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini.

2. Dalam Kaitannya dengan Nilai Budaya

Anak didik perlu dibekali dengan pemahaman dan pengetahuan yang cukup agar mereka mampu menyeleksi budaya lain yang tidak sesuai atau budaya kita yang tidak cukup untuk mendukung proses globalisasi. Budaya seperti "biar lambat asal selamat", "mangan ora mangan kumpul" dan banyak lagi nilai dan budaya yang tidak sesuai lagi, ini akan menghambat kemajuan.

Dalam kaitannya dengan kebebasan mengeluarkan pendapat juga telah mulai adanya usulan untuk membatasi informasi yang diperkirakan akan merusak nilai budaya bangsa seperti gambar dan cerita yang berbau pornografis. Misalnya, di negara Asia lebih ketat lagi, di mana sudah adanya usaha (Singapura) untuk memblokir informasi yang akan merusak wawasan kebangsaan.

3. Memonitor Aktivitas Penggunaan Internet

Melalui pemberi jasa internet (internet providet) agar kalau ada yang mengambil informasi yang dinilai tidak "layak" dapat diberikan sanksi. Di Indonesia, sensor seperti ini sudah mulai dilakukan walaupun tidak seketat di Singapura.

Usaha sensor seperti ini bukan merupakan usaha untuk mempersempit akses ke internet untuk mencari informasi, akan tetapi berupa pencegahan terhadap masuknya informasi yang melanggar etika.

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat melihat manfaat dan kegunaan dari mempelajari perspektif global antara lain seperti berikut:

- a. Meningkatkan wawasan dan kesadaran para guru dan bahkan siswa bahwa kita bukan hanya penghuni dari satu "kampung", provinsi, negara, akan tetapi penduduk dari satu dunia yang mempunyai ketergantungan satu sama lain. Oleh karena itu, dalam bersikap dan bertindak harus mencerminkan sebagai warga negara.
- b. Menambah dan memperluas pengetahuan kita tentang dunia, sehingga kita dapat mengikuti perkembangan dunia dalam berbagai aspek, terutama dalam perkembangan IPTEK.
- c. Mengondisikan para mahasiswa untuk berpikir integral bukan general, sehingga suatu gejala atau masalah dapat ditanggulangi dari berbagai aspek.
- d. Melatih kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap perkembangan dunia dengan segala aspeknya.

Namun dalam pelaksanaannya nanti para guru akan dihadapkan kepada berbagai masalah. Masalah tersebut antara lain.

- a. Menurut kurikulum sekolah tahun 1994, dalam pelajaran IPS materinya belum sampai untuk membahas masalah dunia, akan tetapi masih terbatas kepada tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi. Untuk masalah negara Indonesia juga belum banyak dibahas. Ini tentu akan menyulitkan guru untuk membicarakan dunia dengan para siswa. Untuk mengatasinya para guru dapat memulainya dari hal yang ada di lingkungan siswa, misalnya masalah lingkungan, masalah kesehatan seperti AIDS, masalah penduduk dan sebagainya.
- b. Masalah global adalah masalah integral, yaitu suatu permasalahan dapat dilihat dari berbagai bidang ilmu. Sementara itu, dalam mata pelajaran IPS di SD masih menitikberatkan pada materi bidang studi misalnya sejarah dan geografi.
- c. Mata kuliah perspektif global masih sangat baru, oleh karena itu, para guru belum memiliki pengalaman yang cukup untuk mengajar materi yang berkaitan dengan masalah global di SD.
- d. Buku sumber untuk pelajaran yang bersifat global di SD masih sangat kurang. Oleh karena itu, diperlukan kreativitas yang tinggi dari guru untuk memunculkan masalah global dalam pengajaran IPS. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memperkaya diri dengan sumber lain di luar buku paket yang dianjurkan oleh Depdikbud.



BAB
4

DAMPAK MUNCULNYA GLOBALISASI BAGI MASYARAKAT DUNIA

Berdasarkan tinjauan sejarah, Indonesia sebenarnya telah lama mengalami proses globalisasi. Bagi bangsa Indonesia, globalisasi memiliki manfaat yang sangat besar baik dalam bidang politik (pemerintahan), sosial budaya, ekonomi, hukum dan bidang pertahanan keamanan. Dalam bidang politik (pemerintahan), dengan adanya globalisasi pemerintah dapat dengan mudah melakukan komunikasi dan koordinasi antardaerah. Dengan demikian, setiap kebijakan yang telah diambil dapat dengan segera sampai pada masyarakat. Demikian pula aspirasi masyarakat dapat dengan mudah diterima oleh pejabat pemerintahan. Pejabat negara yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan dapat segera diawasi, selanjutnya dapat dimintai pertanggungjawabannya di hadapan publik. Globalisasi juga dapat meningkatkan partisipasi rakyat terhadap pemerintahan terutama dalam hal pemilihan anggota parlemen, penempatan pejabat publik, yang sekaligus dapat mengontrol jalannya pemerintahan.

A. Dampak Globalisasi Terhadap Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

Sekarang ini kita sudah berada dalam era globalisasi, tentu saja kita tidak akan dapat melepaskan diri dari globalisasi ini. Sudah barang tentu globalisasi ini akan berdampak terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan bermasyarakat yaitu kehidupan yang ada dalam masyarakat dilihat dari pekerjaan seseorang (guru, pegawai, petani) maupun dilihat dari tempat tinggal yang berbeda (desa atau kota). Dalam kehidupan berbangsa tentu dilihat dari unsur yang paling kecil yaitu keluarga,

suku bangsa dan bangsa. Dan kehidupan bernegara yang meliputi aspek-aspek kenegaraan (infra struktur dan supra struktur).

1. Bidang Ekonomi

Pada bagian awal telah diungkapkan selintas bagaimana produk-produk negara lain memasuki pasar kita. Itu merupakan tanda yang menunjukkan terjadinya globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi ini sesungguhnya didukung oleh sebuah kekuatan yang luar biasa hebatnya, yaitu apa yang disebut liberalisme ekonomi, yang sering juga disebut kapitalisme pasar bebas. Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang mengatur proses produksi dan pendistribusian barang dan jasa. Kapitalisme ini mempunyai tiga ciri pokok, yaitu pertama, sebagian besar sarana produksi dan distribusi dimiliki oleh individu; kedua, barang dan jasa diperdagangkan di pasar bebas yang bersifat kompetitif; ke tiga, modal diinvestasikan ke dalam berbagai usaha untuk menghasilkan laba. Dalam perkembangannya sistem kapitalisme ini memberikan dua dampak antara lain:

a. Dampak Positif

- 1) Makin mudahnya memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa
- 2) Lebih mudah dalam meningkatkan hasil produksi
- 3) Lebih mudah dalam memasarkan hasil produksi ke kancah
- 4) Membuka lapangan kerja baru bagi yang memiliki keterampilan
- 5) Mempermudah proses pembangunan industri
- 6) Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional
- 7) Munculnya perusahaan multinasional dan transnasional
- 8) Munculnya berbagai lembaga ekonomi dunia seperti World Bank, IMF
- 9) (International Monetary Fund) , dan WTO.
- 10) Produksi global dapat ditingkatkan

b. Dampak Negatif

- 1) Munculnya persaingan yang tidak sehat
- 2) Menumbuhkan sikap konsumtif pada masyarakat

- 3) Pemilik modal kuat akan menguasai pemilik modal yang lemah
- 4) Munculnya kapitalisme dalam perdagangan
- 5) Meningkatkan resiko perdagangan gelap atau *illegal*
- 6) Membuka peluang terjadinya penumpukan kekayaan dan monopoli usaha dan kekuasaan ekonomi pada segelintir orang
- 7) Semakin melebarnya ketimpangan distribusi pendapatan antar negara- negara kaya dengan negara-negara miskin
- 8) Liberasisasi ekonomi global yang menyebabkan barang-barang import mendominasi dalam negeri, sehingga produk dalam negeri kurang berkembang.
- 9) Memperburuk neraca pembayaran karena masyarakat cenderung menyukai barang import sedangkan hasil ekspor dalam negeri kalah bersaing dengan perusahaan raksasa dunia.
- 10) Tidak stabilnya harga saham dan mudah bergejolaknya keadaan moneter dunia.

2. Bidang Sosial Budaya

Dalam bidang sosial dan budaya, dampak globalisasi antara lain adalah meningkatnya individualisme, perubahan pada pola kerja, terjadinya pergeseran nilai kehidupan dalam masyarakat. Saat ini di kalangan generasi mudabanyak yang seperti kehilangan jati dirinya. Mereka berlomba-lomba meniru gaya hidup ala barat yang tidak cocok jika diterapkan di Indonesia, seperti berganti-ganti pasangan, konsumtif dan hedonisme. Namun, di sisi lain globalisasi juga dapat mempercepat perubahan pola kehidupan bangsa. Misalnya melahirkan pranata-pranata atau lembaga-lembaga sosial baru seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi profesi dan pasar modal. Perkembangan pakaian, seni dan ilmu pengetahuan turut meramaikan kehidupan bermasyarakat.

a. Dampak Positif

- 1) Mempercepat perubahan pola pikir masyarakat
- 2) Melahirkan pranata-pranata atau lembaga-lembaga social yang baru

- 3) Perkembangan pakaian, seni, dan ilmu pengetahuan yang turut meramaikan kehidupan masyarakat
- 4) Menjamurnya produksi film dan musik dalam bentuk kepingan VCD/CD dan DVD
- 5) Memberikan nilai-nilai dan pola baru dalam masyarakat
- 6) Menumbuhkan budaya kerja keras
- 7) Makin beragamnya kebudayaan dunia
- 8) Timbulnya asimilasi dan akulturasi budaya

b. Dampak Negatif

- 1) Meningkatnya individualisme
- 2) Perubahan pada pola kerja
- 3) Pergeseran nilai kehidupan dalam masyarakat
- 4) Masyarakat yang cenderung meniru budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa
- 5) Dengan semakin merebaknya budaya asing yang masuk menyebabkan banyak masyarakat yang kehilangan jati diri bangsanya
- 6) Munculnya berbagai masalah social dan gerakan social
- 7) Semakin melebarnya ketimpangan atau kesenjangan social diantara Negara maju dan berkembang
- 8) Timbulnya disintegrasi / disorganisasi dalam masyarakat

3. Bidang Politik

Dalam bidang politik, dampak globalisasi antara lain adalah dengan perubahan sistem kepartaian yang dianut, sehingga memunculkan adanya partai baru-partai baru; kesadaran akan perlunya jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM), terjadinya perubahan sistem ketatanegaraan, pelaksanaan pemilihan umum untuk anggota-anggota parlemen, pemilihan Presiden dan Wapres, Pemilihan Gubernur dan Wagub serta pemilihan Bupati dan Wabup/ Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan secara langsung. Tetapi kita harus waspada karena adanya perubahan tersebut

akan menimbulkan pertentangan dalam masyarakat, karena tidak semuanya masyarakat kita berpendidikan. Selain itu perubahan yang terjadi tidak selalu cocok jika diterapkan di Indonesia. Hal ini akan bisa mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa kita.

a. Dampak Positif

- 1) Terjadinya perubahan sistem ketatanegaraan
- 2) Dengan perubahan sistem kepartaian yang dianut, sehingga memunculkan adanya partai-partai baru
- 3) Kesadaran akan perlunya jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia
- 4) Gerakan demokrasi yang semakin dianut tinggi oleh negara-negara di dunia
- 5) Pelaksanaan pemilu untuk memilih anggota parlemen dan pemerintah yang dilakukan secara langsung
- 6) Mempererat hubungan persahabatan antarnegara
- 7) Membuat negara-negara melaksanakan kerja sama ekstradisi untuk menjaga keamanan masing-masing.

b. Dampak Negatif

- 1) Munculnya paham baru dalam sistem pemerintahan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa
- 2) Negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan
- 3) Dengan semakin majunya teknologi, negara lain dapat melakukan spionase terhadap yang lain dengan menebarkan virus untuk merusak database dan mengambil file-file rahasia Negara
- 4) Perang dengan menggunakan rudal dan nuklir yang sangat membahayakan umat manusia
- 5) Sulitnya negara mengatur keadaan dan eksistensi di daerah perbatasan
- 6) Kejahatan dan terorisme berskala internasional yang mengancam berbagai bangsa.

Dalam rangka mengantisipasi pengaruh globalisasi diperlukan sikap dan perilaku yang positif baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu diperlukan adanya kualitas sumber daya manusia yang memadai, baik dari segi mental spiritual maupun aspek intelektual. Hal ini sangat penting agar masyarakat mampu menerima, mengadopsi, pengaruh globalisasi tersebut secara positif. Sebaliknya, masyarakat juga harus siap mampu menangkal pengaruh yang negatif. Sikap dan perilaku yang dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia antara lain :

1. Menumbuh kembangkan nilai-nilai moral dan adat istiadat serta nilai agama yang baik bagi masyarakat,
2. Membentuk dan mengembangkan lembaga swadaya guna memperkokoh kepribadian masyarakat,
3. Memperluas lapangan kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran yang pada gilirannya dapat mengeliminir aktivitas masyarakat yang tidak bermanfaat,
4. Menumbuhkembangkan kesetiakawanan sosial, sehingga setiap anggota masyarakat merasa memiliki peran dan fungsi di dalam kelompok,
5. Meningkatkan kerjasama antar warga.

B. Pengaruh Globalisasi Terhadap Kehidupan Masyarakat Indonesia

1. Ekonomi

Untuk menghadapi globalisasi ekonomi, dapat dilakukan dengan cara menjalin kerja sama ekonomi, baik secara bilateral, regional, dan internasional. Sebab dalam era globalisasi ditandai dengan sistem perdagangan dan pasar bebas, sehingga kerja sama ekonomi harus diikuti oleh setiap negara yang ingin maju dan terlibat dalam tatanan baru ekonomi dunia.

- a. Contoh kerjasama ekonomi negara indonesia dan negara asing:
 - 1) Kerjasama Indonesia dengan Malaysia dalam bidang pertanian

- 2) Kerjasama indoensia dengan thailand kerja sama di segala bidang, termasuk kerja sama keamanan dan penanggulangan bajak laut di perairan Selat Malaka serta mengungkapkan saling dukung sebagai dewan keamanan tidak tetap PBB.
 - 3) Kerjasama indonesia dengan filipina. Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Filipina mencapai kesepakatan kerjasama empat agenda yang menonjol, yakni masalah keamanan, politik, ekonomi, serta pendidikan dan latihan.
- b. Contoh globalisasi ekonomi:
- 1) Adanya ekspor impor
 - 2) Masuknya produk luar dengan mudah didapatkan
 - 3) Terciptanya mesin-mesin canggih untuk menunjang proses produksi

2. Politik

Untuk menghadapi globalisasi politik, dapat dilakukan dengan cara menjalin kerja sama politik baik secara bilateral, regional, dan internasional seperti OKI, ASEAN, PBB dan GNB. Sebab melalui kerja sama politik tersebut, dapat melahirkan keputusan-keputusan politik yang menjadi dasar terwujudnya perjanjian perdagangan bebas dan pasar bebas.

3. Budaya

Untuk menghadapi globalisasi budaya, dapat dilakukan dengan menyeleksi pengaruh budaya luar yang masuk ke Indonesia. Bagi unsur budaya yang sesuai dengan budaya asli dipakai sedangkan yang bertentangan dengan budaya asli Indonesia dihilangkan. Namun dapat kita lihat bahwa masyarakat indoensia merasa bangga dan nyaman dengan masuknya budaya luar. Contohnya tidak sedikit masyarakat indonesia sekarang lebih suka pergi ke tempat dunia gemerlap malam atau yang sering anak muda katakan adalah clubbing, tempat dimana anak muda meluapkan berbagai rasa yang ada, meluapkan rasa penat mereka. Banyak faktor yang membuat anak muda untuk pergi ke tempat tersbut di karenakan karena adanya rasa gengsi, ingin menjadi anak gaul dan tentunya anak muda yang tidak ingin kalah karena adanya globalisasi atau budaya yang

masuk ke negara kita. Terkadang saya sendiri menyadari sedikit dari anak muda yang sudah lupa untuk melestarikan budaya kita dengan pergi ke sanggar tari, belajar melestarikan tari tarian budaya kita, pergi ke museum-museum, dan belajar berbagai alat musik yang ada di Indonesia.

Bukan hanya pergi ke tempat dunia gemerlap malam, tapi juga bisa kita lihat anak muda sekarang memakai pakaian yang tidak sepatasnya, memakai pakaian yang tidak pada tempatnya, memakai pakaian yang terbuka dimana mengikuti trend dan fashion budaya luar, anak muda sekarang lebih suka memakai pakaian terbuka dibandingkan dengan memakai pakaian adat istiadat masing masing provinsi, bahkan malu untuk memakai batik dan kebaya, karena mereka pikir memakai batik dan kebaya adalah pakaian zaman dahulu. Sedikit anak muda yang melestarikan tarian adat dan budaya yang negara Indonesia miliki karena lebih memilih untuk pergi ke club di bandingkan dengan pergi ke sanggar tari

4. Transportasi

Kemajuan transportasi baik darat, laut maupun udara menyebabkan pergerakan (mobilitas) manusia dari satu negara ke negara lain semakin cepat. Sekarang masyarakat Indonesia tidak perlu memikirkan bagaimana caranya untuk berpergian ke suatu negara yang mereka inginkan, begitupun masyarakat luar negeri yang ingin berpergian ke suatu negara. Arus globalisasi tidak mungkin bisa dibendung karena berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi.

5. Teknologi Komunikasi

Sekarang masyarakat Indonesia tidak perlu lagi memusingkan bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang lain yang berada di luar negara Indonesia, karena sekarang jarak bukanlah suatu alasan untuk saling berkomunikasi, apa lagi untuk pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh hanya dengan melalui *videocall* atau aplikasi yang sudah ada dengan mudah mendapatkan kabar dan berita dari setiap pasangan. Di era globalisasi ini sekarang masyarakat di mudahkan dengan adanya perkembangan komunikasi melalui jaringan internet, dengan jaringan internet kita dapat mengakses seluruh informasi

yang ada baik dalam negeri maupun luar negeri, contoh media sosial yang sekarang marak digunakan kalangan masyarakat Indonesia, contohnya :

a. Instagram

Tidak asing bukan dengan gambar media sosial yang saya tampilkan? ini adalah insatgram, dimana kita dapat melihat semua foto foto dari seluruh masyarakat indonesia bahkan teman kita yang berada jauh di luar negeri.

b. Facebook

Seluruh warga dunia pasti sudah mengenal dengan media sosial yang satu ini, namanya adalah facebook dari anak sd bahkan sampai orang tua semua memakai media sosial yang satu ini, media sosial yang satu ini memiliki banyak kelebihan yang di berikannya, dari kita dapat mencari teman lama, menambah teman, bahkan mencari pasangan hidup, semua dapat di akses di media sosial yang satu ini, dengan media sosial yang satu ini kita juga dapat melakukan videocall atau panggilan suara, jelas bukan bahwa pengaruh globalisasi terdapat komunikasi membawa dampak yang positif.

C. Penyebab Terjadinya Globalisasi

Munculnya era globalisasi tidak terlepas dari upaya manusia untuk melakukan pembaruan di berbagai bidang kehidupan guna meningkatkan kesejahteraan bersama. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya globalisasi. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan menjadi faktor ekstern dan intern antara lain:

1. Faktor Ekstern

Faktor Ekstern munculnya globalisasi berasal dari luar negeri dan perkembangan dunia. Faktor tersebut sebagai berikut:

- a. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
- b. Penemuan sarana komunikasi yang semakin canggih.
- c. Adnya kesepakatan internasional tentang pasar bebas.

- d. Modernisasi atau pembaruan di berbagai bidang yang dilakukan negara-negara di dunia mempengaruhi negara lain untuk mengadopsi atau meniru hal yang sama.
- e. Keberhasilan perjuangan prodemokrasi di beberapa negara di dunia sedikit banyak memberi inspirasi bagi munculnya tuntutan transparansi dan globalisasi di sebuah negara.
- f. Meningkatnya peran dan fungsi lembaga-lembaga internasional.
- g. Perkembangan HAM.

2. Faktor Intern

Faktor intern munculnya globalisasi berasal dalam negeri. Berikut faktor-faktor intern tersebut.

- a. Ketergantungan sebuah negara terhadap negara-negara lain di dunia.
- b. Kebebasan pers.
- c. Berkembangnya transparansi dan demokrasi pemerintahan.
- d. Munculnya berbagai lembaga politik dan lembaga swadaya masyarakat.
- e. Berkembangnya cara berpikir dan semakin majunya pendidikan masyarakat.

D. Ciri-Ciri Globalisasi

Era globalisasi menuntut adanya keterbukaan informasi atau yang dikenal dengan istilah *cyber space*, sehingga memungkinkan komunikasi bersifat masal, menyentuh hampir di semua bidang kehidupan masyarakat, termasuk aspek kehidupan manusia secara personal. Secara rinci, ciri yang menandakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia, sebagai berikut:

- 1. Hilir mudiknya transportasi barang antar-negara menunjukkan peningkatan, keterkaitan dan ketergantungan antar-manusia (bangsa) di seluruh dunia.
- 2. Perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Globalisasi dewasa ini menjadi pusat perhatian (mainstream) banyak

pihak, karena proses interaksi antarmanusia atau masyarakat menjadi semakin tinggi akibat dari adanya kemajuan teknologi komunikasi, informasi dan transportasi, (seperti telepon genggam, televisi satelit, internet, pariwisata, imigran, tenaga kerja, pertukaran pelajar/mahasiswa memungkinkan manusia merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda). Perkembangan ini menjebabkan manusia semakin cepat mengetahui apa yang terjadi di sisi dunia yang letaknya berjauhan serta semakin cepat mencapai wilayah (daerah) yang letaknya berkilo-kilo meter jauhnya. Dunia menjadi sebuah desa global (global village), karena antar bagian dunia, baik pelosok terpencil maupun perkotaan, sudah saling berhubungan dan berkaitan.

3. Pasar dan kegiatan produksi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi internasional semacam *world trade organization* (WTO).
4. Peningkatan interaksi budaya melalui perkembangan media massa (televisi, film, musik, transmisi berita dan olahraga internasional). Saat ini kita dapat mengonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang beraneka ragam budaya berasal dari berbagai belahan dunia, misalnya dalam bidang fashion, literature, olahraga, seni, makanan, dan sebagainya.
5. Meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi.
6. Penyebaran prinsip multi-kebudayaan, dan kemudahan akses bagi individu terhadap kebudayaan lain di luar kebudayaannya.
7. Bertambah banyaknya event-event berskala global, seperti pertandingan olah raga level piala dunia, putri kecantikan dunia (miss universe), olimpiade matematika, dan sebagainya.
8. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi cikal bakal lahirnya revolusi industri. Hal ini mengakibatkan kebutuhan bahan baku untuk industri serta pasar di

negara-negara di dunia memunculkan berbagai perusahaan multinasional di dunia. Di Indonesia misalnya, perusahaan-perusahaan dunia dari Eropa dan AS, seperti Freepot dan Exxon, Unilever dari Belanda, British Petroleum dari Inggris, dan sebagainya.

9. Perubahan dalam konsep ruang dan waktu yang diakibatkan oleh perkembangan telepon genggam, televisi satelit dan internet.
10. Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung satu negara dengan negara lain
11. Peningkatan interaksi budaya antar negara melalui media massa
12. Munculnya masalah global yang menuntut dunia mengatasi masalah tersebut secara bersama

E. Dampak Positif Dan Negatif Globalisasi Bagi Masyarakat

Globalisasi memiliki dampak dalam masyarakat. Dampak itu dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, dampak globalisasi ada dua yaitu positif dan negatif.

1. Dampak Negatif

Dampak negatif merupakan pengaruh buruk yang dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Dampak negatif globalisasi antara lain sebagai berikut :

a. Jati Diri Bangsa Terkikis

Globalisasi membuat arus informasi antar negara menjadi mudah. Media seperti televisi, internet, dan komputer menjadi perangkatnya. Banyak arus informasi yang secara bebas diterima masyarakat lambat laun akan mempengaruhi pola pikir masyarakat. Informasi itu akan membuat jati diri masyarakat terkikis secara perlahan. Beberapa contoh budaya globalisasi yang perlu dihindari adalah gaya hidup bebas dan pergaulan tanpa batas.

b. Industri Dalam Negeri Terancam

Setiap negara berusaha melindungi industri dalam negerinya. Jika tidak dilindungi, industri dalam negeri suatu negara bisa bangkrut. Industri dalam negeri terancam bila produk-produk luar negeri membanjiri pasar suatu negara. Apa yang terjadi jika pakaian-pakaian Cina, Eropa, dan AS masuk ke Indonesia padahal bangsa kita mampu membuatnya, Bagaimana nasib petani buah di negara kita jika pemerintah membiarkan apel Amerika, durian Bangkok dan jeruk China masuk secara bebas? Jelas sekali globalisasi dapat menghancurkan industri dalam negeri suatu negara.

c. Batas-batas Antar negara Menjadi Tidak Jelas

Globalisasi memberikan dampak pada kaburnya batas-batas antar negara. Hal itu terjadi karena sebuah negara tidak mungkin lagi mengendalikan secara penuh perusahaan-perusahaan asing yang menanamkan modal di Negara tersebut. Di negara kita, banyak perusahaan asing. Jika kita berusaha mengendalikan perusahaan-perusahaan itu, maka perusahaan itu akan lari ke negara lain. Akibatnya, kita sendiri yang rugi.

d. Masyarakat yang konsumtif

e. Pemborosan dan perilaku yang menyimpang dari adat ketimuran

f. Lebih condong pada budaya barat sehingga budaya pribadi sering ditinggalkan

g. Sikap individualis dan menutup diri sering terjadi pada individu yang mengikuti arus globalisasi secara terus informasi yang tak terkendali

h. Berkurang sikap solidaritas, gotong royong, kepedulian dan kesetiakawanan

2. Dampak Positif

Dampak positif merupakan pengaruh yang menguntungkan bagi seluruh masyarakat. Beberapa dampak positif globalisasi adalah sebagai berikut:

a. Hubungan Komunikasi Menjadi Lebih Mudah

Kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi memudahkan semua orang melakukan hubungan dengan orang lain meski berbagai tempat. Saudara, keluarga, atau teman yang berada di Negara lain dapat dengan mudah kita hubungi atau datangi. Telepon dan pesawat terbang menjadi alatnya.

b. Pertukaran Informasi Antarnegara Sangat Lancar

Kemajuan di bidang informasi menyebabkan kita mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di Negara lain dengan cepat. pertandingan olahraga, kejadian politik, atau peristiwa sosial dan budaya dengan mudah bisa kita saksiakan melalui layar televisi.

c. Harga Barang Menjadi Lebih Murah

Globalisasi menjadikan banyak Negara berlomba memproduksi barang yang murah. Meski murah, mutu tetap terjamin. Perlombaan dalam harga dan mutu itu bebas memilih. Mereka bebas untuk mendapatkan barang yang murah, sekaligus bermutu bagus.

d. Mobilitas yang tinggi akan memudahkan siapapun di era globalisasi akan mudah dalam melakukan perjalanan baik perjalanan jauh maupun perjalanan pendek dengan adanya alat transportasi yang semakin beragam

e. Perkembangan ekonomi, sosial dan budaya dengan globalisasi ini akan membawa individu semakin semangat dalam meningkatkan potensi dirinya

f. Pemenuhan kebutuhan yang semakin kompleks dan tidak terbatas sedikit demi sedikit akan mulai terpenuhi secara berkala pada era globalisasi

1) Meningkatnya turisme dan pariwisata

2) Meningkatnya ekonomi menjadi lebih produktif, efektif, dan efisien lebih produktif, efektif, dan efisien



BAB
5

RUANG LINGKUP DAN FAKTOR-FAKTOR PERMASALAHAN SOSIAL DAN TANTANGAN AKIBAT GLOBALISASI

A. Ruang Lingkup Globalisasi

Berdasarkan ruang lingkungnya, setidaknya kita mengenal lima macam globalisasi, yaitu, pertama, globalisasi ekonomi, kedua, globalisasi politik, ketiga, globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi, keempat, globalisasi sosial dan budaya, dan kelima, globalisasi agama.

1. Globalisasi ekonomi.

Globalisasi ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu kehidupan ekonomi yang bersifat global atau mendunia dan terbuka, tanpa mengenal batasan teritorial atau kewilayahan antara negara satu sama lain. Globalisasi ekonomi erat kaitannya dengan munculnya perusahaan-perusahaan yang bersifat trans-nasional dan perdagangan bebas, yaitu kawasan perdagangan yang berlangsung semakin luas dan “menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan internasional, seperti proteksi oleh negara untuk melindungi produk tertentu oleh perusahaan dalam negeri. Wujud nyata dari globalisasi ekonomi adalah terbentuknya perusahaan-perusahaan atau korporasi yang bersifat lintas negara nasional dan perdagangan bebas yang melampui batas- batas lintas negara.

2. Globalisasi politik.

Salah satu fenomena terjadinya globalisasi dalam bidang politik adalah munculnya organisasi-organisasi internasional yang terdiri dari berbagai negara, misalnya ASEAN, yang merupakan bentuk organisasi kerjasama di antara negara- negara di Asia Tenggara, MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa yang dibentuk untuk untuk menata politik perdagangan bersama di antara negara-negara yang ada di

kawasan Eropa Barat, Organisasi Buruh Internasional, Persatuan Bangsa-Bangsa, dan sebagainya. Di samping itu juga munculnya kerjasama antar-negara baik yang bersifat bilateral yang merupakan kerjasama di antara dua negara atau multilateral yang merupakan kerjasama di antara lebih dari dua negara.

3. Globalisasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi ditengarai oleh hadirnya teknologi yang memungkinkan banyak orang di belahan dunia manapun bisa saling terhubung satu sama lain. Setiap orang dapat memperoleh pendidikan atau pekerjaan di manapun yang ia mau, tidak terbatas di dalam negeri. Orang Indonesia dengan mudah dapat menempuh pendidikan atau memperoleh pekerjaan di Jerman, Australia, Jepang, Amerika, dan sebagainya. Peluang demikian akan dapat meningkatkan mutu sumberdaya manusia. Peningkatan mutu sumberdaya manusia ini menjadi penting karena dengan globalisasi akan terjadi persaingan yang relatif terbuka dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan menjalin relasi atau kerjasama.

4. Globalisasi bidang sosial dan budaya.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian di depan, bahwa dalam proses globalisasi tidak dapat dihindarkan terjadinya pertukaran unsur-unsur kebudayaan di antara kelompok atau masyarakat, tetapi tidak hanya itu, globalisasi juga merupakan ancaman terhadap keberadaan kebudayaan lokal dan nasional karena adanya pengaruh dari kebudayaan global. Globalisasi menuntut terjadinya perubahan sosial dan kebudayaan dari kelompok-kelompok atau masyarakat agar dapat memenuhi tuntutan hidup masyarakat global.

5. Globalisasi agama.

Dalam hubungannya dengan bidang kehidupan agama, globalisasi telah mengakibatkan terjadinya interaksi atau hubungan sosial di antara kelompok-kelompok atau umat beragama, baik yang berupa kerjasama, persaingan, atau pun dalam bentuk konflik. Hal ini merupakan konsekuensi berlangsungnya hubungan atau interaksi sosial yang semakin terbuka.

B. Faktor-Faktor Penyebab Globalisasi



Gambar 5.1:

Analogi Globalisasi (sumber: www.literasidesa.com)

Coba kalian cermati dan analisis, gambar faktor-faktor penyebab globalisasi tersebut diatas! Mengapa terjadi globalisasi? Paling tidak terdapat tiga faktor yang menyebabkan terjadinya globalisasi, yaitu:

1. Pertama, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta semakin rendahnya biaya transportasi.

Mulai tahun 1980-an, kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi telah mengalami suatu kemajuan besar dalam hal kekuatan, kemudahan penggunaan, dan ketersediaan. Kemajuan yang cepat dalam teknologi komputer dan piranti lunak telah menimbulkan terbentuknya serangkaian teknologi pendukung mulai dari mesin faksimili sampai dengan siaran radio dan televisi melalui satelit, jaringan-jaringan kerja komputer berbagai perusahaan, dan internet global. Secara bersamaan perkembangan teknologi tersebut telah memungkinkan berlangsungnya transmisi atau aliran data dan informasi yang tidak pernah terbayangkan pada masa sebelumnya mengenai ukuran dan kecepatannya. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana sekarang ini telah memungkinkan terjadinya transfer modal yang berlangsung dalam skala internasional atau global.

2. Kedua, menyebar dan meluasnya kapitalisme dalam kerjasama ekonomi internasional. Kapitalisme merupakan

sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik-pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Pada tataran tertentu, globalisasi dapat dilihat sebagai perluasan kapitalisme global.

3. Ketiga, kemenangan politik-ekonomi neoliberalisme

Diawali di Inggris oleh Perdana Menteri Margareth Thatcher dan di Amerika Serikat oleh Ronald Reagan, ideologi neoliberal pada akhirnya menjadi umum digunakan sebagai dasar menentukan kebijakan ekonomi yang dianut oleh para ekonom dan politikus di hampir semua negara di dunia. Bahkan melalui lembaga-lembaga global, seperti World Trade Organization, disingkat WTO, atau Organisasi Perdagangan Bebas Dunia, World Bank atau Bank Dunia dan International Monetary Fund, disingkat IMF, kebijakan-kebijakan yang bersifat neoliberal telah ditetapkan, di mana dalam penerapan kebijakan-kebijakan tersebut oleh negara-negara diawasi dan dikendalikan oleh negara-negara dominan yang tergabung dalam G7, yaitu Amerika Serikat, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Britania Raya, atau jika ditambah dengan Rusia menjadi G8.

C. Permasalahan Sosial Akibat Globalisasi

Sejalan dengan yang telah dikemukakan di depan bahwa globalisasi ditandai oleh integrasi perdagangan global yang menerobos batas-batas wilayah negara dan geografis. Globalisasi sangat mengutamakan kepentingan ekonomi. Kepentingan lainnya, seperti kemanusiaan, perdamaian, kebersamaan, demokrasi, dan kesejahteraan sosial, cenderung diabaikan. Asumsi yang digunakan para pendukung globalisasi adalah bahwa jika ekonomi global berjalan dengan baik, maka agenda-agenda lainnya juga akan berkembang mengikutinya. Dalam istilah sehari-hari dapat dikatakan yang penting ada uang, segala urusan dan kebutuhan akan teratasi.

Pandangan globalisasi yang demikian itu banyak dianut oleh kaum kapitalis. Pandangan seperti itulah yang telah

memporakporandakan tatanan-tatanan sosial, lingkungan alam, budaya, kearifan lokal, dan nilai-nilai luhur bangsa. Kalian perhatikan dan kritisi gambar berikut, berbagai permasalahan sosial sebagai akibat pengaruh globalisasi!



Gambar 5.2:

Gejala Sosial di masyarakat (Sumber: www.google.images.com)

Dominasi ekonomi ini telah mendorong penguatan ekonomi pada pihak yang kuat. Akibatnya, persaingan semakin ketat, jurang kesenjangan semakin curam, yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin terpuruk. Kehidupan masyarakat semakin individualis. Terjadilah krisis polarisasi kelas sosial atau menajamnya kesenjangan antara yang sangat kaya dengan yang sangat miskin. Kesenjangan ekonomi ini tidak saja menyangkut antar-negara, tetapi juga antar orang. Kemiskinan, kelaparan, dan penyakit menular semakin menyebar. Demikian juga kedudukan kaum perempuan. Kelompok perempuan menempati mayoritas masyarakat yang paling miskin.

Upaya mengatasi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan semakin sulit. Lebih diperparah lagi, bahwa pengentasan kemiskinan cenderung dilakukan secara *charity* atau berupa bantuan sosial. Akibatnya masyarakat semakin malas bekerja, pengangguran semakin meningkat, tidak mampu melakukan kompetisi, ketergantungan pada pihak lain semakin meningkat, sehingga kemandirian dan kesejahteraan sulit diwujudkan.

Apabila kita simpulkan, berbagai permasalahan sosial yang muncul akibat globalisasi adalah:

1. Pembangunan cenderung bersifat ekonomi, mengabaikan kepentingan-kepentingan bidang lainnya, dan sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa globalisasi merupakan perpanjangan dari kapitalisme global, maka globalisasi menimbulkan dua krisis sekaligus, yaitu, pertama, "polarisasi kelas sosial antara yang sangat kaya dengan yang sangat miskin, dan kedua, krisis lingkungan.
2. Rusaknya tatanan sosial lokal dan nasional, lingkungan alam, bahasa dan budaya lokal dan nasional, kearifan lokal, dan nilai-nilai luhur bangsa.
3. Dominasi ekonomi oleh para pemilik modal, sehingga menimbulkan ketimpangan sosial, ekonomi.

Permasalahan-permasalahan sosial tersebut terwujud sebagai dampak negatif globalisasi, seperti: arus informasi yang tak terkendali, timbulnya sikap yang kebarat-baratan atau westernisasi, sikap anggota masyarakat yang cenderung individualistis, menurunnya semangat kegotongroyongan, kepedulian, dan solidaritas atau kesetiakawanan, perusahaan dari luar negeri mendesak perusahaan-perusahaan yang ada dalam negeri sehingga perusahaan-perusahaan dalam negeri sulit berkembang, ketimpangan ekonomi dan sosial, berkurangnya tenaga kerja pertanian akibat dari sektor industri yang menyerap hampir seluruh petani, dan terkikisnya budaya lokal dan nasional oleh budaya global. Apakah sama sekali tidak ada hal positif yang ditimbulkan oleh globalisasi? Tentu saja ada. Berikut ini adalah beberapa hal positif akibat dari globalisasi, yaitu komunikasi yang semakin cepat dan mudah, meningkatnya taraf hidup masyarakat, mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan, tingkat pembangun yang semakin tinggi, meningkatnya pariwisata dan kegiatan ekonomi menjadi lebih produktif, efektif, dan efisien.

D. Tantangan Globalisasi Di Tingkat Lokal Dan Nasional

Tantangan nyata pada era globalisasi berhubungan dengan semakin kompleksnya berbagai bidang kehidupan karena telah berkembang dengan cepatnya teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi, kemudian kerjasama ekonomi internasional. Kondisi tersebut membawa pengaruh terhadap berbagai nilai dan wawasan dan cara hidup masyarakat di hampir semua negara-negara di dunia. Tantangan globalisasi yang mendasar dan harus dihadapi oleh masyarakat lokal dan nasional, antara lain sebagai berikut:

1. Sikap individualisme. Individualisme merupakan paham atau cara hidup yang berorientasi kepada kepentingan diri sendiri. Kecenderungan mengutamakan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan bersama akan berakibat pada memudarnya solidaritas atau kesetiakawanan sosial di kalangan warga masyarakat, demikian juga tentang tradisi dalam demokrasi yaitu bermusyawarah untuk mencapai kemufakatan serta aktivitas kerjasama dalam bentuk gotong royong dalam masyarakat. Solidaritas, musyawarah, dan gotong royong telah dibuktikan dalam sejarah mampu menjamin kelangsungan kehidupan kelompok atau masyarakat. Individualisme yang menjadi kecenderungan orientasi hidup anggota masyarakat semenjak masa industrialisasi mengancam pola-pola dalam tradisi masyarakat tersebut.
2. Memudarnya apresiasi para generasi muda terhadap budaya bangsa, para tokoh pendiri bangsa, dan para pemimpin bangsa. Komunikasi dan interaksi yang bersifat lintas batas wilayah negara berpotensi menimbulkan fenomena para generasi muda melupakan dan kurang menghargai budaya dan jatidiri bangsa, para tokoh dan para pejuang pendiri bangsa serta para pemimpin bangsa. Apresiasi justru lebih diberikan oleh para generasi muda kepada para artis, bintang film, termasuk para pemain sepak bola asing yang ditiru dengan segala macam aksesorisnya.
3. Pandangan kritis terhadap ideologi negaranya, yaitu banyaknya masyarakat yang sudah acuh tak acuh terhadap ideologi atau falsafah negaranya. Mereka sudah tidak tertarik lagi untuk

membahasnya bahkan lebih cenderung bersifat kritis dalam operasionalnya dengan cara membanding-bandingkan dengan ideologi lain yang dianggap lebih baik. Di satu sisi, pandangan kritis terhadap ideologi negara justru dapat lebih mengokohkan ideologi negara tersebut melalui proses dialektika dalam masyarakat yang karena globalisasi memang terdapat tuntutan untuk tumbuhnya ideologi negara yang bersifat terbuka.

4. Diversifikasi masyarakat, yaitu munculnya kelompok-kelompok masyarakat dengan profesi tertentu yang terus berkompetisi dalam berbagai bidang kehidupan guna mencapai tingkat kesejahteraan yang bertaraf internasional atau mengglobal.
5. keterbukaan yang lebih tinggi, yaitu tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan, pemerintah yang lebih mengedepankan pendekatan dialogis, demokratisasi, supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.
6. Tuntutan akan kemampuan bersaing dalam kehidupan global. Globalisasi yang antara lain melahirkan tatanan hidup global, misalnya misalnya Masyarakat Ekonomi Asia, atau disingkat MEA. Hidup dalam tatanan global memerlukan kemampuan bersaing yang tinggi. Inilah antara lain menjadi tantangan bagi pembangunan bidang pendidikan di Indonesia atau negara-negara berkembang lainnya. Inilah salah satu latar belakang mengapa kurikulum nasional pendidikan di Indonesia antara lain berorientasi pada bagaimana menghadapi kehidupan di Abad Ke-21.



BAB
6

DINAMIKA KOMUNIKASI GLOBAL

Komunikasi melalui jaringan (network) telah menjelma menjadi proses komunikasi yang kompleks yang dapat menembus batas ruang, waktu, jumlah, kapasitas dan kecepatan. Semakin cepatnya arus informasi dan komunikasi membuat efek domino bagi masyarakat dunia karena apa yang sedang menjadi tren dalam suatu negara lain akan bisa langsung diadopsi oleh negara lainnya. Ini menunjukkan telah terjadi dinamika desain pola komunikasi yang membuat perubahan sosial bagi masyarakat secara global. Jaringan global (*global network*) merupakan manifestasi dari jaringan komunikasi, yaitu media yang menghubungkan satu orang dengan orang yang lain.

A. Revolusi Digital

Konsep revolusi digital telah berkembang sejak ditemukannya komputer dan internet di awal Revolusi Industri 3.0 pada tahun 1960-an, oleh penemuan semi konduktor dan penyebaran komputer dan internet di kalangan masyarakat. Aspek paling menarik dari revolusi digital adalah peran teknologi dalam mengubah masyarakat secara positif. Mereka membawa gelombang revolusi di bidang informasi menuju bentuk digital. Gelombang revolusioner mengubah kehidupan masyarakat dalam mengkomunikasikan aktivitas dan menciptakan "*Network Society*", karena banyak hal dilakukan secara virtual melalui internet dan online.

Revolusi Industri 4.0 melanjutkan bentuk revolusi digital yang lahir dan berkembang pada masa Revolusi 3.0, namun dengan terobosan di ranah digital yang lebih lengkap dari sebelumnya.

Hal ini tidak hanya menciptakan teknologi yang bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan ekonomi masyarakat, tetapi juga mampu menyelesaikan permasalahan sosial yang telah mengakibatkan kesenjangan masyarakat akibat teknologi serta sebagai bentuk antisipasi munculnya masyarakat siber.

Era globalisasi yang ditandai pesatnya perkembangan teknologi dan pengetahuan serta diikuti Revolusi Industri 4.0 telah mempengaruhi cara pandang manusia dalam bekerja dan menjalankan kehidupannya; yaitu kehidupan yang semakin terdigitalisasi dan pemusatan pada kinerja teknolog, dalam kaitannya dengan mobilisasi internet, teknologi mesin, 3D printing, artificial intelligence (AI) serta teknologi robotik. Revolusi digital di Era 4.0, disebut juga “*Smart Factory*”, menggambarkan perubahan eksponensial pada cara menjalankan hidup, bekerja, dan berhubungan satu sama lain. Terdapat konektivitas melalui sistem virtual dengan menggunakan instrument teknologi yang disebut “internet of things” yang membuat sistem gerak sosial semakin maju dan lebih cepat. Konsep ini adalah perkembangan dari revolusi teknologi dan lebih mengarahkan ke bentuk inovasi sosial; sehingga dapat masuk ke segala arah dan menjembatani kesenjangan antara teknologi dan manusia.

Konsep ini berawal dari negara Jerman, yang dibangun atas tiga transformasi teknologi sebelumnya; termasuk penemuan mesin uap yang merupakan kekuatan transformatif abad 19 di Inggris, penemuan listrik di abad ke-20 dan era komputerisasi di awal tahun 1970-an. Revolusi 4.0 ini melengkapi kekurangan perkembangan teknologi (Cordes & Stacey, 2017). Revolusi Industry 4.0 menjawab kritik revolusi digital sebelumnya, dengan lebih mengedepankan penyelesaian masalah ke arah inovasi sosial dimana kemunculan teknologi hanya sebagai pendorong kemajuan pembangunan yang tetap dimotori oleh manusia. Menurut Frost & Sullivan (2016) yang tertuang dalam buku *Forbil series* yang berjudul *Peluang Social Innovation dalam Revolusi Industri 4.0*, inovasi sosial adalah penggabungan antara teknologi dengan model bisnis yang membawa dampak positif bagi kehidupan seseorang dan kelompok masyarakat, serta menghasilkan nilai-nilai tertentu atau *creating shared value* (CSV); serta terdapat stakeholder yang terlibat dalam penciptaan nilai tersebut seperti perusahaan, social enterprises, pemerintah,

lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga pendidikan, dan juga organisasi publik lainnya.

Era revolusi industry 4.0 juga mengajak masyarakat untuk memahami bahwa teknologi dibuat untuk kepentingan mereka sendiri, serta bukan menambah masalah social dengan adanya fenomena disrupsi teknologi. Sebagai contoh, pada era sebelumnya kemunculan robotik dan komputerasi menimbulkan insecure bagi manusia karena takut tergantikan posisinya; namun di era digital 4.0 teknologi digunakan untuk mengajak manusia bekerja bersama secara collaborative tanpa merugikan manusia itu sendiri. Sebagai contoh, melalui perkembangan media sosial bukan hanya proses saling berbagi konten yang informatif dan non informatif tetapi juga bisa berbagi masalah pekerjaan, barang, jasa, transportasi bahkan menikmati keuntungan secara bersama atau lebih dikenal dengan konsep "*Sharing Economy*".

B. Perkembangan Komunikasi Global

Kemampuan komunikasi melalui teknologi informasi di era revolusi digital sudah menjadi kebutuhan masyarakat secara umu. Disini masyarakat dituntut untuk ahli dalam mengoperasikan alat teknologi komunikasi yang serba digital. Didukung penemuan internet maka semakin memudahkan masyarakat berkomunikasi secara global, dimana perbedaan waktu dan jarak tidak lagi menjadi penghalang untuk melakukan sebuah komunikasi jarak jauh atau secara internasional. Keberadaan internet yang meniadakan batasan ruang dan waktu telah menyebabkan perubahan dalam berkomunikasi, yang menghasilkan sebuah budaya global yaitu hubungan antara manusia yang semakin mudah dan luas serta dianggap menghilangkan batas negara dan perbedaan budaya.

Perkembangan teknologi komunikasi menjadi tren di seluruh dunia karena pemanfaatan teknologi komunikasi seperti penggunaan media sosial dan web dan menjadi konsumsi publik masyarakat dunia, serta selalu dilekatkan dalam menjalankan aktivitas kehidupannya. Perkembangan telekomunikasi global perlu ditelusuri sebagai acuan dalam menciptakan sebuah trend baru dalam kehidupan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi telah memicu kenaikan besar dalam permintaan untuk layanan telekomunikasi global dari semua jenis, sehingga berdampak pada pertumbuhan fenomenal dari industri satelit. Satelit menjadi aspek penting dalam memberikan layanan komunikasi murah, handal dan cepat untuk bisnis internasional yang beroperasi di pasar elektronik global, terutama di daerah seperti penyiaran transnasional dan telepon, bank global dan maskapai penerbangan, surat kabar internasional dan distribusi majalah yang semuanya terinterkoneksi secara digital. Era komunikasi global ini menandai terbentuknya komunikasi yang semakin interaktif dengan ditemukannya berbagai penemuan teknologi di bidang komputeri sebagai media penyimpanan informasi dan mendukung pertukaran informasi ke segala jangkauan seperti komunikasi jarak jauh dan bisnis digital.

Dampak revolusi di bidang telekomunikasi dan informasi sangat dirasakan secara luas. Perkembangan telekomunikasi proses era digitalisasi secara lebih luas. Inovasi yang diciptakan di bidang ini menempatkan telekomunikasi pada posisi yang kuat dalam rangka mendapatkan keuntungan dari gelombang digitalisasi berikutnya, sekaligus mengamankan manfaat transformasi digital untuk pemerintah, industri dan masyarakat.

C. Arus Informasi dan Dampaknya

Adanya teknologi melahirkan media sosial yang telah menghilangkan batasan ruang, waktu dan kedalaman pola sosial. Hal ini pula yang memunculkan globalisasi informasi, yang tanpa disadari kehadiran teknologi ini menjadikan sistem sosial baru menuju keintiman digital. Pola relasi konvensional dalam sistem komunitas sosial, yang biasanya dilakukan melalui interaksi langsung mulai teralienasi dengan frekuensi interaksi digital yang melahirkan istilah *virtual society*.

Perkembangan teknologi dan informasi memunculkan dua sisi yaitu positif dan negatif. Sisi positifnya seperti memfasilitasi diplomasi secara umum seperti representasi, promosi, pelaporan, negosiasi; yang biasanya harus dilakukan secara tatap muka dan korespondensi ringan dapat dilakukan secara praktis dan relatif efisien. Banyak

keuntungan dari perkembangan teknologi digital, seperti memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui kegiatan ekonomi digital yang berbasis konsep ekonomi dengan saling berbagi. Meski begitu, ada sisi negatif yang muncul dimana perkembangan teknologi digital juga memiliki efek sebaliknya yaitu efek dari aspek keamanan, terbentuknya masyarakat virtual menciptakan masyarakat siber seperti munculnya hacker yang dapat membobol informasi negara atau perusahaan, penipuan online, propaganda melalui media sosial, bahkan aksi terorisme secara virtual.

Perkembangan teknologi dan informasi merupakan sebuah awal dari penyebaran arus globalisasi, yang membuat dunia semakin menyempit dan kehilangan batas-batas negara. Berbagai kegiatan seperti berbagi informasi, transaksi bisnis, komunikasi, aktivitas politik maupun budaya semua dapat dilakukan tanpa terbatas jarak dan serba cepat. Untuk itu masyarakat perlu lebih selektif dan kritis dalam memanfaatkan informasi yang disediakan dalam perkembangan teknologi dan informasi komunikasi.

Teknologi dan informasi komunikasi sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat dalam era revolusi digital, dengan sangat cepat mempengaruhi cara pandang, nilai, gaya hidup serta budaya bangsa yang menyebabkan dunia semakin terglobalisasi. Selain itu memunculkan sebuah generasi baru yang biasa disebut sebagai generasi millennial yang piawai dalam berkomunikasi menggunakan perangkat digital, gadget, dan media sosial.

Keberadaan jaringan internet semakin memudahkan masyarakat meraih informasi, menjalankan kehidupan sosial, berinteraksi, dan berbagi kegiatan bahkan mengatur agenda kerja. Teknologi dan media sosial telah menjadi sebuah gaya hidup yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat dan membuat mereka menjadi ketergantungan atau yang dikenal istilah *NomoPhobia* atau *No Mobile Phone Phobia*; yang menimbulkan kecemasan berlebihan apabila tidak dapat mengakses jaringan internet ataupun kehilangan perangkat teknologi seperti gadget, laptop, dan sebagainya.

Selain nomophobia, dampak lain yang ditimbulkan dari kemudahan mengakses informasi adalah kurangnya menghargai

proses dan usaha dalam mencari sebuah informasi yang mendalam sehingga sering terjadi salah penyerapan informasi akibat minimnya berita yang ditangkap dan menimbulkan sebuah berita hoax. Dengan adanya perkembangan media sosial semakin memudahkan masyarakat untuk bertukar informasi, namun di bagian lain masyarakat cenderung konsumtif dan tidak mem-filter berita atau informasi yang diterima sehingga belum terverifikasi sudah menyebarkan informasi.

Tanpa disadari pula masyarakat menjadi jurnalis online berkat perkembangan media social. Mereka mendapatkan kebebasan ruang berekspresi untuk memperoleh dan menyebarkan sebuah informasi menggantikan peran jurnalis professional namun tidak semua informasi yang disampaikan telah diverifikasi dengan sempurna. Masuknya arus berbagai informasi yang belum dilakukan penyaringan tersebut juga berpengaruh pada menyebarnya budaya asing yang juga dapat mengikis rasa nasionalisme bangsa. Ini bisa dilihat dari perkembangan berbagai budaya asing yang masuk melalui tayangan televisi, film, dan musik yang semakin meningkat popularitasnya. Apabila tidak ada filterisasi maka masyarakat akan mengkonsumsi arus informasi budaya tersebut secara mentah dan lebih mengenal budaya asing dibandingkan dengan budaya bangsa sendiri.

Pada bidang politik perkembangan teknologi komunikasi dapat mempercepat proses integrasi nasional. Implikasi akibat pengaruh komunikasi dan informasi dunia yang diterima masyarakat luas tanpa adanya filterisasi dengan baik dapat berdampak pada perubahan ideologi generasi muda. Di bidang ekonomi, perkembangan teknologi komunikasi telah dirasakan cukup mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat di samping dampak yang positif dan negatif. Dalam bidang sosial, perkembangan teknologi komunikasi telah mendorong lahirnya kembali nasionalisme kebudayaan. Oleh karena itu sangat diperlukan kecermatan dalam mendayagunakan penyebaran arus informasi digital tersebut, karena tidak semua penyebaran informasi yang diterima sesuai dengan nilai dan norma budaya masing-masing negara.

D. Interkoneksi Dan Interdependensi Masyarakat Dunia

Globalisasi erat kaitannya dengan interkoneksi dan interdependensi negara-negara di seluruh dunia. Globalisasi menjadi titik awal terhubungnya masyarakat dunia, karena globalisasi mendorong proses integrasi yang melibatkan perluasan dan pendalaman saling ketergantungan di antara masyarakat dan negara di seluruh dunia. Batas-batas nasional negara bangsa dinilai tidak terlalu penting, dan cara pemahaman lama mengenai kedaulatan negara telah bergeser, serta konsep individu dalam suatu kawasan bis apula dilihat dalam konteks global.

Globalisasi terkait erat dengan konsep saling ketergantungan masyarakat dunia dengan alasan sumber daya yang tersedia tidak terdistribusi secara merata di seluruh dunia. Tidak ada negara yang dapat sepenuhnya memenuhi semua sumber daya yang dibutuhkannya secara mandiri tanpa keterlibatan pihak negara lain. Ketersediaan sumber daya alam yang tidak merata ini menyebabkan setiap negara mulai melakukan upaya untuk saling terkoneksi demi mendapatkan akses sumber daya negara lain; sehingga tanpa disadari telah menciptakan saling ketergantungan global. Oleh karena itu, dorongan globalisasi menciptakan sebuah interkoneksi yang kuat dari jaringan dunia melalui operasi negara-negara tanpa batas. Negara-negara di seluruh dunia lebih mudah untuk berinteraksi, berdagang, dan membangun dunia secara kooperatif.

Masuknya era transformasi digital menandai percepatan arus globalisasi dan membuat masyarakat global semakin terhubung dengan mudah. Ditemukannya berbagai teknologi dan informasi semakin memudahkan konektivitas individu masyarakat untuk melakukan komunikasi jarak jauh, serta mengakses informasi secara digital. Konektivitas antar lintas negara yang semakin terintegrasi ini menghasilkan sebuah *global village* yang anggotanya saling tergantung satu sama lain. Adanya revolusi digital antar masyarakat dan antar negara yang sudah terkoneksi melalui internet menyebabkan tidak adanya lagi kesulitan untuk berkomunikasi dengan negara-negara lain. Jika dulu masyarakat masih terhubung secara konvensional dalam melakukan komunikasi dan bertransaksi untuk memenuhi kebutuhannya, serta memerlukan waktu yang relatif lama dan sangat

tidak efisien; namun adanya revolusi digital seperti media internet memungkinkan masyarakat terhubung dengan cepat.

Aktivitas bisnis dan jasa pun lebih meningkat dan inovatif sehingga menghasilkan peningkatan aktivitas ekonomi global. Ini juga didukung dengan kemajuan sarana dan prasarana dalam bidang teknologi transportasi dan informasi. Pada akhirnya, proses tersebut meningkatkan saling keterkaitan dan interdependensi antar individu dan negara serta berdampak pula terhadap lingkungan, ekonomi, budaya, sistem politik, dan pola hidup masyarakat dunia.

E. Interaksi Masyarakat Terbuka

Pertumbuhan teknologi yang semakin pesat memunculkan era dimana masyarakat mengalami perubahan transisi dalam melakukan cara berkomunikasi, sehingga mengubah pola hubungan dan infrastruktur social dalam masyarakat seperti dimensi ruang, waktu, kedalaman, serta tinggi rendahnya struktur social.

Dalam pola interaksi baru tersebut berbagai kepentingan, pendapat, nilai-nilai semuanya tersampaikan dengan memanfaatkan layanan internet. Hubungan antara manusia bukanlah sesuatu yang dinilai sulit untuk dilakukan, teknologi komunikasi dan transportasi membuat segala sesuatu semakin mudah bagi masyarakat untuk saling terkoneksi satu sama lainnya.

Perkembangan teknologi tersebut tidak terlepas dari perkembangan pola penerimaan budaya global oleh masyarakat akibat pengaruh globalisasi. Budaya global adalah fenomena yang terjadi karena kemajuan teknologi yang mengakibatkan hubungan antara manusia yang semakin mudah dan luas.

Budaya global juga berarti penyebaran nilai, norma, dan mempromosikan banyak budaya dari wilayah yang berbeda-beda; sebagai contoh adalah tersebarnya seperti Barat, yang berbeda dengan dengan nilai kepercayaan masyarakat diwilayah lain. Adanya budaya global mensyaratkan masyarakat untuk lebih cerdas dalam menerima budaya lain sehingga budaya lama dan rasa nasionalisme tidak tergeser oleh paradigma pemikiran modern yang menyingkirkan budaya sebelumnya.

Pengaruh transformasi budaya global tersebut dapat dianggap menjadi sebuah tren yang homogen dan mengarah pada pembentukan masyarakat dunia tunggal. Ini ditandai adanya kesamaan tren di seluruh dunia; tidak hanya dari segi fisik seperti fashion, elektronik, tetapi juga dalam hal kebiasaan baru yang menjadi konsumsi masyarakat luas seperti teknologi komunikasi.

Penggunaan teknologi sebagai sebuah budaya global oleh masyarakat menunjukkan bahwa teknologi komunikasi ini tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat luas, yaitu sebagai sarana yang mendukung aktivitas kehidupannya. Sebagai contoh, masyarakat banyak bergantung pada perangkat selulernya untuk menjalankan kehidupan sehari-hari; seperti mencari data, bahan penelitian, sampai mengingat tanggal atau momen penting memerlukan bantuan teknologinya.

Teknologi dijadikan alat untuk melihat dan berinteraksi dengan dunia; sedangkan budaya menjadi hal utama bagaimana memahami, dipahami, dan dilihat oleh dunia. Keduanya dielaborasikan untuk mendukung kehidupan masyarakat secara luas. Budaya telah menjadi sebuah komoditas baru yang dimodifikasi untuk mendukung kehidupan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Sebuah masyarakat tertentu semakin mungkin untuk memanfaatkan budaya lokalnya agar dikenal dunia. Ini dapat memperkuat rasa nasionalisme akan budaya yang dimilikinya, karena terbuka peluang mempromosikannya secara luas dengan bantuan teknologi.

Di bagian lain, kemajuan teknologi sebagai sebuah budaya global juga memiliki sisi interaksi disosiatif. Hal ini bisa menyebabkan distorsi dalam kehidupan sosial. Masyarakat cenderung melakukan komunikasi interpersonal yang lebih mengedepankan interaksi melalui media dan menimbulkan sifat individualistis berlebihan. Kemajuan teknologi membuat masyarakat luas semakin kurang mengenal lingkungan sekitar dan jarang berinteraksi secara langsung sehingga mengikis rasa empati sosial yang dimilikinya.

Masyarakat cenderung lebih banyak berinteraksi dengan alat teknologi yang dimilikinya daripada orang yang disekitarnya. Mereka lebih suka dan sering berkomunikasi melalui jejaring sosial seperti facebook, twitter, dan aplikasi chatting lainnya untuk berinteraksi.

Akibatnya, pemikiran masyarakat digital terbentuk dari konsepsi pemikiran mereka sendiri; yang dipengaruhi perkembangan media sosial elektronik dan bukan terbentuk dari lingkungan sosial yang dimilikinya sendiri.

Keberadaan teknologi memanjakan kehidupan sosial manusia. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat lebih bergantung pada perangkat digital yang dimilikinya daripada orang yang berada disekitarnya. Tingkat kepedulian yang dimiliki serta rasa sensitivitas menjadi kurang peka. Hal ini karena adanya penempatan posisi manusia yang digantikan oleh keberadaan teknologi; dimana kepedulian pada perangkat teknologi lebih dominan dibandingkan keberadaan orang-orang terdekatnya.

Teknologi telah menjadi kebutuhan utama untuk berinteraksi sosial, yang tanpa disadari telah menjadi gaya hidup dalam bermasyarakat. Perkembangan teknologi menjadi dua mata pisau yang menampilkan sisi positif dan negatif, yang apabila tidak bisa memanfaatkannya secara bijak maka akan berbalik arah merugikan kehidupan sosial manusia.

F. Dunia dan Masyarakat Tanpa Batas (*Borderless World*)

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang tinggi menyebabkan dunia menyusut dan negara kehilangan batas negara. Seperti yang dikatakan Ohmae (2005) bahwa batas negara jauh lebih tidak ketat daripada sebelumnya. Dunia menjadi tempat yang semakin tanpa batas (*borderless place*). Semua negara selalu dapat terhubung satu sama lain dan mengetahui perkembangan di negara lain secara transparan. Internet sebagai ujung tombak globalisasi baru yang mengikis otoritas dan relevansi pemerintah nasional. Teknologi elektronik merupakan pangkal munculnya komunikasi elektronik yang serba digital, yang menghantarkan manusia menggunakan Bahasa mesin dan kehadiran fisik tidak lagi penting dalam sebuah komunitas virtual. Komunitas virtual ini menyatukan manusia dari segala penjuru yang berbeda ruang dan jarak dalam satu tempat untuk melakukan aktivitas social dengan cara bertukar informasi secara online.

Dengan kata lain informasi menjadi inti dari bagaimana masyarakat menjalani kehidupan di era globalisasi. Globalisasi tidak bermaksud merevolusi sebuah budaya tetapi hanya bermaksud menjadikan dunia saling terkoneksi satu sama lain dengan tetap mempertahankan budaya local masing-masing.

Ruang lingkup masyarakat semakin tidak terbatas akibat perkembangan teknologi yang serba digital, area pertukaran informasi semakin luas yang membantu segala aktivitas manusia tanpa dibatasi ruang dan waktu dengan system jejaring internet. Era ini lebih dikenal sebagai era dunia ketiga, atau dunia siber, dunia yang segala aktivitas masyarakatnya didukung sistem jejaring internet, dan dengan mudah menerima perkembangan teknologi dan informasi sebagai budaya global. Dengan penerimaan budaya global tersebut menjadikan pesatnya perkembangan teknologi dan masyarakat aktif dalam menggunakan internet.

Internet mengantarkan masyarakat secara global mampu melihat isi dunia dan sebaliknya internet juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk eksistensi dirinya dan ekspor budaya local yang dimiliki. Kemajuan dunia siber ditandai secara nyata oleh perkembangan pesat dunia internet, yang dapat dilihat dari data bahwa tahun 2000-2009 jumlah pengguna internet telah melesat dari 350 juta menjadi 2 miliar lebih.

Teknologi gabungan internet-komputer (*world wide web*) telah membentuk generasi baru yang lebih dahsyat jika dibandingkan dengan revolusi yang dipicu oleh penemuan percetakan, radio, mobil, dan televisi. Penemuan internet ini menghasilkan *society network* (masyarakat jaringan) yang tanpa batas dan melakukan desain pola digital intimacy dalam berkomunikasi.

Keberadaan Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) nyatanya belum cukup untuk mengatasi berbagai masalah yang ada di dunia siber. Mengingat arti dari sibernatika yang memiliki fungsi pengawasan, akan menjadi sedikit aneh jika pada kenyataannya dunia siber sulit untuk diawasi. UU ITE tidak bisa hanya dibuat begitu saja, namun harus didukung perangkat teknologi yang bisa membantu menguatkannya. Terkait pengamanan data, Kominfo memilih

dengan cara pendekatan regulasi, pendekatan institusional, dan sosialisasi.

Pendekatan regulasi dapat menjadi landasan dasar bagi hukum siber di Indonesia. UU ITE harus dilengkapi aturan khusus yang mengatur perlindungan data. Selain mengatur bagaimana data tersebut tidak di bajak, UU ITE juga mengatur data apa saja yang harus dirahasiakan. Sedangkan pendekatan institusional, Kominfo sudah membentuk beberapa perangkat untuk mengecek serangan-serangan pencurian data. Tugas itu dibebankan pada Direktorat Keamanan Informasi yang dibentuk 2010. Kendati demikian, untuk pengamanan data tetap diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat menurutnya harus menyadari keamanan datanya sendiri.

Dunia siber tanpa batas ini juga melahirkan sebuah kelompok generasi yang membedakan dengan golongan masyarakat yang belum mengenal keberadaan internet yang biasa disebut sebagai iGeneration (*Internet Generation*). Dalam berkomunikasi masyarakat kelompok IGeneration memiliki keunikan tersendiri karena menciptakan ungkapan-ungkapan dengan kata-kata atau kalimat tertentu yang tidak disaring sebagai kata-kata tertulis yang baku.

Era Globalisasi yang diiringi dengan inovasi teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak terhadap perubahan dunia, dunia menjadi tanpa batas dengan masyarakat yang aktif berinteraksi di dalam dunia maya dan keberadaan media social menjadi sebuah fenomena penting yang memungkinkan para penggunanya menyatakan pendapat secara terbuka dan berkomunikasi dengan menggunakan system jejaring internet namun perkembangan teknologi tersebut juga melahirkan generasi masyarakat yang sangat ketergantungan terhadap akses internet dan tidak bisa dipungkiri adanya teknologi informasi juga telah menghilangkan batas-batas sosial di dalam kehidupan masyarakat.



BAB
7

KAPITALIS DI ERA GLOBALISASI

Pada masa permulaannya, kapitalisme merupakan semangat yang sering mendapatkan penekanan adalah sebagai usaha, berani mengambil resiko, persaingan dan keinginan untuk mengadakan inovasi. Tatanilai yang memadai kapitalisme (terutama di negara Anglo Saxon) adalah individualisme, kemajuan material dan kebebasan politik. Pertumbuhan kapitalisme, dan terutama industrialisasi oleh kapitalis, juga berarti melahirkan kelas pekerja yang besar di negara yang lebih maju. Sering berdesakan di daerah yang kotor di kota-kota industri yang baru berkembang, jam kerja yang lama dengan upah yang rendah dan dalam keadaan yang menyedihkan dan tidak sehat, kehilangan lembaga pengatur yang terdapat di daerah asalnya, dan untuk selama beberapa dekade disisihkan sama sekali dari proses politik – pekerja di Eropa tak dapat diabaikan untuk keberhasilan kapitalisme dan juga merupakan persoalan sosial dan politik yang paling besar selama tingkat permulaan kapitalisme industri ini. Seiring berjalannya waktu, prospek kapitalisme tidak begitu cerah seluruhnya segera sesudah terjadinya krisis finansial yang melanda Amerika Serikat yang kemudian berdampak bagi negara-negara lain. Banyak para kalangan yang mengatakan bahwa ini adalah saatnya kehancuran kapitalisme.

A. Lahirnya Kapitalis

Kapitalisme atau Kapital adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama, tapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran

untung kepentingan-kepentingan pribadi. Walaupun demikian, kapitalisme sebenarnya tidak memiliki definisi universal yang bisa diterima secara luas. Beberapa ahli mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem yang mulai berlaku di Eropa pada abad ke-16 hingga abad ke-19, yaitu pada masa perkembangan perbankan komersial Eropa di mana sekelompok individu maupun kelompok dapat bertindak sebagai suatu badan tertentu yang dapat memiliki maupun melakukan perdagangan benda milik pribadi, terutama barang modal, seperti tanah dan manusia guna proses perubahan dari barang modal ke barang jadi. Untuk mendapatkan modal-modal tersebut, para kapitalis harus mendapatkan bahan baku dan mesin dahulu, baru buruh sebagai operator mesin dan juga untuk mendapatkan nilai lebih dari bahan baku tersebut.

Kapitalisme memiliki sejarah yang panjang, yaitu sejak ditemukannya sistem perniagaan yang dilakukan oleh pihak swasta. Di Eropa, hal ini dikenal dengan sebutan guild sebagai cikal bakal kapitalisme. Saat ini, kapitalisme tidak hanya dipandang sebagai suatu pandangan hidup yang menginginkan keuntungan belaka. Peleburan kapitalisme dengan sosialisme tanpa adanya perubahan menjadikan kapitalisme lebih lunak daripada dua atau tiga abad yang lalu. Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang mengatur proses produksi dan pendistribusian barang dan jasa. Kapitalis berasal dari kata kapital, secara sederhana dapat diartikan sebagai 'modal'. Didalam sistem kapitalis, kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemilik modal, dimana dalam perekonomian modern pemilik modal dalam suatu perusahaan merupakan para pemegang saham.

Perkembangan kapitalisme pada negara terbelakang menjadi sebuah topik yang menarik untuk dikaji. Gejala kapitalisme dianggap sebagai sebuah solusi untuk melakukan pembangunan di negara terbelakang. Teori sistem dunia yang disampaikan oleh Wallerstein merupakan keberlanjutan pemikiran Frank dengan teori dependensinya. Pendapat Frank, Sweezy dan Wallerstein mengacu pada model yang dikenalkan oleh Adam Smith. Menurut Smith, pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat memiliki kesamaan dengan pembangunan produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja merupakan sebuah fungsi

yang berhubungan dengan tingkat pembagian kerja. Konsep inilah yang kemudian memunculkan perbedaan mode produksi menjadi sektor pertanian dan manufaktur. Konsep ini kemudian semakin berkembang dengan munculnya perbedaan desa dan kota sebagai sebuah mode produksi yang berbeda

Pandangan teori sistem dunia yang menganggap dunia sebagai sebuah kesatuan sistem ekonomi kapitalis mengharuskan negara pinggiran menjadi tergantung pada negara pusat. Transfer surplus dari negara pinggiran menuju negara pusat melalui perdagangan dan ekspansi modal. Secara tidak langsung teori ini memang mendukung pernyataan Smith yang memusatkan perhatian pada tatanan kelas. Kenyataan yang terjadi dalam proses kapitalisme telah menimbulkan dampak berupa pertumbuhan ekonomi yang terjadi karena arus pertukaran barang dan jasa serta spesialisasi tenaga kerja. Kerangka pertukaran barang dan jasa serta spesialisasi tenaga kerja ini terwujud dalam bentuk peningkatan produktivitas yang lebih dikenal dengan konsep maksimalisasi keuntungan dan kompetisi pasar. Kapitalisme sebagai suatu sistem ekonomi yang memungkinkan beberapa individu menguasai sumberdaya vital dan menggunakannya untuk keuntungan maksimal. Maksimalisasi keuntungan menyebabkan eksploitasi tenaga kerja murah, karena tenaga kerja adalah faktor produksi yang paling mudah direkayasa dibandingkan modal dan tanah. Lebih jauh, dalam wacana filsafat sosial misalnya, kapitalisme dipandang secara luas tak terbatas hanya aspek ekonomi, namun juga meliputi sisi politik, etika, maupun kultural. Kapitalisme pada awalnya berkembang bukan melalui eksploitasi tenaga kerja murah, melainkan eksploitasi kepada kaum petani kecil. Negara terbelakang merupakan penghasil barang mentah terutama dalam sektor pertanian.

Kapitalisme yang menjalar hingga negara terbelakang menjadikan struktur sosial di negara terbelakang juga berubah. Kapitalisme memunculkan kelas sosial baru di negara terbelakang yaitu kelas pemilik modal. Berkembangnya ekonomi kapitalis ini didukung oleh sistem kekerabatan antara mereka. Kelas borjuis di negara terbelakang juga dapat dengan mudah memanfaatkan dukungan politik dari pemerintah. Sebagai sebuah kesatuan ekonomi

dunia, asumsi Wallerstein akan adanya perlawanan dari negara terbelakang sebagai kelas tertindas oleh negara pusat menjadi hal yang tidak mungkin terjadi. Kapitalisme telah menciptakan kelompok sosial borjuis di negara terbelakang yang juga menggunakan kapitalisme untuk meningkatkan keuntungan ekonomi mereka, sehingga sangat tidak mungkin mereka melakukan perjuangan kelas. Gagasan Marx tentang tahapan revolusi ternyata runtuh. Marx menyatakan bahwa negara terbelakang akan memerlukan dua tahap revolusi, yaitu revolusi borjuis dan revolusi sosialis. Revolusi borjuis dilakukan oleh kelas borjuis nasional untuk melawan penindasan oleh negara maju dan kemudian baru berlanjut pada revolusi sosialis oleh kelas proletar.

Asumsi ini runtuh karena kelas borjuis nasional ternyata tidak mampu lagi melaksanakan tugasnya sebagai pembebas kelas proletar dari eksploitasi kapitalisme, karena kelas borjuis nasional sendiri merupakan bentukan dan alat kapitalisme negara maju. Dari uraian di atas terlihat bahwa kapitalisme yang pada awalnya hanyalah perubahan cara produksi dari produksi untuk dipakai ke produksi untuk dijual, telah merambah jauh jauh menjadi dibolehkannya pemilikan barang sebanyak-banyaknya, bersama-sama juga mengembangkan individualisme, komersialisme, liberalisasi, dan pasar bebas. Kapitalisme tidak hanya merubah cara-cara produksi atau sistem ekonomi saja, namun bahkan memasuki segala aspek kehidupan dan pranata dalam kehidupan masyarakat, dari hubungan antar negara, bahkan sampai ke tingkat antar individu. Sehingga itulah, kita mengenal tidak hanya perusahaan-perusahaan kapitalis, tapi juga struktur masyarakat dan bentuk negara. Upaya untuk memerangi kapitalisme bukan dengan sistem ekonomi sosialis namun dengan kemandirian ekonomi atau swasembada.

B. Sifat-Sifat Dasar Sistem Kapitalis

Dalam sebuah perjuangan, kita harus tahu siapa kawan dan siapa lawan. Musuh kita adalah kapitalisme. Tetapi apakah kapitalisme itu? Jawabannya mungkin tampak sederhana. Kapitalisme bukankah sebuah sistem dimana sejumlah individu yang kaya memiliki pabrik-pabrik dan perusahaan lainnya? Bukankah para kapitalis ini bersaing

pada sebuah pasar bebas, tanpa perencanaan yang terpusat, dengan hasil bahwa sistem perekonomian sering jadi kacau dan acapkali mengalami krisis? Jawaban untuk menghindari keadaan seperti itu juga tampaknya jelas, ialah menyita industri dari para individu itu (nasionalisasi), dan membiarkan negara untuk merencanakan ekonominya.

Menurut kebanyakan orang yang berhaluan kiri, hal-hal diatas dianggap merupakan inti dari ajaran Marxisme. Tetapi dewasa ini permasalahan-permasalahan diatas tidak dapat dilihat sesederhana itu. Pada satu sisi, banyak perusahaan di bawah sistim kapitalis dewasa ini tidak lagi dikontrol oleh para individu. Secara formal perusahaan-perusahaan itu dimiliki oleh para pemegang saham, tapi kenyataannya perusahaan-perusahaan raksasa seperti General Motors dijalankan oleh para pejabat perusahaan. Sedangkan bentuk perusahaan-perusahaan lainnya adalah perusahaan negara seperti BUMN di Indonesia. Namun kaum buruh juga dieksploitasi dalam perusahaan tersebut.

Eksploitasi semacam ini mengambil bentuk dalam hubungan sosial di tempat kerja. Yakni para pekerja yang tidak memiliki perangkat produksi, dan tidak memiliki komoditi untuk dijual sehingga mereka harus menjual tenaga kerjanya untuk gaji (*wage labour system*). Ini berarti mereka tidak memiliki kontrol dari hasil kerjanya. Dalam sebuah sistem ekonomi seperti ini, tidak ada kemungkinan untuk merencanakan perekonomian demi kepentingan masyarakat luas. Justru sebaliknya, setiap kapitalis akan didorong oleh kompetisi untuk membangun usaha dengan mengorbankan orang lain. Seperti yang dikatakan Marx, 'Akumulasi! Akumulasi! itu adalah nabi-nabi baginya'. Ini berarti yang kuat memakan yang lemah, dan sistemnya akan turun secara drastis sampai mengalami krisis ekonomi.

Tetapi di semua negara itu analisa fundamental Marx masih sangat relevan. Alat-alat produksi masih dikontrol oleh minoritas meskipun komposisinya sangat bermacam-macam dari para pengusaha individu melalui sektor swasta dan birokrat yang bekerja di sektor publik. Para pekerja menjual tenaga mereka untuk mendapatkan gaji, dan tidak memiliki kontrol terhadap proses produksi atau barang-barang yang mereka hasilkan.

Produksi dilaksanakan dengan jalan kompetisi, baik dalam skop kecil, persaingan antar perusahaan maupun dalam skop besar atau nasional, antar negara, yang dipimpin oleh aparatus negara.

Kompetisi antar negara juga memiliki bentuk yang lain yaitu kompetisi militer. Bekas negara Uni Soviet selalu mendorong ekonominya berjalan secara efisien, karena harus bersaing dengan Amerika Serikat dalam hal persenjataan. Kaum buruh di Uni Soviet dihisap oleh birokrasi yang tengah berkuasa guna kompetisi militer tersebut. Kami menyebut bentuk ekonomi yang dijalankan oleh rezim Soviet itu “Kapitalisme

Negara”. Kontrol pekerja terhadap produksi yang berkaitan erat dengan kontrol mereka secara demokratis terhadap negara dapat diterapkan di sebuah negara secara sementara. Namun seperti yang kita lihat, tekanan kompetisi berlangsung secara internasional. Maka untuk jangka panjang, sosialisme mesti diciptakan di tingkat internasional.

C. Prinsip-prinsip Dan Bentuk Kapitalisme

Prinsip-prinsipnya:

1. Mencari keuntungan dengan berbagai cara dan sarana kecuali yang terang-terangan dilarang negara karena merusak masyarakat seperti heroin dan semacamnya.
2. Mendewakan hak milik pribadi dengan membuka jalan selebar-lebarnya agar tiap orang mengerahkan kemampuan dan potensi yg ada utk meningkatkan kekayaan dan memeliharanya serta tidak ada yg menjahatinya. Karena itu dibuatlah peraturan-peraturan yang cocok utk meningkatkan dan melancarkan usaha dan tidak ada campur tangan negara dalam kehidupan ekonomi kecuali dalam batas- batas yang sangat diperlukan oleh peraturan umum dalam rangka mengokohkan keamanan.
3. Perfect Competition .
4. *Price system* sesuai dengan tuntutan permintaan dan kebutuhan dan bersandar pada peraturan harga yang diturunkan dalam rangka mengendalikan komoditas dan penjualannya.

Bentuk Kapitalisme, antara lain:

1. Kapitalisme perdagangan yang muncul pada abad ke-16 setelah dihapusnya sistem feodal. Dalam sistem ini seorang pengusaha mengangkat hasil produksinya dari satu tempat ke tempat lain sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan demikian ia berfungsi sebagai perantara antara produsen dan konsumen
2. Kapitalisme industri yg lahir karena ditopang oleh kemajuan industri dgn penemuan mesin uap oleh James Watt tahun 1765 dan mesin tenun tahun 1733. Semua itu telah membangkitkan revolusi industri di Inggris dan Eropa menjelang abad ke-19. Kapitalisme industri ini tegak di atas dasar pemisahan antara modal dan buruh yakni antara manusia dan mesin.
3. Sistem Kartel yaitu kesepakatan perusahaan-perusahaan besar dalam membagi pasaran internasional. Sistem ini memberi kesempatan untuk memonopoli pasar dan pemerasan seluas-luasnya. Aliran ini tersebar di Jerman dan Jepang.
4. Sistem Trust yaitu sebuah sistem yang membentuk satu perusahaan dari berbagai perusahaan yang bersaing agar perusahaan tersebut lebih mampu memproduksi dan lebih kuat untuk mengontrol dan menguasai pasar.

D. Segi Negatif Dan Kelemahan Kapitalisme

Segi negatif kapitalisme adalah sebagai berikut:

1. Sitem buatan manusia. Sekelompok kecil pribadi mendominasi pasar untuk mencapai kepentingan sendiri tanpa menghargai kebutuhan masyarakat dan menghormati kepentingan umum.
2. Egoistik. Dalam sistem kapitalisme individu dan sekelompok kecil pribadi mendominasi pasar untuk mencapai kepentingan sendiri tanpa menghargai kebutuhan masyarakat dan menghormati kepentingan umum.
3. Monopolistik. Dalam sistem kapitalisme seorang kapitalis memonopoli komoditas dan menimbunnya. Apabila barang tersebut habis di pasar ia mengeluarkannya untuk dijual

dengan harga mahal yang berlipat ganda mencekik konsumen dan orang-orang lemah.

4. Terlalu berpihak kepada hak milik pribadi. Kapitalisme terlalu mengagungkan hak milik pribadi. Sedangkan komunisme malah menghilangkan hak milik pribadi.
5. Persaingan. Sistem dasar kapitalisme membuat kehidupan menjadi arena perlombaan harga. Semua orang berlomba mencari kemenangan. Sehingga kehidupan dalam sistem kapitalisme berubah menjadi riba di mana yang kuat menerkam yang lemah. Hal ini sering menimbulkan kebangkrutan pabrik atau perusahaan tertentu.
6. Perampasan tenaga produktif. Kapitalisme membuat para tenaga kerja sebagai barang komoditas yang harus tunduk kepada hukum permintaan dan kebutuhan yang menjadikan dia sebagai barang yang dapat ditawarkan tiap saat. Pekerja ini bisa jadi sewaktu-waktu diganti dengan orang lain yang upahnya lebih rendah dan mampu bekerja lebih banyak dan pengabdianya lebih baik.
7. Pengangguran. Suatu fenomena umum dalam masyarakat kapitalis ialah munculnya pengangguran yang mendorong pemilik perusahaan untuk menambah tenaga yang akan memberatkannya.
8. Kehidupan yang penuh gejolak. Ini adalah akibat logis dari persaingan yang berlangsung antara dua kelas. Yang satu mementingkan pengumpulan uang dengan segala cara. Sedangkan yang satu lagi tidak diberi kesempatan mencari sendiri kebutuhan pokok hidupnya tanpa kenal belas kasihan.
9. Penjajahan. Karena didorong mencari bahan baku dan mencari pasar baru untuk memasarkan hasil produksinya kapitalisme memasuki petualangan penjajahan terhadap semua bangsa. Pada mulanya dalam bentuk penjajahan ekonomi pola pikir politik dan kebudayaan. Kemudian memperbudak semua bangsa dan mengeksploitasi tenaga-tenaga produktif demi kepentingan penjajahan.

10. Peperangan dan malapetaka. Umat manusia telah menyaksikan berbagai bentuk pembunuhan dan pembantaian luar biasa biadabnya. Itu terjadi sebagai akibat logis dari sebuah penjajahan yang menimpa umat manusia di bumi yang melahirkan bencana paling keji dan kejam.
11. Didominasi hawa nafsu. Orang kapitalisme berpegang kepada prinsip demokrasi politik dan pemerintahan. Pada umumnya demokrasi yang mereka gambar-gemborkan dibarengi dengan hawa nafsu yang mendominasi dan jauh dari kebenaran dan keadilan.
12. Riba. Sistem kapitalisme tegak di atas landasan riba. Sedangkan riba merupakan akar penyakit yang membuat seluruh dunia menderita.
13. Tidak bermoral. Kapitalisme memandang manusia sebagai benda materi. Karena itu manusia dijauhkan dari kecenderungan ruhani dan akhlaknya. Bahkan dalam sistem kapitalisme antara ekonomi dan moral dipisahkan jauh-jauh.
14. Kejam. Kapitalisme sering memusnahkan begitu saja komoditas yang lebih dengan cara dibakar atau dibuang ke laut krn khawatir harga akan jatuh disebabkan banyaknya penawaran. Mereka berani melakukan itu padahal masih banyak bangsa-bangsa yang menjerit kelaparean.
15. Boros. Orang-orang kapitalisme memproduksi barang-barang mewah disertai iklan besar-besaran tanpa peduli kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat. Sebab yang mereka cari keuntungan belaka.
16. Tidak berperikemanusiaan. Orang kapitalis sering mengusir begitu saja seorang buruh karena alasan tenaganya kurang produktif. Tetapi kekejaman ini mulai diperingan akhir-akhir ini dengan adanya perbaikan dalam tubuh kapitalisme.

Kelemahan Sistem Perekonomian Kapitalis Sistem kapitalis sebagai pengganti sistem komunis memberikan dampak yang sangat buruk bagi perkembangan perekonomian dunia. Kapitalis berasal dari kata kapital, secara sederhana dapat diartikan sebagai 'modal'. Didalam sistem kapitalis, kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemilik

modal, dimana dalam perekonomian modern pemilik modal dalam suatu perusahaan merupakan para pemegang saham.

1. Kelemahan Sebagai Sistem Dalam Perusahaan Modern

Apa kepentingan pemegang saham? Jawabanya tentu saja keuntungan yang terus meningkat yang akan diikuti oleh meningkatnya harga saham dan dividen. Didalam sistem yang berlaku sekarang peningkatan keuntungan perusahaan hanya dapat dinikmati oleh para pemegang saham dan tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan karyawan atau buruh. Banyak perusahaan yang memperoleh keuntungan dan terus meningkat setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan. Apakah peningkatan keuntungan ini akan diikuti oleh peningkatan atau kenaikan gaji karyawan atau buruh? Tentu saja jawabanya tidak. Apalagi di Indonesia, dimana kebanyakan karyawan dan buruh bukan merupakan pegawai tetap dan hanya dikontrak enam bulan atau setahun. Apakah mereka akan merasakan manfaat dari peningkatan keuntungan perusahaan? Sekali lagi tentu saja tidak. Sistem kapitalis jika diibaratkan seperti tubuh manusia, dimana rasa sakit yang diderita oleh satu jari tangan maka akan menyebabkan rasa sakit secara lahir dan batin diseluruh tubuh. Bandingkan jika jari tersebut disematkan cincin berlian, apakah bagian tubuh yang lain akan merasakan efeknya secara langsung? Apakah mata yang setiap saat menjaga jari agar tidak luka, terbakar dan sebagainya akan merasakan efeknya? Apakah hidung yang setiap saat memelihara jari melalui indra penciuman akan merasakan efeknya? Apakah mulut yang merupakan alat untuk memasukan sumber energi bagi jari akan merasakan efeknya? Demikian juga dengan bagian tubuh lainnya.

Sistem kapitalis merupakan suatu sistem yang saling terintegrasi secara global. Dimana kejadian krisis disuatu perusahaan atau negara lainnya yang mempunyai keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan atau negara kita, mau tidak mau sebagai bagian dari sistem kapitalis akan merasakan efek domino yang sangat berarti. Di satu sisi keuntungan yang mereka peroleh tidak akan memberikan dampak yang berarti, dengan kata lain efek kerugian yang diterima suatu masyarakat dengan sistem kapitalis tidak sebanding dengan efek keuntungan yang akan diterima.

Ilustrasi diatas menggambarkan bagaimana tidak adilnya sistem kapitalis memperlakukan pemegang saham dan karyawan atau buruh yang merupakan bagian dari suatu perusahaan. Keuntungan hanya dirasakan oleh pemegang saham, sedangkan kerugian akan dirasakan oleh semua bagian dari perusahaan, tidak terkecuali karyawan atau buruh. Lalu bagaimanakah sistem yang adil? Menurut penulis, sistem yang adil adalah menjadikan karyawan atau buruh sebagai pemegang saham tunggal. Secara perlahan sistem ini akan menjadikan satu perusahaan akan dimiliki dan oleh karyawan. Dalam hal ini masyarakat diluar bagian internal perusahaan dilarang memiliki saham perusahaan, hal ini secara tidak langsung akan mengurangi ketergantungan suatu perusahaan secara global karena jalur penghubung antara perusahaan dengan dunia luar secara global melalui kepemilikan saham sudah terputus.

2. Kelemahan Sebagai Sistem Dalam Lembaga Keuangan Perbankan

Kelemahan mendasar berikutnya dari sistem kapitalis adalah sistem bunga. Sistem kapitalis memposisikan uang sebagai sesuatu yang mempunyai nilai berdasarkan waktu, jadi uang akan mempunyai nilai yang berbeda karena perbedaan waktu. Keadaan ini akan memaksa lembaga keuangan khususnya perbankan memberikan pertolongan finansial dengan mengharapkan imbalan bunga, sehingga bunga dapat didefinisikan sebagai 'tiada pertolongan tanpa imbalan'. Hal ini bertolak belakang sekali dengan prinsip seorang muslim, karena Islam merupakan agama terbesar di Indonesia, dimana pertolongan diberikan dengan ikhlas dan biarlah Allah SWT yang membalas dengan cara-Nya. Disadari atau tidak bunga merupakan salah satu faktor utama penyebab krisis moneter tahun 1997 dan krisis keuangan global saat ini. Semua instansi keuangan, baik bank maupun non bank menarik dana dari masyarakat dengan iming-iming bunga dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan memperoleh imbalan berupa bunga. Keserakahan akan mendorong lembaga keuangan untuk menyalurkan dana kepada pihak manapun secara besar-besaran, akibatnya terjadi kredit macet yang berdampak besar terhadap lembaga itu sendiri. Di Indonesia ini terjadi sebelum krisis dan memacu terjadinya krisis moneter, sedangkan di Amerika Serikat ini memacu terjadinya krisis kredit

perumahan yang menyebabkan terjadinya krisis keuangan global. Disatu sisi jika pemerintah atau bank sentral melakukan regulasi ketat akan berdampak buruk juga bagi perekonomian karena akan terjadi fenomena yang disebut *credit crunch*. Dimana lembaga keuangan enggan menyalurkan kredit karena regulasi ketat sehingga roda perekonomian tidak berjalan, khususnya sektor riil yang menyerap banyak tenaga kerja.

Bayangkan, suatu sistem yang memberikan alternatif 'maju kena mundur kena' inilah yang berlaku sekarang. Betapa bodohnya kita, menciptakan suatu sistem yang sedemikian rupa tanpa ada pemecahan untuk mengatasinya. Lalu apa solusinya? Solusinya tidak akan mudah, karena bukan pekerjaan mudah untuk merubah suatu sistem yang sudah berlaku berabad-abad lamanya. Secara perlahan dan pasti, sistem bunga dapat dihilangkan, langkah pertama pisahkan antara kredit konsumsi dan kredit produktif. Sebagai ganti bunga untuk kredit konsumsi dapat ditarik 'sumbangan' yang merupakan keikhlasan dari nasabah tanpa paksaan. Hal ini dapat terjadi jika dikomunikasikan dengan baik. Persoalnya, lembaga keuangan bukanlah yayasan yang hidup dari sumbangan dan ada *cost of money*, apakah *cost of money* dapat di-cover oleh 'sumbangan'? Tentu saja bisa! Komunikasi dua arah yang baik akan menjadikan kreditur dan debitur sebagai rekan kerja dan saling menguntungkan. Pengganti bunga dari kredit produktif tentu saja bagi hasil, seperti konsep perekonomian syariah.

3. Kelemahan Dalam Sistem Nilai Tukar

Sitem kapitalis sebagai suatu sistem yang mayoritas diterapkan dibanyak negara, termasuk Indonesia, menempatkan uang sebagai sesuatu nilai yang berbeda karena perbedaan waktu, tempat, kekuatan daya beli masyarakat, dan sebagainya. Perbedaan ini akan mendorong para spekulan untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa peduli terhadap nasib orang banyak.

Pada umumnya terdapat dua sistem nilai tukar, yaitu sistem nilai tukar tetap dan sistem nilai tukar mengambang. Sistem nilai tukar tetap mengharuskan pemerintah memelihara cadangan devisa agar nilai tukar tetap stabil dan berada pada posisi yang diharapkan, sedangkan sistem nilai tukar mengambang, kekuatan permintaan

dan penawaran di pasar valuta asing (valas) akan menentukan nilai suatu mata uang terhadap mata uang lainnya.

Kedua sistem tersebut masih diterapkan di beberapa negara. Sebenarnya Indonesia pada masa orde baru menggunakan sistem nilai tukar tetap, walaupun secara teori sistem yang digunakan adalah sistem nilai tukar mengambang terkendali, karena pemerintah menentukan batas atas dan batas bawah nilai tukar rupiah terhadap mata uang lainnya dan pemerintah dapat melakukan intervensi untuk mendorong nilai tukar rupiah keposisi yang diharapkan. Pasca krisis moneter, karena pemerintah melalui Bank Indonesia sudah tidak mampu melawan serangan para spekulan dan menjaga agar nilai tukar rupiah tetap stabil, mendorong Indonesia menerapkan sistem nilai tukar mengambang.

Kedua sistem tersebut memiliki kelemahan, karena nilai tukar suatu mata uang dapat digunakan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan, baik keuntungan secara ekonomi maupun non ekonomi, karena kedua sistem tersebut sangat rentan terhadap faktor-faktor diluar ekonomi yang tidak dapat dikendalikan oleh para pelaku ekonomi.

Sebagai contoh, suatu negara x menggunakan sistem nilai tukar tetap, pihak yang ingin meruntuhkan pemerintahan negara x dan memiliki finansial yang kuat dapat menyerang nilai tukar negara x dengan cara membeli mata uang asing dengan menggunakan mata uang negara x secara besar-besaran dan terus menerus, akibatnya pemerintahan negara x akan kesulitan mempertahankan nilai tukarnya pada posisi yang diharapkan, karena serangan pihak tersebut dilakukan secara mendadak dan terus menerus karena tujuannya untuk meruntuhkan pemerintahan negara x tersebut, sehingga cadangan devisa negara x tersebut lama kelamaan akan terkuras secara drastis atau bahkan habis dan minus karena sudah berhutang kenegara lain. Sejarah mencatat, fenomena ini menyebabkan Soeharto harus rela mundur dari kursi presiden Indonesia yang telah didudukinya selama 3 tas tinggi, kemiskinan meningkat, dan banyak lagi efek domino-nya.

Apa solusi untuk ini semua? Jawabnya adalah kebersamaan, hilangkan keserakahan dan mau berbagi untuk kepentingan semua.

Tahap awal yang bisa dilakukan mungkin dengan cara meniru Uni Eropa dengan memberlakukan satu mata uang tunggal, hal ini juga bisa dicoba untuk kawasan ASEAN, selanjutnya secara bertahap dikawasan Asia-Pasifik dan akhirnya dunia diharapkan dapat menggunakan mata uang tunggal. Selama ini, faktor utama yang menyebabkan perbedaan nilai uang suatu negara dengan negara lain, karena negara-negara maju dan kaya enggan untuk berbagi dengan negara miskin dan mengambil keuntungan dari sistem yang mereka ciptakan sendiri.

Hal tersebut juga dapat berlaku terhadap negara yang menggunakan sistem nilai tukar mengambang, Ulah para spekulan yang memiliki finansial yang kuat dapat mendorong nilai tukar suatu mata uang keposisi yang mereka harapkan untuk memperoleh keuntungan. Misalnya, Indonesia dengan sistem nilai tukar mengambang, dan ada pihak yang ingin menciptakan kekacauan di Indonesia, dapat menggunakan rupiah untuk mewujudkan ambisinya tersebut dengan cara membeli dollar secara besar- besaran dan terus-menerus menggunakan rupiah yang akan mendorong rupiah melemah, dengan catatan pihak lain selaku pelaku di pasar valas mendukung hal ini, akibatnya BI akan kesulitan menjaga kestabilan nilai rupiah dan inflasi akan meningkat karena bahan baku yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dibeli dalam dollar.

Peningkatan inflasi akan diikuti oleh peningkatan suku bunga untuk menarik dana masyarakat melalui tabungan dan deposito guna mengurangi jumlah uang beredar dimasyarakat yang akan mengurangi laju inflasi dan mendorong rupiah keposisi yang diharapkan (rupiah menguat terhadap dollar). Disisi lain, peningkatan suku bunga akan menyebabkan pelaku ekonomi enggan untuk memohon kredit dan lebih cendrung untuk menginvestasikan dananya di bank, akibatnya sektor riil tidak berjalan, pengangguran tidak terserap, sehingga tingkat kriminalitas.

E. Dampak Sistem Ekonomi Kapitalisme

Menurut Studi Kasus: “Krisis Finansial Global” Interkoneksi sistem bisnis global yang saling terkait, membuat ‘efek domino’

krisis yang berbasis di Amerika Serikat ini, dengan cepat dan mudah menyebar ke berbagai negara di seluruh penjuru dunia. Tak terkecualikan Indonesia. Krisis keuangan yang berawal dari krisis subprime mortgage itu merontokkan sejumlah lembaga keuangan AS. Pemain-pemain utama Wall Street berguguran, termasuk Lehman Brothers dan Washington Mutual, dua bank terbesar di AS. Para investor mulai kehilangan kepercayaan, sehingga harga-harga saham di bursa-bursa utama dunia pun rontok.

Menurut Direktur Pelaksana IMF Dominique Strauss-Kahn di Washington, seperti dikutip AFP belum lama ini, resesi sekarang dipicu pengeringan aliran modal. Ia menaksir akan terdapat kerugian sekitar 1,4 triliun dolar AS pada sistem perbankan global akibat kredit macet di sektor perumahan AS. "Ini lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya sebesar 945 miliar dolar AS,". Hal ini menyebabkan sistem perbankan dunia saling enggan mengucurkan dana, sehingga aliran dana perbankan, urat nadi perekonomian global, menjadi macet. Hasil analisis Dana Moneter Internasional (IMF) pekan lalu mengingatkan, krisis perbankan memiliki kekuatan yang lebih besar untuk menyebabkan resesi. Penurunan pertumbuhan setidaknya dua kuartal berturut-turut sudah bisa disebut sebagai resesi.

Sederet bank di Eropa juga telah menjadi korban, sehingga pemerintah di Eropa harus turun tangan menolong dan mengatasi masalah perbankan mereka. Pemerintah Belgia, Luksemburg, dan Belanda menstabilkan Fortis Group dengan menyediakan modal 11,2 miliar euro atau sekitar Rp155,8 triliun untuk meningkatkan solvabilitas dan likuiditasnya. Fortis, bank terbesar kedua di Belanda dan perusahaan swasta terbesar di Belgia, memiliki 85.000 pegawai di seluruh dunia dan beroperasi di 31 negara, termasuk Indonesia. Ketiga pemerintah itu memiliki 49 persen saham Fortis. Fortis akan menjual kepemilikannya di ABN AMRO yang dibelinya tahun lalu kepada pesaingnya, ING. Pemerintah Jerman dan konsorsium perbankan, juga berupaya menyelamatkan Bank Hypo Real Estate, bank terbesar pemberi kredit kepemilikan rumah di Jerman.

Kementerian Keuangan Inggris, menasionalisasi bank penyedia KPR, Bradford & Bingley, dengan menyuntikkan dana 50 miliar poundsterling atau Rp864 triliun. Pemerintah juga harus

membayar 18 miliar poundsterling untuk memfasilitasi penjualan jaringan cabang Bradford & Bingley kepada Santander, bank Spanyol yang merupakan bank terbesar kedua di Eropa. Bradford & Bingley merupakan bank Inggris ketiga yang terkena dampak krisis finansial AS setelah Northern Rock dinasionalisasi Februari lalu dan HBOS yang dilego pemiliknya kepada Lloyds TSB Group. Dengan menggunakan analisis “stakeholder”, kita dapat melihat bahwa krisis finansial global yang dimulai dari AS, sesungguhnya merupakan akibat dari ketidakseimbangan pembangunan ekonomi yang berlebihan di SEKTOR FINANSIAL dibandingkan SEKTOR RIIL yang berakar dari sistem moneter buatan The Fed. Padahal secara inheren sektor finansial ini sudah bersifat inflatif, karena mengandalkan keuntungannya pada system riba dan bukan karena produktivitas yang riil (yang disebabkan karena kerja, kreativitas dan pemikiran). Cara populer untuk mengatasi krisis ini, karenanya, jelas dengan memberikan energi yang lebih besar pada sektor riil sebagaimana yang pernah dilakukan Presiden AS Roosevelt bersama penasihat ekonominya yang terkenal John Maynard Keynes untuk membangun secara massif infrastruktur sektor riil pasca terjadinya depresi besar di AS, di tahun 1930-an.

Secara implisit, gambaran di atas juga menunjukkan bahwa tinggi-rendahnya dampak krisis finansial yang terjadi di AS maupun di luar AS, sangat ditentukan oleh peran dari masing-masing pemangku kepentingan atau “stakeholders” tadi. Pemerintah di luar AS bisa saja meminimalisir dampak krisis bila melakukan “imunisasi” atau “proteksi” yang perlu serta mengantisipasinya dengan melakukan pembangunan sector riil dan peningkatan kesejahteraan publik secara masif kapitalisme juga gagal, dan setelah sekian waktu, kini sampai pada kehancuran. Itu karena kapitalisme telah menjadikan individu, perusahaan dan institusi berhak memiliki apa yang menjadi milik umum, seperti minyak, gas, semua bentuk energi dan industri senjata berat sampai radar. Sementara negara tetap berada di luar pasar dari semua kepemilikan tersebut. Itu merupakan konsekuensi dari ekonomi pasar bebas, privatisasi dan globalisasi. Hasilnya adalah goncangan secara beruntun dan kehancuran dengan cepat, dimulai dari pasar modal menjalar ke sektor lain, dan dari institusi keuangan menjalar ke yang lain.

Dari berbagai analisa para ekonomi dapat disimpulkan, bahwa teori ekonomi telah mati karena beberapa alasan. Pertama, teori ekonomi Barat (kapitalisme) telah menimbulkan ketidakadilan ekonomi yang sangat dalam, khususnya karena sistem moneter yang hanya menguntungkan Barat melalui hegemoni mata uang kertas dan sistem ribawi. Kedua, Teori ekonomi kapitalisme tidak mampu mengentaskan masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Ketiga, paradigmanya tidak mengacu kepada kepentingan masyarakat secara menyeluruh, sehingga ada dikotomi antara individu, masyarakat dan negara. Keempat, teori ekonominya tidak mampu menyelaraskan hubungana antara negara-negara di dunia, terutama antara negara-negara maju dan negara berkembang. Kelima, terlalaikannya pelestarian sumber daya alam.

F. Bagaimana Indonesia Menghadapi Globalisasi

Dalam diskusi-diskusi kita sering mendengar istilah industrialisasi substitusi impor (ISI) dan industrialisasi orientasi ekspor (IOE). Keduanya digambarkan sebagai strategi industrialisasi yang dikembangkan oleh Negara. Strategi pertama (substitusi impor) berlangsung sejak tahun 1970-an, saat pemerintah menggarap habis-habisan sumber daya minyak dan gas bumi. Pendapatan dari sektor ini begitu besar sehingga pemerintah dapat menghidupkan banyak kegiatannya tanpa perlu pinjam uang (hutang) atau dapat bantuan dari negara lain. Bagi yang sudah besar di tahun 1970-an mungkin masih ingat betapa susahny menemukan barang-barang impor untuk kebutuhan sehari-hari seperti sepatu, baju, dan sebagainya. Sekarang sepatu Nike bukan barang langka lagi di pasaran, walau tetap tidak terjangkau oleh kebanyakan teman-teman. Nah, strategi ini berubah di tahun 1980-an, saat pendapatan dari minyak dan gas bumi ini jauh menurun. Hal ini terlibat dari ramai-ramainya pejabat pemerintah (sampai Presiden Soeharto sendiri) bicara soal perlunya ekspor non-migas. Ketika menyusun strategi industrialisasi itu, pemerintah tidak sendirian. Ada banyak penasehat, terutama yang berasal dari Negara dan lembaga donor, seperti Amerika Serikat dan Jepang serta Bank Duma dan IMF. Saat dicanangkan strategi ekspor, pemerintah tidak punya banyak pilihan. Selama ini andalan

ekonominya adalah minyak dan gas bumi. Industri manufaktur hanya sedikit saja, dan infrastrukturnya terlalu lemah untuk menjadi sebuah wilayah industri baru. Karena itu pemerintah lalu membuka Indonesia bagi penanaman modal asing, yang diharapkan dapat membantu mengembangkan dunia industri. Sejak tahun 1980-an mulailah dibangun pabrik dan kemudian wilayah industri (Tangerang, Bogor, Bekasi di Jawa bagian Barat; Gerabang kertasusila di Jawa Timur, dan lainnya) di seluruh Indonesia yang mencapai puncaknya pada tahun 1990an ini. Kembali ke contoh sepatu, bersamaan dengan itu kita juga melihat banjirnya pasaran dengan barang-barang 'luar negeri' seperti Nike, Reebok, dan merk-merk lainnya.

Sejak tahun 1990 kita mencatat gelombang pemogokan yang maikn besar di seluruh Indonesia. Sekarang ini pemogokan sudah bukan barang aneh bagi buruh di Indonesia. Hampir setiap hari ada berita di media masa tentang buruh mogok diberbagai pabrik dan daerah. Tuntutan umumnya kenaikan upah dan kesejahteraan.

Dalam industri ada tiga hal penting: modal, bahan mentah dan tenaga kerja. Kalau modal jelas Indonesia tidak punya. Di tahun 1980-an belum ada pengusaha- pengusaha mentereng (konglomerat) seperti Liem Sioe Liong, kelompok Bimantra, Bakrie Brothers, Lamtoro Gung Persada, Sudwikatmono, dan sebagainya. Mereka sudah mulai bisnis tapi masih kecil, dan (sampai sekarang) belum ada apa-apanya dibandingkan TNC dari Amerika Serikat (Exxon, Caltex, Freeport) atau Jepang (Toyota, Mitsubishi). Yang berduit di jaman itu adalah pemerintah sebagai pengelola Pertamina, beberapa orang yang sudah lama menjadi pengusaha dan orang-orang yang pegang lisensi menggarap sumber daya alam, seperti hutan dan lainnya. Jadi, belum terbentuk kumpulan pemilik modal yang kuat. Bahan mentah, Indonesia cukup kaya, tapi indusri yang mengolah bahan itu belum banyak berdiri. Bahan mentah itu juga kebanyakan hasil tambang dan hutan, itupun terbatas. Sementara itu industri berorientasi ekspor itu membutuhkan bahan mentah yang beragam, bukan hanya hasil tambang dan hutan. Jadi, dari segi bahan mentahpun belum cukup. Nah, kalau tenaga kerja, jumlahnya seabrek-abrek. Penduduk Indonesia jumlahnya saat itu 175 juta orang dan 70% berada dalam usia angkatan kerja. Banyak di antara penduduk ini menganggur

karena tidak ada lowongan kerja. Dan ini oleh ahli-ahli ekonomi disebut sebagai 'keunggulan komparatif' karena tenaga kerja di negara-negara lain, harganya sudah sangat mahal. Pada tahun 1970-an juga tidak ada serikat atau organisasi buruh yang mengurus upah, jadi tingkatan upah (sampai sekarang) ditentukan sepihak oleh pemerintah. Kalau ada pihak lain yang didengar maka itu adalah usaha yang berkepentingan sekali mendapat tenaga kerja murah.

Nah, berdirilah industri Indonesia yang bersandar pada buruh murah dan sedikit bahan mentah. Sejak itu beramai-ramai pengusaha internasional datang ke Indonesia, menanam modalnya, mendirikan pabrik, dan merekrut buruh. Beberapa pengusaha dalam negeri ikut memanfaatkan kesempatan ini dengan mendirikan perusahaannya sendiri atau kalau modalnya tidak cukup mendirikan perusahaan patungan (*joint-venture*). Ini berlaku khususnya untuk industri manufaktur yang belum banyak dikembangkan pada masa itu. Industri tambang seperti Freeport di Irian Jaya dan pengeboran minyak sudah lama dipegang oleh perusahaan asing. Mereka bahkan mendapat fasilitas khusus dengan sistem bagi hasil yang mirip dengan sistem produksi di zaman colonial. Di samping itu ada beberapa sektor industri yang dilindungi oleh negara, karena sifatnya strategis dan penting bagi masyarakat.



BAB
8

PASAR BEBAS

A. Pengertian, Ciri Dan Kelemahan Pasar Bebas

Pasar Bebas adalah Kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau mengganggu ekspor. Kebijakan perdagangan bebas tidak selalu berarti bahwa pemerintah meninggalkan semua kontrol dan pajak impor dan ekspor, melainkan bahwa menahan diri dari tindakan yang khusus dirancang untuk menghambat perdagangan internasional, seperti hambatan tarif, pembatasan mata uang, dan kuota impor.

Ciri-ciri

1. Semua sumber produksi adalah milik masyarakat individu.
2. Masyarakat diberi kebebasan dalam memiliki sumber-sumber produksi.
3. Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi.
4. Masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pemilik sumber daya produksi dan masyarakat pekerja (buruh).
5. Timbul persaingan dalam masyarakat, terutama dalam mencari keuntungan.
6. Kegiatan selalu mempertimbangkan keadaan pasar.
7. Pasar merupakan dasar setiap tindakan ekonomi.
8. Biasanya barang-barang produksi yang dihasilkan bermutu tinggi. Keuntungan

9. Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi, karena masyarakat tidak perlu lagi menunggu perintah/komando dari pemerintah.
10. Setiap individu bebas memiliki untuk sumber-sumber daya produksi, yang nantinya akan mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian.
11. Timbul persaingan semangat untuk maju dari masyarakat.
12. Menghasilkan barang-barang bermutu tinggi, karena adanya persaingan antar masyarakat.
13. Efisiensi dan efektivitas tinggi, karena setiap tindakan ekonomi didasarkan motif mencari keuntungan.

Kelemahan

1. Terjadinya persaingan bebas yang tidak sehat.
2. Masyarakat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.
3. Banyak terjadinya monopoli masyarakat.
4. Banyak terjadinya gejala dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu.

B. Negara APEC Siap Wujudkan Perdagangan Bebas

Para pemimpin Asia-Pasifik mengesahkan cetak biru (blue print) untuk pertumbuhan ekonomi kawasan di masa depan. Cetak biru itu diharapkan mendorong perjanjian perdagangan bebas dan mengkaji kembali langkah-langkah proteksi selama krisis keuangan. Dalam pertemuan tahunan negara-negara Asia-Pasifik untuk Kerja Sama Ekonomi (APEC) di Yokohama, Jepang 13-14 November 2010 tersebut, para pemimpin dari 21 negara ekonomi mengesampingkan perbedaan atas kebijakan mata uang untuk komitmen yang kuat bagi meningkatkan perdagangan dan investasi. Para pemimpin negara yang mewakili Amerika Serikat, China, Jepang, Rusia, dan negara regional lainnya juga sepakat tentang perlunya untuk mengurangi ketidakseimbangan perdagangan dan utang pemerintah, sehingga

berpotensi mengganggu fluktuasi nilai tukar. Meski demikian, sejumlah peserta tetap berselisih atas kebijakan mata uang dan isu-isu lain. Mereka lebih menyepakati peran penting perdagangan yang lebih bebas dalam memicu pertumbuhan.

Tepat tanggal 1 Januari 2010 mulai diberlakukan FreeTrade Agreement (FTA/Perjanjian Perdagangan Bebas) ASEAN-China. Negara-begara ASEAN yang termasuk yaitu : Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunai, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, Thailand, dan Myanmar. Adapun hasil kesepakatannya yaitu bea masuk produk manufaktur China ke ASEAN, termasuk Indonesia, ditetapkan maksimal 5 persen, sedangkan di sektor pertanian 0 persen tanpa pajak sama sekali. Kerangka kerja sama FTA ASEAN-China sebenarnya telah disepakati pada tahun 2002 di masa pemerintahan Megawati dan baru dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2010. Namun baru akhir penghujung tahun 2009 ini Indonesia menyuarakan keberatannya.

Untuk pasar bebas 2010 ini, produk dari China yang akan membanjiri pasar Indonesia yaitu komoditas pertanian seperti buah-buahan, gula dan bahkan beras sampai dengan produk industri manufaktur seperti tekstil, mainan, dan elektronik akan memasuki Indonesia dengan murah dan tentu saja kualitasnya tidak berbeda dengan produk lokal. Apalagi China sudah memasok kebutuhan yang dicari konsumen Indonesia kedepannya. Hal ini akan mematikan industri kecil menengah (IKM) dan kawasan ekonomi dan industri akan terancam bubar. Produk kita akan kalah di negeri sendiri. Di lokal saja kita sudah kalah, apalagi kita mau mengadakan impor ke China. Akibatnya akan berpengaruh terhadap perekonomian bangsa ini. Ada yang menarik mengapa China bisa menjual produk dengan harga yang bersaing. Hal ini dikarenakan China bukan saja cuma menjadi produsen skala besar, tetapi juga telah membangun sebuah jaringan perdagangan yang kuat dan terpadu di seluruh dunia. Selain itu upah buruh murah dan industri produk massal yang sudah terotomatisasi meningkatkan kemampuan produksi. Prinsip dari orang-orang China, "untung sedikit tidak apa-apa, asalkan dagangan bisa cepat laku dan kontinu". juga telah menanamkan tingkat perputaran uang yang cepat.

C. Pro Kontra Pasar Bebas

Kita tidak bisa menghindari dari pasar bebas tersebut, namun seharusnya pemerintah juga harus melindungi industri lokal dalam negeri. Kebijakan-kebijakan yang menguntungkan industri lokal juga harus dikeluarkan, investor diundang dan ditingkatkan, dan tentu saja bagi kita sebagai warga negara Indonesia kita harus menanamkan sikap untuk selalu menggunakan produk dalam negeri karena sebenarnya produk kita tidak kalah dengan produk asing, dan tentu saja akan membantu perekonomian negara kita. Sejak 1 Januari 2010 lalu, Kesepakatan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ASEAN-China Free Trade Agreement) atau biasa disingkat FTA ASEAN-China resmi diberlakukan. Terhitung mulai tanggal tersebut, barang-barang dari negara China bebas masuk ke pasar seluruh negara ASEAN, demikian pula sebaliknya. Persetujuan perdagangan bebas tersebut ditandatangani berlandaskan semangat negara anggota untuk meningkatkan perekonomian bersama di kawasan ASEAN. Sebagai salah satu negara anggota ASEAN, suka atau tidak suka, Indonesia harus mematuhi dan melaksanakan kesepakatan tersebut. Bagaimanapun, sebuah kesepakatan yang secara aklamasi didukung oleh mayoritas anggota ASEAN, mustahil dapat ditolak atau dibatalkan oleh salah satu negara anggota. Dengan bahasa yang lebih sederhana, bagi Indonesia penerapan Kesepakatan Perdagangan Bebas ASEAN-China adalah sebuah keniscayaan.

Pro dan kontra memang mewarnai penerapan FTA di Indonesia. Berbagai kalangan menuntut agar FTA diundur atau ditinjau ulang. Alasan yang disampaikan, sebagian besar para pelaku ekonomi di Indonesia dinilai belum siap untuk terjun ke pasar bebas. Jika dipaksakan masuk pasar bebas, bisa-bisa para pelaku ekonomi dalam negeri, terutama pengusaha kecil dan menengah, gulung tikar karena tidak mampu menghadapi persaingan dengan China. Sementara yang lain menyatakan penerapan FTA ASEAN-China justru akan memicu perkembangan industri dan ekonomi dalam negeri. Di atas kertas, industri di negara-negara ASEAN memang kalah kuat dibanding China. Jika diadu secara head-to-head di pasar bebas, bukan tidak mungkin negara-negara ASEAN akan mengalami defisit dan China mengalami surplus. Hal ini terjadi karena produk China terkenal

murah, berkualitas bagus, serta unggul dari segi kuantitas. Sebelum FTA diteken pun barang-barang asal China sudah menguasai pasar ASEAN. Oleh karena itu, banyak pihak khawatir pasca kesepakatan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China barang-barang buatan China akan semakin membanjir. Namun jika ditelaah lebih dalam, pemberlakuan FTA sejatinya akan membawa dampak positif bagi perkembangan industri negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Dengan adanya FTA, daya saing industri dalam negeri dengan sendirinya akan semakin terdongkrak. Untuk mengalahkan China, mau tak mau, industri dalam negeri harus dipacu untuk menghasilkan produk yang berkualitas namun harganya murah. Caranya tentu saja dengan mengedepankan uji kendali mutu, standarisasi produk, serta menerapkan efektivitas dan efisiensi secara ketat dalam proses produksi dan distribusi barang. Selain itu, pemerintah bersama kalangan industri juga harus menggenjot pertumbuhan industri kecil dan menengah yang memproduksi barang-barang berkarakter lokal dan khas seperti produk kerajinan dan kriya.

Harus diakui, selama ini proses produksi barang di Indonesia masih belum efisien. Banyaknya biaya siluman (*over head cost*) baik dalam pengadaan bahan baku, proses produksi di pabrik, maupun distribusi, membuat harga barang menjadi tinggi namun kualitasnya pas-pasan. Hal ini terjadi karena konsumen harus mensubsidi uang yang telah dikeluarkan produsen dengan membayar lebih tinggi dari yang seharusnya dibayar. Jika berbagai biaya siluman tersebut dapat dipangkas, niscaya industri dalam negeri dapat menghasilkan produk bermutu tinggi dengan harga yang lebih murah. Produk semacam inilah yang dapat bersaing dengan produk buatan China. Di sisi lain, produk berkarakter lokal yang bercorak khas sejatinya memiliki kemampuan bersaing lebih tinggi di tengah persaingan pasar bebas, dibandingkan dengan produk berkarakter global. Produk kerajinan bernuansa etnik misalnya, selalu laku di pasaran. Sifat unik dan khas dari produk ini membuat negara lain tidak bisa memproduksi barang sejenis. Sayangnya selama puluhan tahun, produk-produk semacam ini tidak dikembangkan sebagai penyangga ekspor nasional.

D. Sikap Beberapa Negara Dalam Perdagangan Bebas

Terlepas dari pro dan kontra yang terjadi, kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-China tetap memunculkan harapan dan peluang bagi bangsa Indonesia untuk mengambil manfaatnya. Tentu saja dengan catatan, asal dunia usaha di Tanah Air memahaminya sebagai keniscayaan yang harus dihadapi dengan efisiensi besar-besaran dalam proses produksi dan distribusi komoditas perdagangan. Rumusnya memang hanya satu, berubah atau mati. Jika dunia usaha kita mau berubah, niscaya FTA akan menjadi peluang yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia untuk terus tumbuh dan berkembang. Akan tetapi jika kita terus bertahan dengan pola-pola produksi lama yang boros dan tidak efisien, FTA akan menjadi momok yang menakutkan. Bahkan tak mustahil FTA akan memurukkan perekonomian kita dalam waktu singkat. Pilihan semua ada di tangan kita. Kini adalah saatnya bertindak, bukan berwacana. Bagaimanapun, kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-China telah diterapkan. Tidak ada waktu lagi bagi Indonesia untuk menghiba dan memohon agar kesepakatan itu ditunda. Langkah terbaik adalah menerima kesepakatan itu dengan lapang dada, sembari melakukan perbaikan-perbaikan internal agar dunia usaha kita siap menghadapi persaingan di tingkat regional maupun global. Reaksi terhadap pertemuan APEC di Filipina beragam. Beberapa negara anggota, tentu saja termasuk tuan rumah Filipina, menganggap pertemuan tersebut sukses. Lebih dari itu, hasil substantif juga mereka anggap sangat positif. Reaksi yang sangat berbeda datang dari negara anggota lain, termasuk AS. Mereka beranggapan bahwa tidak banyak kemajuan yang dicapai dari pertemuan itu. Walaupun soal liberalisasi teknologi informasi (yang diusulkan AS) akhirnya disepakati, tidak ada komitmen keharusan bagi semua negara anggota untuk mentaatinya. Semua mendapat payung kata “fleksible” yang dalam kenyataan artinya tidak mengikat. Jadi, dalam soal inipun secara substantif pertemuan APEC di Filipina tidak memberi hasil yang terlalu banyak.

Dibandingkan dengan beberapa pertemuan sebelumnya, pertemuan kali ini memang sekedar melanjutkan rencana yang disepakati sebelumnya, dari Seattle, Bogor, dan Osaka. Bedanya, kali ini tiap negara harus mengajukan Individual Action Plan (IAP),

dan ternyata sebagian besar, termasuk Indonesia, mengusulkan hal hal yang tidak baru. Misalnya, dalam IAP yang diusulkan Indonesia tarif yang saat ini masih lebih dari 20% akan diturunkan sampai maksimum 20% tahun 1998, dan maksimum 10% tahun 2003. Sedangkan untuk yang saat ini tarifnya 20% atau kurang, akan diturunkan menjadi maksimum 5% pada tahun 2000. Ini persis sama dengan apa yang dicanangkan di Osaka. Negara anggota lain juga melakukan hal serupa. Bahkan Jepang mundur selangkah dari komitmen Osaka, dengan merubah tarif maksimum dari 5% menjadi 10%. Australia juga tergolong mengecewakan.

Bagi dunia pers, hal ini tidak terlalu menggembirakan, karena tidak ada berita yang “sexy.” Lihat saja pemberitaan di media masa. Di AS pemberitaan tentang APEC sangat minim, bahkan ada satu atau dua justeru menyimpulkan opini skeptis tentang APEC. Di media Asia, kecuali tuan rumah Filipina, pemberitaan APEC juga datar datar saja. Kalau di Singapura agak banyak, hal itu karena mereka berkepentingan untuk mengkaitkan prinsip perdagangan bebas APEC dengan WTO yang akan mengadakan pertemuan puncaknya bulan depan di Singapura. Secara substantif, berita di negara itu lebih mendalam tentang pertemuan WTO bulan depan, bukan tentang APEC sendiri.

Apakah memang negara anggota mulai skeptis dengan APEC? Ataukah mereka makin kurang percaya dengan prinsip perdagangan bebas?

Kawasan Pasifik, dan dunia pada umumnya, memang ternyata belum siap dengan sistem perdagangan bebas dalam arti yang sebenarnya. Di Eropa semua sibuk dengan upaya memenuhi persyaratan Maastricht, dan banyak yang percaya bahwa perjalanan mereka masih jauh. Secara diam diam pejabat European Union (EU) yang aktif dalam pertemuan di Jenewa baru baru ini mengakui bahwa beberapa negara anggota EU menganggap negosiator mereka di Uruguay Round terlalu berani dengan usulan penurunan tarif. Di bidang pertanian, kita tahu Jepang dan Korea mati-matian menolak membuka pasar beras mereka. Korea hanya mau janji membuka secara bertahap mulai tahun 2010. Apa kita yakin tahun 2010 nanti benar benar beras impor bisa masuk Korea? Rasanya tidak. Di AS

suara publik makin tidak menghiraukan APEC. Paling-paling hanya lingkungan Dupont circle dan sebagian kecil inside the belt way. Disamping persoalan dalam negeri mereka yang makin menuntut sikap proteksionis, pada akhirnya apa yang dikuatirkan beberapa pengamat sosial di awal pembentukan APEC mungkin memang benar benar terjadi. Kekuatiran mereka berkaitan dengan perbedaan sistem nilai antar-anggauta. Singkatnya, nilai barat bertemu dengan nilai timur. Hal ini tidak mungkin kata mereka. Sebaliknya, para pendukung APEC berseloroh, perbedaan sistem nilai tidak penting sejauh manfaat ekonomi dan bisnis dapat diperoleh. Memang, pendapat ini banyak benarnya, tapi tetap ada batasnya. Di saat sistem nilai mulai di permasalahan dan dikaitkan dengan kebijakan perdagangan (misalnya soal hak buruh, hak asasi, lingkungan, individualisme dll), maka ceritanya bisa lain.

Baru baru ini, guru besar Harvard yang kesohor dan banyak didengar pendapatnya, Samuel Huntington, bahkan mengatakan bahwa sebaiknya negara barat (AS dan Eropa) kembali ke “asal” nya dengan memperkuat integrasi ekonomi dan politik antar-mereka, bukan dengan bangsa lain seperti Asia dan Amerika Latin. Yang lebih “mengerikan”, dia menutup pendapatnya dengan kalimat berikut:

“Neither globalism nor isolationism, neither multilateralism nor unilateralism will best serve American interests. Its interest will be most effectively advanced if AS eschews those extremes and instead adopts an Atlanticist policy of close cooperation with its European partners, one that will protect and promote the interests, values, and culture of the precious and unique civilization they share.”

Dalam praktik perdagangan bebas, AS sebenarnya juga tergolong macan kertas. Dari posisinya yang keras menuntut liberalisasi sektor pertanian, yang sangat ditentang oleh Eropa, mereka akhirnya tunduk juga pada EU. Perubahan posisi ini yang kemudian membuat Putaran Uruguay berhasil diselesaikan tahun 1994. Tapi, prinsip perdagangan bebas jelas dikorbankan, apapun alasannya. Sebenarnya, tekanan dalam negeri AS berada di belakang pelunakan sikap tersebut. Suatu pasal dalam undang undang pertanian AS yang dikeluarkan baru baru ini dengan tegas menyebutkan bahwa “tidak semua sektor

pertanian siap untuk masuk ke pasar bebas". Di bidang jasa pun sama saja. AS tidak berniat untuk menciptakan perdagangan bebas di sektor jasa; yang mereka inginkan hanya akses pasar yang lebih besar bagi industri jasa mereka. Lalu masih ada cerita lama tentang lobi buruh industri di AS yang terpukul oleh produk impor dari negara berkembang. Suara "Buchanan" tetap kuat dan masih mempunyai pengikut setia di AS. Amerika Latin mempunyai cerita yang tidak berbeda. Walaupun sudah ada FTAA dan Mercosur, banyak negara anggota yang tidak terlalu bersemangat. Ambil contoh Brasil. Dengan defisit perdagangan yang makin besar, mudah dimengerti mengapa mereka cenderung menanggukuhkan ide pasar bebas. Satu per-satu negara di kawasan ini mulai memasuki masa sulit lagi setelah tanda-tanda kebangkitan sempat muncul di awal tahun 1990an. Bahkan rising star Chile juga mulai kesulitan.

Di kawasan Asia Pasifik, pada awal 1990an semua bersemangat dengan perdagangan bebas, dan sejumlah statistik klasik selalu dipaparkan untuk menunjukkan dampak positif dari peningkatan perdagangan di kawasan ini. AFTA dan APEC kemudian lahir. Namun, setelah banyak negara anggota mengalami kesulitan neraca pembayaran, tindakan mengurangi impor mulai diterapkan. Sekali lagi prinsip perdagangan bebas dikorbankan demi kepentingan nasional. Malaysia melakukannya, Thailand juga serupa, dan Indonesia tidak mau ketinggalan. Baru-baru ini menteri keuangan Marie Muhammad memprediksi defisit neraca berjalan kita dapat mencapai 4% GDP tahun ini, lalu dibumbui dengan pernyataan bahwa kenaikan impor merupakan biang keladinya. Singkat kata, semua mau mendorong ekspor, tapi semua juga mau membatasi impor.

Harus diakui dunia memang belum siap dengan sistem perdagangan bebas. Sistem itu tetap menjadi favorit, didengungkan berkali-kali di setiap pertemuan, namun kalau sudah sampai tahap praktek (action), mereka cenderung berjalan di tempat. Mungkin faktor ini yang menyebabkan IAP di pertemuan APEC baru-baru ini tidak mengundung hal-hal yang baru. Reaksi terhadap pertemuan APEC di Filipina beragam. Beberapa negara anggota, tentu saja termasuk tuan rumah Filipina, menganggap pertemuan tersebut sukses. Lebih dari itu, hasil substantif juga mereka anggap sangat positif. Reaksi

yang sangat berbeda datang dari negara anggota lain, termasuk AS. Mereka beranggapan bahwa tidak banyak kemajuan yang dicapai dari pertemuan itu. Walaupun soal liberalisasi teknologi informasi (yang diusulkan AS) akhirnya disepakati, tidak ada komitmen keharusan bagi semua negara anggota untuk mentaatinya. Semua mendapat payung kata “fleksible” yang dalam kenyataan artinya tidak mengikat. Jadi, dalam soal ini pun secara substantif pertemuan APEC di Filipina tidak memberi hasil yang terlalu banyak.



BAB
9

GLOBALISASI DAN BUDAYA

Wacana globalisasi sebagai sebuah proses ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga ia mampu mengubah dunia secara mendasar. Komunikasi dan transportasi internasional telah menghilangkan batas-batas budaya setiap bangsa. Kebudayaan setiap bangsa cenderung mengarah kepada globalisasi dan menjadi peradaban dunia sehingga melibatkan manusia secara menyeluruh. Simon Kemoni, sosiolog asal Kenya mengatakan bahwa globalisasi dalam bentuk yang alami akan meninggikan berbagai budaya dan nilai-nilai budaya. Dalam proses alami ini, setiap bangsa akan berusaha menyesuaikan budaya mereka dengan perkembangan baru sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan dan menghindari kehancuran. Tetapi, menurut Simon Kimoni, dalam proses ini, negara-negara harus memperkokoh dimensi budaya mereka dan memelihara struktur nilai-nilainya agar tidak dieliminasi oleh budaya asing. Dalam rangka ini, berbagai bangsa haruslah mendapatkan informasi ilmiah yang bermanfaat dan menambah pengalaman mereka. Terkait dengan seni dan budaya, Seorang penulis asal Kenya bernama Ngugi Wa Thiong'o menyebutkan bahwa perilaku dunia Barat, khususnya Amerika seolah-olah sedang melemparkan bom budaya terhadap rakyat dunia. Mereka berusaha untuk menghancurkan tradisi dan bahasa pribumi sehingga bangsa-bangsa tersebut kebingungan dalam upaya mencari identitas budaya nasionalnya. Penulis Kenya ini meyakini bahwa budaya asing yang berkuasa di berbagai bangsa, yang dahulu dipaksakan melalui imperialisme, kini dilakukan dalam bentuk yang lebih luas dengan nama globalisasi.

A. Globalisasi Dalam Kebudayaan Tradisional Di Indonesia

Proses saling mempengaruhi adalah gejala yang wajar dalam interaksi antar masyarakat. Melalui interaksi dengan berbagai masyarakat lain, bangsa Indonesia ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang mendiami nusantara (sebelum Indonesia terbentuk) telah mengalami proses dipengaruhi dan mempengaruhi. Kemampuan berubah merupakan sifat yang penting dalam kebudayaan manusia. Tanpa itu kebudayaan tidak mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang senantiasa berubah.

B. Perubahan Budaya Dalam Globalisasi

Perubahan budaya yang terjadi di dalam masyarakat tradisional, yakni perubahan dari masyarakat tertutup menjadi masyarakat yang lebih terbuka, dari nilai-nilai yang bersifat homogen menuju pluralisme nilai dan norma sosial merupakan salah satu dampak dari adanya globalisasi. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dunia secara mendasar. Komunikasi dan sarana transportasi internasional telah menghilangkan batas-batas budaya setiap bangsa. Kebudayaan setiap bangsa cenderung mengarah kepada globalisasi dan menjadi peradaban dunia sehingga melibatkan manusia secara menyeluruh. Misalnya saja khusus dalam bidang hiburan massa atau hiburan yang bersifat massal, makna globalisasi itu sudah sedemikian terasa. Sekarang ini setiap hari kita bisa menyimak tayangan film di tv yang bermula dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea, dan lain-lain melalui stasiun televisi di tanah air. Belum lagi siaran tv internasional yang bisa ditangkap melalui parabola yang kini makin banyak dimiliki masyarakat Indonesia. Sementara itu, kesenian-kesenian populer lain yang tersaji melalui kaset, vcd, dan dvd yang berasal dari manca negara pun makin marak kehadirannya di tengah-tengah kita. Fakta yang demikian memberikan bukti tentang betapa negara-negara penguasa teknologi mutakhir telah berhasil memegang kendali dalam globalisasi budaya khususnya di negara ke tiga. Peristiwa transkultural seperti itu mau tidak mau akan berpengaruh terhadap keberadaan kesenian kita. Padahal kesenian tradisional kita merupakan bagian dari khasanah kebudayaan nasional yang perlu dijaga kelestariannya.

Di saat yang lain dengan teknologi informasi yang semakin canggih seperti saat ini, kita disuguhi oleh banyak alternatif tawaran hiburan dan informasi yang lebih beragam, yang mungkin lebih menarik jika dibandingkan dengan kesenian tradisional kita. Dengan parabola masyarakat bisa menyaksikan berbagai tayangan hiburan yang bersifat mendunia yang berasal dari berbagai belahan bumi. Kondisi yang demikian mau tidak mau membuat semakin tersisihnya kesenian tradisional Indonesia dari kehidupan masyarakat Indonesia yang sarat akan pemaknaan dalam masyarakat Indonesia. Misalnya saja bentuk-bentuk ekspresi kesenian etnis Indonesia, baik yang rakyat maupun istana, selalu berkaitan erat dengan perilaku ritual masyarakat pertanian. Dengan datangnya perubahan sosial yang hadir sebagai akibat proses industrialisasi dan sistem ekonomi pasar, dan globalisasi informasi, maka kesenian kita pun mulai bergeser ke arah kesenian yang berdimensi komersial. Kesenian-kesenian yang bersifat ritual mulai tersingkir dan kehilangan fungsinya. Sekalipun demikian, bukan berarti semua kesenian tradisional kita lenyap begitu saja.

Ada berbagai kesenian yang masih menunjukkan eksistensinya, bahkan secara kreatif terus berkembang tanpa harus tertindas proses modernisasi. Pesatnya laju teknologi informasi atau teknologi komunikasi telah menjadi sarana difusi budaya yang ampuh, sekaligus juga alternatif pilihan hiburan yang lebih beragam bagi masyarakat luas. Akibatnya masyarakat tidak tertarik lagi menikmati berbagai seni pertunjukan tradisional yang sebelumnya akrab dengan kehidupan mereka. Misalnya saja kesenian tradisional wayang orang Bharata, yang terdapat di Gedung Wayang Orang Bharata Jakarta kini tampak sepi seolah-olah tak ada pengunjungnya. Hal ini sangat disayangkan mengingat wayang merupakan salah satu bentuk kesenian tradisional Indonesia yang sarat dan kaya akan pesan-pesan moral, dan merupakan salah satu agen penanaman nilai-nilai moral yang baik, menurut saya. Contoh lainnya adalah kesenian Ludruk yang sampai pada tahun 1980-an masih berjaya di Jawa Timur sekarang ini tengah mengalami “mati suri”. Wayang orang dan ludruk merupakan contoh kecil dari mulai terdepaknya kesenian tradisional akibat globalisasi.

Bisa jadi fenomena demikian tidak hanya dialami oleh kesenian Jawa tradisional, melainkan juga dalam berbagai ekspresi kesenian tradisional di berbagai tempat di Indonesia. Sekalipun demikian bukan berarti semua kesenian tradisional mati begitu saja dengan merebaknya globalisasi. Di sisi lain, ada beberapa seni pertunjukan yang tetap eksis tetapi telah mengalami perubahan fungsi. Ada pula kesenian yang mampu beradaptasi dan mentransformasikan diri dengan teknologi komunikasi yang telah menyatu dengan kehidupan masyarakat, misalnya saja kesenian tradisional “Ketoprak” yang dipopulerkan ke layar kaca oleh kelompok Srimulat.

Kenyataan di atas menunjukkan kesenian ketoprak sesungguhnya memiliki penggemar tersendiri, terutama ketoprak yang disajikan dalam bentuk siaran televisi, bukan ketoprak panggung. Dari segi bentuk pementasan atau penyajian, ketoprak termasuk kesenian tradisional yang telah terbukti mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Selain ketoprak masih ada kesenian lain yang tetap bertahan dan mampu beradaptasi dengan teknologi mutakhir yaitu wayang kulit. Beberapa dalang wayang kulit terkenal seperti Ki Manteb Sudarsono dan Ki Anom Suroto tetap diminati masyarakat, baik itu kaset rekaman pementasannya, maupun pertunjukan secara langsung. Keberanian stasiun televisi Indosiar yang sejak beberapa tahun lalu menayangkan wayang kulit setiap malam minggu cukup sebagai bukti akan besarnya minat masyarakat terhadap salah satu khasanah kebudayaan nasional kita. Bahkan Museum Nasional pun tetap mempertahankan eksistensi dari kesenian tradisional seperti wayang kulit dengan mengadakan pagelaran wayang kulit tiap beberapa bulan sekali dan pagelaran musik gamelan tiap satu minggu atau satu bulan sekali yang diadakan di aula Kertarajasa, Museum Nasional.

C. Pengaruh Globalisasi Terhadap Budaya Bangsa

Arus globalisasi saat ini telah menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan budaya bangsa Indonesia. Derasnya arus informasi dan telekomunikasi ternyata menimbulkan sebuah kecenderungan yang mengarah terhadap memudarnya nilai-nilai pelestarian budaya. Perkembangan 3T (Transportasi, Telekomunikasi, dan Teknologi)

mengkitabkan berkurangnya keinginan untuk melestarikan budaya negeri sendiri. Budaya Indonesia yang dulunya ramah-tamah, gotong royong dan sopan berganti dengan budaya barat, misalnya pergaulan bebas.

Di Tapanuli (Sumatera Utara) misalnya, duapuluh tahun yang lalu, anak-anak remajanya masih banyak yang berminat untuk belajar tari tor-tor dan tagading (alat musik batak). Hampir setiap minggu dan dalam acara ritual kehidupan, remaja di sana selalu diundang pentas sebagai hiburan budaya yang meriah. Saat ini, ketika teknologi semakin maju, ironisnya kebudayaan-kebudayaan daerah tersebut semakin lenyap di masyarakat, bahkan hanya dapat disaksikan di televisi dan Taman Mini Indonesi Indah (TMII). Padahal kebudayaan-kebudayaan daerah tersebut, bila dikelola dengan baik selain dapat menjadi pariwisata budaya yang menghasilkan pendapatan untuk pemerintah baik pusat maupun daerah, juga dapat menjadi lahan pekerjaan yang menjanjikan bagi masyarakat sekitarnya.

Hal lain yang merupakan pengaruh globalisasi adalah dalam pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar (bahasa juga salah satu budaya bangsa). Sudah lazim di Indonesia untuk menyebut orang kedua tunggal dengan Bapak, Ibu, Pak, Bu, Saudara, Anda dibandingkan dengan kau atau kamu sebagai pertimbangan nilai rasa. Sekarang ada kecenderungan di kalangan anak muda yang lebih suka menggunakan bahasa Indonesia dialek Jakarta seperti penyebutan kata gue (saya) dan lu (kamu). Selain itu kita sering dengar anak muda menggunakan bahasa Indonesia dengan dicampur-campur bahasa Inggris seperti OK, No problem dan Yes', bahkan kata-kata makian (umpatan) sekalipun yang sering kita dengar di film-film barat, sering diucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kata-kata ini disebarkan melalui media TV dalam film-film, iklan dan sinetron bersamaan dengan disembarkannya gaya hidup dan fashion.

Gaya berpakaian remaja Indonesia yang dulunya menjunjung tinggi norma kesopanan telah berubah mengikuti perkembangan jaman. Ada kecenderungan bagi remaja putri di kota-kota besar memakai pakaian minim dan ketat yang memamerkan bagian tubuh tertentu. Budaya berpakaian minim ini dianut dari film-film dan majalah-majalah luar negeri yang ditransformasikan kedalam

sinetron-sinetron Indonesia. Derasnya arus informasi, yang juga ditandai dengan hadirnya internet, turut serta `menyumbang` bagi perubahan cara berpakaian. Pakaian mini dan ketat telah menjadi trend dilingkungan anak muda. Salah satu keberhasilan penyebaran kebudayaan Barat ialah meluasnya anggapan bahwa ilmu dan teknologi yang berkembang di Barat merupakan suatu yang universal. Masuknya budaya barat (dalam kemasannya ilmu dan teknologi) diterima dengan `baik`. Pada sisi inilah globalisasi telah merasuki berbagai sistem nilai sosial dan budaya Timur (termasuk Indonesia) sehingga terbuka pula konflik nilai antara teknologi dan nilai- nilai ketimuran.

Peran kebijaksanaan pemerintah yang lebih mengarah kepada pertimbangan- pertimbangan ekonomi daripada cultural atau budaya dapat dikatakan merugikan suatu perkembangan kebudayaan. Jennifer Lindsay (1995) dalam bukunya yang berjudul '*Cultural Policy And The Performing Arts In South-East Asia*', mengungkapkan kebijakan kultural di Asia Tenggara saat ini secara efektif mengubah dan merusak seni- seni pertunjukan tradisional, baik melalui campur tangan, penanganannya yang berlebihan, kebijakan-kebijakan tanpa arah, dan tidak ada perhatian yang diberikan pemerintah kepada kebijakan kultural atau konteks kultural. Dalam pengamatan yang lebih sempit dapat kita melihat tingkah laku aparat pemerintah dalam menangani perkembangan kesenian rakyat, di mana banyaknya campur tangan dalam menentukan objek dan berusaha merubah agar sesuai dengan tuntutan pembangunan.

Dalam kondisi seperti ini arti dari kesenian rakyat itu sendiri menjadi hambar dan tidak ada rasa seninya lagi. Melihat kecenderungan tersebut, aparat pemerintah telah menjadikan para seniman dipandang sebagai objek pembangunan dan diminta untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan simbol-simbol pembangunan. Hal ini tentu saja mengabaikan masalah pemeliharaan dan pengembangan kesenian secara murni, dalam arti benar-benar didukung oleh nilai seni yang mendalam dan bukan sekedar hanya dijadikan model saja dalam pembangunan. Dengan demikian, kesenian rakyat semakin lama tidak dapat mempunyai ruang yang cukup memadai untuk perkembangan secara alami atau natural,

karena itu, secara tidak langsung kesenian rakyat akhirnya menjadi sangat tergantung oleh model-model pembangunan yang cenderung lebih modern dan rasional. Sebagai contoh dari permasalahan ini dapat kita lihat, misalnya kesenian asli daerah Betawi yaitu, tari cokek, tari lenong, dan sebagainya sudah diatur dan disesuaikan oleh aparat pemerintah untuk memenuhi tuntutan dan tujuan kebijakan-kebijakan politik pemerintah. Aparat pemerintah di sini turut mengatur secara normatif, sehingga kesenian Betawi tersebut tidak lagi terlihat keasliannya dan cenderung dapat membosankan. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak dikehendaki terhadap keaslian dan perkembangan yang murni bagi kesenian rakyat tersebut, maka pemerintah perlu mengembalikan fungsi pemerintah sebagai pelindung dan pengayom kesenian-kesenian tradisional tanpa harus turut campur dalam proses estetikanya.

Memang diakui bahwa kesenian rakyat saat ini membutuhkan dana dan bantuan pemerintah sehingga sulit untuk menghindari keterlibatan pemerintah dan bagi para seniman rakyat ini merupakan sesuatu yang sulit pula membuat keputusan sendiri untuk sesuai dengan keaslian (oroginalitas) yang diinginkan para seniman rakyat tersebut. Oleh karena itu pemerintah harus 'melakoni' dengan benar-benar peranannya sebagai pengayom yang melindungi keaslian dan perkembangan secara estetis kesenian rakyat tersebut tanpa harus merubah dan menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan politik. Globalisasi informasi dan budaya yang terjadi menjelang millenium baru seperti saat ini adalah sesuatu yang tak dapat dielakkan. Kita harus beradaptasi dengannya karena banyak manfaat yang bisa diperoleh.

Globalisasi budaya yang begitu pesat harus diantisipasi dengan memperkuat identitas kebudayaan nasional. Berbagai kesenian tradisional yang sesungguhnya menjadi aset kekayaan kebudayaan nasional jangan sampai hanya menjadi alat atau slogan para pemegang kebijaksanaan, khususnya pemerintah, dalam rangka keperluan turisme, politik dsb. Selama ini pembinaan dan pengembangan kesenian tradisional yang dilakukan lembaga pemerintah masih sebatas pada unsur formalitas belaka, tanpa menyentuh esensi kehidupan kesenian yang bersangkutan. Akibatnya, kesenian

tradisional tersebut bukannya berkembang dan lestari, namun justru semakin dijauhi masyarakat. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi oleh kesenian rakyat cukup berat.

Karena pada era teknologi dan komunikasi yang sangat canggih dan modern ini masyarakat dihadapkan kepada banyaknya alternatif sebagai pilihan, baik dalam menentukan kualitas maupun selera. Hal ini sangat memungkinkan keberadaan dan eksistensi kesenian rakyat dapat dipandang dengan sebelah mata oleh masyarakat, jika dibandingkan dengan kesenian modern yang merupakan imbas dari budaya pop.

Untuk menghadapi hal-hal tersebut di atas ada beberapa alternatif untuk mengatasinya, yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi para seniman rakyat. Selain itu, mengembalikan peran aparat pemerintah sebagai pengayom dan pelindung, dan bukan sebaliknya justru menghancurkannya demi kekuasaan dan pembangunan yang berorientasi pada dana-dana proyek atau dana-dana untuk pembangunan dalam bidang ekonomi saja pengaruh globalisasi disatu sisi ternyata menimbulkan pengaruh yang negatif bagi kebudayaan bangsa Indonesia . Norma-norma yang terkandung dalam kebudayaan bangsa Indonesia perlahan-lahan mulai pudar. Gencarnya serbuan teknologi disertai nilai-nilai interinsik yang diberlakukan di dalamnya, telah menimbulkan isu mengenai globalisasi dan pada akhirnya menimbulkan nilai baru tentang kesatuan dunia.

Radhakrishnan dalam bukunya *Eastern Religion and Western Thought* (1924) menyatakan “untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia, kesadaran akan kesatuan dunia telah menghentakkan kita, entah suka atau tidak, Timur dan Barat telah menyatu dan tidak pernah lagi terpisah. Artinya adalah bahwa antara barat dan timur tidak ada lagi perbedaan. Atau dengan kata lain kebudayaan kita dilebur dengan kebudayaan asing. Apabila timur dan barat bersatu, masihkah ada ciri khas kebudayaan kita? Ataukah kita larut dalam budaya bangsa lain tanpa meninggalkan sedikitpun sistem nilai kita? Oleh karena itu perlu dipertahanan aspek sosial budaya Indonesia sebagai identitas bangsa. Caranya adalah dengan penyaringan budaya yang masuk ke Indonesia dan pelestarian budaya bangsa.

Bagi masyarakat yang mencoba mengembangkan seni tradisional menjadi bagian dari kehidupan modern, tentu akan terus berupaya memodifikasi bentuk-bentuk seni yang masih berpolakan masa lalu untuk dijadikan komoditi yang dapat dikonsumsi masyarakat modern. Karena sebenarnya seni itu indah dan mahal. Kesenian adalah kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya dan tidak dimiliki bangsa-bangsa asing. Oleh sebab itu, sebagai generasi muda, yang merupakan pewaris budaya bangsa, hendaknya memelihara seni budaya kita demi masa depan anak cucu.

D. Globalisasi Informasi Sebagai Hambatan / Kendala Bagi Ketahanan Nasional

Di samping berbagai peluang untuk lebih memantapkan ketahanan nasional dapat diperoleh dari arus globalisasi informasi tersebut, tidak sedikit pula dampak negatif yang diakibatkan oleh perkembangan globalisasi informasi, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sebagai negara yang relatif masih muda, yang dalam banyak hal masih memerlukan waktu untuk memantapkan identitas dirinya dan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, arus globalisasi informasi yang bebas dan tanpa penyaringan akan menimbulkan berbagai masalah.

Muatan / materi informasi yang disebarkan yang berasal dari berbagai sumber tersebut belum tentu sesuai dengan kepribadian atau budaya bangsa yang menerimanya, atau bila bangsa penerima informasi tersebut belum siap secara mental untuk menerima atau menolak informasi tersebut. Bila hal ini terjadi maka akan terjadi konflik-konflik budaya atau akan terjadi suatu "*mental shock*" pada bangsa yang bersangkutan, dan hal ini tentu saja sangat tidak menguntungkan bagi ketahanan nasionalnya. Mengalirnya dengan tanpa batas informasi yang berisi system politik, ekonomi, social serta budaya dan ideologi asing yang tidak sesuai dengan system politik, ekonomi, social serta budaya dan ideologi dari bangsa penerima informasi dengan sendirinya akan menimbulkan kerawanan-kerawanan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa tersebut.

Dengan berakhirnya Perang Dingin antara blok Barat dengan blok Timur yang ditandai dengan hancurnya Uni Sovyet beserta komunismenya, menyebabkan dunia Barat yang dipimpin Amerika Serikat dengan paham liberalisme merupakan super power satu-satunya di dunia. Oleh karena mereka pula yang menguasai teknologi maju di bidang komunikasi, maka dengan sendirinya informasi global pun dikuasai oleh mereka pula, sehingga muatan / materi informasinya sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Oleh karena itu tidak aneh bila dunia selalu dusuguhi dan dijejali dengan informasi, bahwa sistem politik dan ekonomi yang bersumber pada liberalisme merupakan satu-satunya idiologi yang akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tentu ini merupakan tantangan yang berat bagi bangsa Indonesia yang sedang berusaha membangun system politik dan ekonomi berdasarkan falsafah bangsa Pancasila. Informasi-informasi mengenai hak-hak azasi manusia (HAM) menunjukkan bahwa konsep tentang HAM yang benar adalah yang sesuai dengan pandangan dan falsafah dunia Barat, tanpa memperhatikan sistem nilai dan akar budaya bangsa lain.

Dalam bidang sosial budaya, mengalirnya informasi budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya nasional, seperti sikap individualisme, materialisme, pergaulan bebas, kebiasaan minuman keras dan mabuk-mabukan, film-film yang penuh dengan kekerasan, pergaulan bebas dan teknik-teknik kejahatan atau sangat longgarnya pentaatan ajaran agama dan kurangnya rasa hormat terhadap orang tua dan lain sebagainya, akan sangat berpengaruh terhadap tata nilai kehidupan kemasyarakatan bangsa Indonesia. Adalah suatu kenyataan dalam masyarakat bahwa hal-hal yang dianggap baru dan berbeda dengan budaya sendiri akan lebih cepat ditiru, terutama oleh generasi muda yang sedang dalam proses mencari identitas diri. Apabila budaya baru tersebut bertentangan dengan norma dan tatanan kehidupan masyarakat, maka hal tersebut akan menimbulkan benturan-benturan budaya yang kadang-kadang tidak terkendali sehingga menyebabkan keresahan dalam masyarakat dan dapat merusak tatanan kehidupan bangsa yang pada akhirnya akan menimbulkan kerawanan- kerawanan terhadap ketahanan nasional.

E. Upaya-Upaya Pencegahan Terhadap Dampak Negatif Globalisasi Informasi

Pemerintah diharapkan terus berusaha menangkal dampak negatif globalisasi informasi dengan berbagai cara dan kebijaksanaan yang mungkin dapat dilakukan. Disamping usaha-usaha selama ini dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pembinaan mental-spiritual, juga agar dibarengi dengan penguasaan teknologi komunikasi untuk menyaring muatan/materi informasi yang dianggap tidak sesuai dengan falsafah, budaya dan kepribadian bangsa. Demikian juga diharapkan pemerintah dapat meninjau kembali kebijaksanaan yang terlalu membuka diri terhadap arus informasi dari luar bagi seluruh masyarakat, seperti kebijaksanaan membebaskan setiap orang untuk memasang antenna parabola. Hal demikian telah dilakukan oleh Negara Malaysia dan Singapura umpamanya. Masyarakat sendiri, terutama para orang tua dituntut terus melakukan pengawasan dan memberikan pengertian kepada putra-putrinya dalam menonton televisi, acara-acara mana yang boleh dan mana yang tidak boleh ditonton. Disamping itu juga pembinaan dan pendidikan mental-keagamaan agar selalu diperhatikan. Kepada para pendidik diharapkan terus menerus memberikan pengertian tentang nilai-nilai budaya asing yang mana yang baik dan yang mana yang tidak baik, sehingga para anak didik tidak dengan mudah meniru budaya asing tersebut, tanpa disadari akibat-akibatnya baik bagi dirinya sendiri, bagi masyarakat dan negara.

F. Peran Pendidikan Di Era Globalisasi

Sebagai suatu entitas yang terkait dalam budaya dan peradaban manusia, pendidikan di berbagai belahan dunia mengalami perubahan sangat mendasar dalam era globalisasi. Ada banyak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa dinikmati umat manusia. Namun sebaliknya, kemajuan tersebut juga beriringan dengan kesengsaraan banyak anak manusia, apalagi dalam era globalisasi sekarang ini. Pendidikan sudah menjadi komoditas yang makin menarik. Suatu fenomena menarik dalam hal pembiayaan pendidikan menunjukkan gejala industrialisasi sekolah. Bahkan beberapa

sekolah mahal didirikan dan dikaitkan dengan pengembangan suatu kompleks perumahan elite. Sekolah-sekolah nasional plus di kota-kota besar di Indonesia dimiliki oleh pebisnis tingkat nasional dan didirikan dengan mengandalkan jaringan multinasional berupa adopsi kurikulum dan staf pengajar asing.

Otonomi pendidikan tinggi membawa implikasi hak dan kewajiban perguruan tinggi negeri dan swasta untuk mengatur pengelolaannya sendiri termasuk mencari sumber-sumber pendapatan untuk menghidupi diri. Konsekuensi logis dari otonomi kampus, saat ini perguruan tinggi seakan berlomba membuka program baru atau menjalankan strategi penjangkaran mahasiswa baru untuk mendatangkan dana. Perdebatan antara anti- otonomi dan pro-otonomi perguruan tinggi tidak akan berkesudahan dan mencapai titik temu. Berkurangnya tanggung jawab pemerintah dalam pembiayaan pendidikan mengarah pada gejala privatisasi pendidikan. Dikotomi sekolah negeri dan swasta menjadi kabur dan persaingan antarsekolah akan makin seru. Akibat langsung dari privatisasi pendidikan adalah segregasi siswa berdasarkan status sosio-ekonomi. Atau, walaupun fenomena itu sudah terjadi di beberapa kota, pemisahan antara siswa dari keluarga miskin dan kaya akan makin jelas dan kukuh

Siswa-siswa dari keluarga miskin tidak akan mampu menanggung biaya yang makin mencekik sehingga mereka akan terpaksa mencari dan terkonsentrasi di sekolah- sekolah yang minimalis (baca: miskin) Sementara itu, siswa-siswa dari kelas menengah dan atas bebas memilih sekolah dengan sarana dan prasarana yang memadai. Selanjutnya, karena sekolah-sekolah ini mendapatkan iuran pendidikan yang memadai dari siswa, sekolah-sekolah ini juga akan mempunyai lebih banyak keleluasaan untuk makin membenahi diri dan meningkatkan mutu pendidikan. Jadi, sekolah yang sudah baik akan menjadi (atau mempunyai kesempatan) untuk menjadi lebih baik. Sebaliknya, sekolah yang miskin akan makin terperosok dalam kebangkrutan.

Dalam dinamika globalisasi, anak-anak bangsa tercecceh dalam berbagai sekolah yang beragam menurut latar belakang sosio-ekonomi yang berbeda. Negara belum mampu memberikan

kesempatan yang adil bagi semua anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Sampai saat ini, belum tampak adanya pembenahan yang signifikan dan terpadu untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan tingkat pendidikan tinggi. Muncul pertanyaan besar: Ke mana arah pendidikan di Indonesia?

Pendidikan dimaksudkan sebagai mempersiapkan anak-anak bangsa untuk menghadapi masa depan dan menjadikan bangsa ini bermartabat di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Masa depan yang selalu berkembang menuntut pendidikan untuk selalu menyesuaikan diri dan menjadi lokomotif dari proses demokratisasi dan pembangunan bangsa. Pendidikan membentuk masa depan bangsa. Akan tetapi, pendidikan yang masih menjadi budak sistem politik masa kini telah kehilangan jiwa dan kekuatan untuk memastikan reformasi bangsa sudah berjalan sesuai dengan tujuan dan berada pada rel yang tepat. Dalam konteks globalisasi, pendidikan di Indonesia perlu membiasakan anak-anak untuk memahami eksistensi bangsa dalam kaitan dengan eksistensi bangsa-bangsa lain dan segala persoalan dunia.

Pendidikan nasional perlu mempertimbangkan bukan hanya {state building} dan {nation building} melainkan juga {capacity building}. Birokrasi pendidikan di tingkat nasional perlu fokus pada kebijakan yang strategis dan visioner serta tidak terjebak untuk melakukan tindakan instrumental dan teknis seperti UAN/UNAS. Dengan kebijakan otonomi daerah, setiap kabupaten perlu difasilitasi untuk mengembangkan pendidikan berbasis masyarakat namun bermutu tinggi. Pendidikan berbasis masyarakat ini diharapkan bisa menjadi lahan persemaian bagi anak-anak dari berbagai latar belakang untuk mengenali berbagai persoalan dan sumber daya dalam masyarakat serta terus mencari upaya-upaya untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik. Globalisasi ekonomi dan era informasi mendorong industri menggunakan sumber daya manusia lulusan perguruan tinggi yang kompeten dan memiliki jiwa kewirausahaan. Akan tetapi tidak setiap lulusan perguruan tinggi memiliki jiwa kewirausahaan seperti yang diinginkan oleh lapangan kerja tersebut.

Kenyataan menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil lulusan perguruan tinggi yang memiliki jiwa kewirausahaan. Di sisi lain, krisis ekonomi menyebabkan jumlah lapangan kerja tidak tumbuh, dan bahkan berkurang karena bangkrut. Dalam kondisi seperti ini, maka lulusan perguruan tinggi dituntut untuk tidak hanya mampu berperan sebagai pencari kerja tetapi juga harus mampu berperan sebagai pencipta kerja. Keduanya memerlukan jiwa kewirausahaan. Oleh karena itu, agar supaya perguruan tinggi mampu memenuhi tuntutan tersebut, berbagai inovasi diperlukan diantaranya adalah inovasi pembelajaran dalam membangun generasi technopreneurship di era informasi sekarang ini. Ada suatu pendapat bahwa, saat ini sebagian besar lulusan perguruan tinggi di Indonesia masih lemah jiwa kewirausahaannya. Sedangkan sebagian kecil yang telah memiliki jiwa kewirausahaan, umumnya karena berasal dari keluarga pengusaha atau dagang.

Dalam kenyataan menunjukkan bahwa kewirausahaan adalah merupakan jiwa yang bisa dipelajari dan diajarkan. Seseorang yang memiliki jiwa kewirausahaan umumnya memiliki potensi menjadi pengusaha tetapi bukan jaminan menjadi pengusaha, dan pengusaha umumnya memiliki jiwa kewirausahaan. Proses pembelajaran yang merupakan inkubator bisnis berbasis teknologi ini dirancang sebagai usaha untuk mensinergikan teori (20%) dan Praktik (80%) dari berbagai kompetensi bidang ilmu yang diperoleh dalam bidang teknologi & industri. Inkubator bisnis ini dijadikan sebagai pusat kegiatan pembelajaran dengan atmosfir bisnis yang kondusif serta didukung oleh fasilitas laboratorium yang memadai.

Tujuan implementasi inovasi dari kegiatan inkubator bisnis berbasis teknologi ini adalah menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan bagi mahasiswa sebagai peserta didik. Sedangkan manfaat yang diperoleh bagi institusi adalah tercapainya misi institusi dalam membangun generasi technopreneurship dan meningkatnya relevansi antara dunia pendidikan dengan dunia industri. Sedangkan manfaat bagi mitra kerja adalah terjalannya kerja sama bisnis dan edukasi. Kerjasama ini dikembangkan dalam bentuk bisnis riil produk sejenis yang memiliki potensi ekonomi pasar yang cukup tinggi. Proses globalisasi yang sedang terjadi saat ini,

menuntut perubahan perekonomian Indonesia dari resourced based ke knowledge based. Resource based yang mengandalkan kekayaan dan keragaman sumber daya alam umumnya menghasilkan komoditi dasar dengan nilai tambah yang kecil. Salah satu kunci penciptaan knowledge based economy adalah adanya technology entrepreneurs atau disingkat techno-preneur yang merintis bisnis baru dengan mengandalkan pada inovasi. Hightech business merupakan contoh klasik bisnis yang dirintis oleh technopreneurs.

Jumlah usaha kecil menengah berbasis teknologi (UKMT) di Indonesia berkembang dengan pesat. Kecenderungan peningkatan ini lebih didorong oleh terbatasnya peluang kerja di industri-industri besar karena pengaruh krisis ekonomi dan mulai munculnya technopreneurship di kalangan lulusan pendidikan tinggi teknik. Dalam menghadapi era globalisasi, persaingan akan semakin ketat, sehingga sangat dibutuhkan kebijakan-kebijakan dan aktivitas-aktivitas secara langsung yang dapat meningkatkan daya saing UKMT di kemudian hari. Kesulitan dan hambatan pada UKMT di Indonesia dalam mengembangkan usahanya adalah lemahnya jalur pemasaran, dukungan teknologi dan terbatasnya permodalan. Terlebih lagi, bagi pengusaha pemula, masalah ini akan terlihat lebih besar dan menjadi kendala cukup besar dalam mengembangkan usahanya. Sampai saat ini belum banyak institusi pemerintah maupun swasta yang dapat memberikan dukungan secara langsung untuk pengembangan UKMT khususnya bagi pengusaha pemula. Sehingga sangat dibutuhkan suatu wadah yang dapat memberikan dukungan langsung berupa fasilitas-fasilitas yang dapat membantu UKMT khususnya membantu pengusaha pemula dalam melaksanakan dan mengembangkan usahanya.

Dalam rangka turut serta membantu dan mendukung secara langsung kegiatan UKMT khususnya kegiatan pengusaha pemula, maka dipandang sangat perlu untuk dapat membangun suatu wadah yang memiliki fasilitas yang dapat mendukung secara langsung kegiatan operasional, promosi, pemasaran, konsultasi teknologi produksi, investasi dan permodalan. Dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut, diharapkan UKMT khususnya pengusaha pemula di Indonesia dapat mengembangkan usahanya lebih cepat dan terarah.

Menatap masa depan berarti mempersiapkan generasi muda yang memiliki kecintaan terhadap pembelajaran dan merupakan terapi kesehatan jiwa bagi anak bangsa, semoga munculnya generasi technopreneurship dapat memberikan solusi atas permasalahan jumlah pengangguran intelektual yang ada saat ini. Selain itu juga bisa menjadi arena untuk meningkatkan kualitas SDM dalam penguasaan IPTEK, sehingga kita bisa mempersiapkan tenaga handal ditengah kompetisi global. mulailah dari diri sendiri untuk berbuat sesuatu guna menciptakan pendidikan kita bisa lebih baik dan berkualitas, karena ini akan menyangkut masa depan anak-anak kita dan juga Bangsa Indonesia.



BAB
10

PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PERADABAN

Beberapa isu perlu diperhatikan sebelum kita membahas lebih jauh mengenai pengaruh globalisasi terhadap peradaban dan tingkah laku, adalah lebih tepat kita mengkaji globalisasi yang bertalian dengan peradaban di Malaysia seperti yang digambarkan oleh Osman (2008) yaitu :

1. Isu pertama, sebagai isu penting ialah kita perlu menilai semua dimensi globalisasi kotemporari yang ada dan relevan kepada masyarakat di Malaysia. Untuk memperolehi gambaran yang menyeluruh mengenai globalisasi, beberapa dimensi globalisasi; seperti yang dijelaskan oleh Cohen & Kennedy (2007) - akan didaftarkan dalam pembahasan ini. Selanjutnya, masing-masing dimensi akan diteliti sifat dan ciri-cirinya, dan kepentingan terhadap negara ini. Setiap dimensi dapat diteliti secara terpisah, ataupun dapat dilihat secara interaktif dan hubungannya antara satu sama lain. Osman (2008) pula menambahkan bahwa ada empat dimensi – telah dibicarakan di atas; yang perlu dilihat yaitu
 - a. dimensi ekonomi yang melihat kepada globalisasi ekonomi (*economic globalization*),
 - b. dimensi politik, adalah yang membicarakan globalisasi politik (*political globalization*),
 - c. dimensi kebudayaan dan keagamaan, yang berbicara tentang globalisasi kebudayaan dan keagamaan (*cultural and religious globalization*), dan
 - d. dimensi ilmu pengetahuan dan informasi, yang membahas tentang globalisasi ilmu pengetahuan dan informasi (*knowledge*

and information globalization). Globalisasi demografi (*Demographic globalization*) sebetulnya juga penting, tetapi tidak dididaktarkan disini karena melihat pengaruhnya terhadap masyarakat Malaysia saat ini, atau paling tidak untuk jangka masa yang pendek tidak begitu jelas. Dalam kes-kes tertentu, globalisasi penting juga untuk dinilai dan diteliti. Contohnya Amerika Serikat, negara ini adalah Negara yang paling banyak mengalami perubahan demografi, paling tidak untuk masa ini. Penghijrahan yang pesat dari kaum Hispanik, dari Amerika Latin ke Amerika Serikat belakangan ini telah meniggalkan pengaruh yang jelas terhadap bidang politik, ekonomi, dan sosio-budaya (khususnya bahasa). Dampaknya, bahasa Spanyol muncul sebagai bahasa kedua setelah bahasa Inggris di Amerika Syarikat. Selain bahasa, perpindahan agama kaum Hispanik yang bermahzab Katolik kepada agama Islam juga merupakan pengaruh dari globalisasi demografi (Osman 2008).

3. Isu kedua. Perlunya kita memberi perhatian kepada bentuk hubungan antara globalisasi dan peradaban. Globalisasi dapat dicorakkan oleh peradaban yang kuat, tangkas dan dinamik. Sebaliknya pula, peradaban dapat memberi pengaruh yang positif dan negatif terhadap peradaban dan tingkah laku. Keterkaitan antara globalisasi dan peradaban memang perlu menjadi kajian yang serius dan mendalam karena pengaruhnya tidak serta merta dapat kita rasakan. Kajian ini amatlah perlu demi menjaga peradaban dan tingkah laku supaya tidak mudah dipengaruhi oleh pengaruh unsur-unsur negatif dari globalisasi sebelum kita memanfaatkan pengaruh unsur-unsur positifnya.
4. Isu ketiga. Dalam membicarakan isu globalisasi kita perlu mempunyai prespektif peradaban sendiri. Selain dari prespektif Barat, ada berbagai isu yang perlu dinalisa, antaranya adalah isu arti dan konsep globalisasi, asal usul globalisasi, penilaian globalisasi untuk menentukan baik buruknya dan urutan masing-masing dimensinya, dan isu bagaimana menangani dan menghadapi globalisasi. Menurut prespektif Barat, fenomena dan proses globalisasi dicetuskan pertama kalinya oleh peradaban

Barat. Setengah dari mereka menganggap bahwa globalisasi adalah fenomena khusus zaman kontemporeri sudah tentu menonjolkan dunia Barat sebagai pencetus dan penggerak utama fenomena tersebut. Dan setengah lainnya berpendapat bahwa globalisasi ini merupakan fenomena yang terjadi jauh lebih awal yaitu dimulai dari penjelajahan dunia Barat untuk menguasai ekonomi dan politik. Sementara itu, dari prespektif dunia Islam, yang sebenarnya lebih menepati dunia hakikat sejarah, proses globalisasi terjadi beberapa kurun lebih awal dari penjelajahan dunia Barat.

A. Pengaruh Positif Dari Globalisasi

Pada saat ini, perkembangan teknologi komunikasi, elektronik dan media semakin modern dan canggih. Pada masa dahulu, walaupun alat komunikasi sudah ada, namun tidak secanggih sekarang. Alat elektronik pula sudah ada, seperti radio dan televisi hitam-putih, dan hanya dimiliki oleh beberapa orang saja karena pada saat itu barang-barang tersebut masih sangat mahal. Berbeda dengan masa sekarang, sangat sedikit remaja yang masih meminati radio, karena menurut mereka radio sudah ketinggalan zaman. Mereka lebih meminati MP3 player, MP4 Player, Laptop, iPad, Hand phone dan lain-lain. Televisi hitam putih telah berkembang menjadi menjadi lebih modern dan canggih seperti TV LCD, TV LED, TV 3D, dan bahkan Internet TV. Perkembangan alat komunikasi juga semakin canggih. Surat menyurat dan telepon kabel yang dulu digunakan untuk berkomunikasi jarak yang jauh, kini diganti dengan telepon yang dapat dibawa kemana kita pergi. Mengirim dan menerima pesan dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Dapat dikatakan bahwa komunikasi saat sekarang sudah sangat mudah.

Perkembangan budaya juga menjadi lebih baik. Pada masa dulu, model baju serta cara berpakaian masih sangat sederhana. Untuk menghadiri pesta misalnya, kebanyakan orang menggunakan pakaian tradisional, seperti memakai baju adat dan kebaya. Namun pada saat ini, orang-orang lebih berminat terhadap pakaian casual yang cenderung lebih meniru gaya barat (westernisasi). Bagaimanapun, perkembangan mode pakaian ini juga memberikan

keuntungan, dapat menambah kekayaan corak dan pilihan yang lebih pelbagai. Contohnya, pakaian muslim dan batik yang dimodifikasi sehingga sesuai dengan adat dan budaya lokal. Namun, banyak pihak di dunia telah dan sedang menilai baik buruknya globalisasi saat ini, terutamanya globalisasi ekonomi. Menurut Joseph & Chandra bahwa ada delapan kebaikan dari globalisasi dan ada tiga belas keburukannya.

Antara kebaikan globalisasi tersebut adalah :

1. Peran investasi asing (FDI) dalam menciptakan pekerjaan dan mengurangkan kemiskinan di beberapa negara,
2. Peningkatan mobilitas sosial dan pengukuhan kelas menengah,
3. Kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan informasi dan menyebarkan ilmu pengetahuan berkat teknologi baru dari informasi dan komunikasi,
4. Komunikasi yang lebih mudah dan murah,
5. Kesempatan yang lebih luas untuk manusia dari berbagai kelompok etnik, budaya dan agama dalam berinteraksi,
6. Kesempatan yang lebih luas untuk melahirkan rasa simpati dan rasa prike-manusiaan terhadap korban berbagai jenis bencana alam dan tragedi oleh perbuatan manusia di seluruh dunia,
7. Penonjolan ide-ide dan praktek pemerintahan yang baik seperti pertanggungjawaban awam, peraturan hukum dan hak asasi manusia, dan
8. Penonjolan hak-hak asasi kaum wanita.

B. Pengaruh Negatif Dari Globalisasi

Tidak dipungkiri lagi bahwa globalisasi sebagai suatu istilah baru kepada gerakan yang lama, tidak lagi dapat dipahami apalagi dianalisa dengan kritikal. Semakin banyak para pakar menganalisis dan mengakui bahwa globalisasi sebagai satu kenyataan yang harus diterima dan perlu dijadikan pembenaran yang benar dan tidak dapat diragukan keberadaannya. Keghairahan para pakar dan ahli-ahli

akademis untuk menerima globalisasi kini diperkuat oleh badan-badan internasional dengan berbagai nama yang amat mengagumkan. Tanpa ada rasa segan lagi, mereka mengatakan bahwa fenomena adanya “rakyat global” adalah suatu bentuk idelisme yang perlu diterima oleh semua negara. Sudah amat merisaukan pemikiran globalisasi yang dijiwai oleh perancang-perancang pembangunan di seluruh dunia, sehingga tidak ada lagi rasa curiga terhadap apa yang dicanangkan oleh kuasa barat.

Kedaulatan sebuah negara-bangsa tidak perlu lagi karena para penganut faham globalisme beranggapan bahwa “dunia tanpa batas” merupakan puncak kemajuan. Anggapan seperti inilah yang membuat mereka merasa puas walaupun mereka dijadikan alat dan hamba kepada berbagai institusi global. Seluruh kepakaran dan kemahiran mereka dieksploitasi bagi membuka dan membongkar segala halangan yang menyebabkan sebuah negara tidak mengakui globalisasi sebagai satu keharusan.

Hal di atas didukung oleh banyaknya negara dan pemimpin-pemimpin dunia yang telah membuat komitmen untuk menyertai proses globalisasi. Makna, arah, tujuan dan impilkasi globalisasi bukan merupakan hal penting lagi, yang diutamakan adalah semua pihak perlu menyertai dan menyesuaikan diri untuk menjadi lebih global. Osman menambahkan bahwa belum ada bukti yang menunjukkan bahwa global itu memberi makna lebih menyeluruh dan memperhatikan semua aspek dan kepentingan setiap warga dunia, melainkan semakin jelas fenomena dunia yang bersifat unipolar sedang dikuasai oleh hanya satu blok kuasa yaitu blok Barat. Bahkan yang semakin jelas ialah penekanan konsep “semua untuk satu” jualah yang kini menjadi agenda Barat.

Secara umum, pengaruh negatif dari pengaruh globalisasi seperti yang dipaparkan oleh Joseph & Chandra antaranya adalah sebagai berikut :

1. Kualitas lingkungan yang semakin merosot adalah sebagai akibat dari terlalu mementingkan faktor keuntungan.
2. Pembangunan yang tidak seimbang dan jurang perbeadaan ekonomi yang semakin melebar antara kawasan-kawasan di sebuah negara dan antara sektor-sektor ekonomi.

3. Pengabaian keperluan asas hidup di kalangan rakyat miskin di banyak negara, terutamanya di negara-negara Selatan.
4. Modal jangka pendek yang keluar-masuk pasaran seperti kilat, sebagai akibat praktek baru yang menjadikan uang sendiri sebagai komoditi keuntungan.
5. Pengangguran yang semakin memburuk dan jurang perbezaan pendapatan yang semakin melebar di negara-negara Utara sendiri.
6. Penyebaran budaya konsumen yang bertentangan dengan tuntutan nilai-nilai kerohanian dan moral yang murni dan yang merendahkan martabat sumber daya manusia.
7. Kecenderungan ke arah pembentukan suatu budaya global yang homogen akibat peranan yang dimainkan oleh badan-badan transnasional dan media komunikasi global.
8. Penyebaran budaya pop Amerika yang “menyegarkan panca indera dan mematikan roh”.
9. Kecenderungan pusat-pusat pendidikan tinggi untuk memberi keutamaan kepada kursus-kursus ilmu manajemen dan teknik dengan mengabaikan kursus-kursus ilmu kemanusiaan dan kemasyarakatan.
10. Pembanjiran informasi yang tidak berguna.
11. Amerika Serikat dan beberapa negara Eropah memanipulasi isu-isu demokrasi dan hak-hak asasi manusia untuk mendominasi politik dunia.
12. Penginternasionalan kriminal yang menyulitkan kriminal dibendung.
13. Penginternasionalan penyakit.

Daftar baik-buruk globalisasi yang dipaparkan di atas jelas mengesahkan kedudukan dimensi ekonomi sebagai dimensi terpenting globalisasi masa kini, dan juga yang paling berpengaruh terhadap segala segi kehidupan. Sebab utama globalisasi ekonomi meninggalkan banyak pengaruh negatif dalam berbagai bidang kehidupan manusia sejagat ialah sifat dan ciri fenomena kapitalisme

global yang menjadi teras dan fokus dimensi globalisasi tersebut. Kapitalisme menekankan ide dan praktek perdagangan bebas, liberalisasi pasaran keuangan dan pengaliran bebas modal, tetapi nampaknya konsep kebebasan dan liberalisasi yang difahami dan diamalkan ini betul-betul bebas dari nilai-nilai murni yang diperjuangkan oleh Islam dan agama-agama lain.¹⁵⁹

C. Isu-Isu Globalisasi

Beberapa isu globalisasi perlu dilihat demi memastikan peradaban Malaysia mampu mengatasi dan menangani arus globalisasi. Peradaban Malaysia perlu mengekalkan nilai jati diri yang berpedoman kepada peradaban Islam dan agama-agama lain yang dianut oleh keberbagaian masyarakat Malaysia.

1. Media

Barat telah menjadikan media komunikasi sebagai alat utama untuk menyebarkan segala informasi. Oleh karena itu, segala berita dan informasi yang disiarkan di seluruh dunia adalah lebih berpihak kepada Barat. Setiap negara yang tidak berpihak dengan mereka, khususnya negara-negara Islam akan ditindas. Dengan kecanggihan teknologi internet dan komputer, ilmu dan informasi dengan mudah dapat diakses oleh siapa saja di dunia ini.

Sebagai penggagas alat komunikasi dunia, Barat dengan sendirinya menjadi kuasa pertama yang mampu mendirikan banyak perusahaan-perusahaan raksasa media cetak dan media elektronik. Oleh karena media di bawah kontrol dunia Barat, maka sudah tentu segala berita dan informasi akan memihak mereka. Sebaliknya, mereka akan menindas musuh-musuh mereka. Agensi berita internasional terutamanya dari Amerika Serikat menentukan bagaimana informasi tentang Sekurang-kurangnya ada tiga orang pakar yang berpandangan seperti ini yaitu Hui dan Mun yang dapat dijumpai dalam Hui, L.K., & Mun, H.W., 2008. *Globalisasi, Media Dan Budaya: Antara Hegemoni Barat Dengan Kebangkitan Asia*. DBP. NO. KK: 303 2047651 ISBN: 9789836295040, h. 553. Juga Samsudin dalam Samsudin, A.R., 2000. *Globalisasi, Media dan Budaya*. ARKIB. Jabatan Komunikasi. Universiti Kebangsaan Malaysia. Samsudin,

A.R., 2001. Media dan Identiti Budaya : Membangunkan Industri Kandungan Tempatan Yang Budaya Tahan. *Journal Komunikasi* Jilid 17-21, h. 67-80 dan dalam Samsudin, A.R. 2001.

Peristiwa internasional diolah dan dipersembahkan kepada masyarakat dunia. Segala peristiwa itu diolah dan ditafsirkan oleh Barat untuk memperoleh kepentingan-kepentingan yang mereka inginkan. Banjirnya informasi yang tidak berguna merupakan salah satu pengaruh terburuk dari globalisasi media yang dirasakan oleh masyarakat Muslim di Malaysia khususnya dan penduduk dunia lain umumnya. Sesungguhnya, Islam adalah agama yang sangat menekankan kecintaan kepada ilmu dan hikmah serta memandang serius kepada banyaknya informasi yang tidak berguna. Seperti yang dimaklumi bahwa banyaknya informasi yang tidak berguna ini amat mudah diakses dengan kecanggihan teknologi informasi terkini. Karena itu, informasi yang tidak benar dan tidak berguna tersebut terus mengalir ke dalam masyarakat dan amat sukar untuk dibendung. Hal yang amat merisaukan ialah mudahnya anak-anak muda dan remaja tertarik kepada fenomena kebanjiran informasi yang tidak berguna tersebut.

Selain masalah tersebut di atas, masalah jurang perbezaan kesempatan untuk mengakses informasi juga perlu dipandang serius. Jurang ini jelas antara masyarakat kota dan masyarakat luar kota. Oleh sebab itu, pemerintah telah dan sedang membuat berbagai aktivitas untuk mengeksplorasi masyarakat di luar kota akan kepentingan 'faham IT'. Pemerintahan menyediakan berbagai bantuan dan kelengkapan komputer yang mampu menarik minat masyarakat luar kota dan seterusnya memperkenalkan mereka kepada dunia globalisasi.

2. Ekonomi

Salah satu dimensi globalisasi yang mampu memberi pengaruh - secara tidak langsung - terhadap dimensi globalisasi lain ialah globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi merupakan satu kode undang-undang ekonomi seragam yang diamalkan dan digunakan oleh seluruh masyarakat dunia. Ia membawa kepada penghapusan halangan ekonomi antara sebuah negara dengan negara lain pada rasio yang amat cepat, terutamanya dalam tiga aspek utama ekonomi

yaitu perdagangan, keuangan dan investasi. Globalisasi terjadi dalam ketiga aspek ini apabila dasar-dasar pemerintahan semakin longgar dalam mengontrol ekonomi asing dari mempengaruhi ekonomi lokal sehingga, ekonomi lokal terpaksa mengikuti irama ekonomi asing, yang akhirnya meminggirkan ekonomi lokal. Hal ini terjadi dengan mudah akibat perubahan teknologi, di mana uang dapat dipindahkan, mata uang diperdagangkan dan saham dapat dibeli dengan mudah.

Dalam globalisasi ekonomi, pasaran saham diglobalkan dengan investor- investor asing dapat membawa uang keluar dan masuk dari sebuah pasar. Dengan nilai mata uang yang tidak tetap dan pasaran modal terbuka, spekulasi mulai muncul dan membawa kepada manipulasi mata uang dan saham. Ia kemudiannya membawa kepada peran tiga buah institusi yang benar-benar menyebarkan globalisasi yaitu Dana Keuangan Internasional (IMF), Bank Dunia dan Pertubuhan Perdagangan Sedunia (WTO). Selain dari itu, dalam globalisasi ekonomi juga telah terjadi peningkatan dalam ketergantungan perdagangan terhadap ekonomi. Firma-firma dan perdagangan terus meningkat, dan terjadinya peningkatan dalam investasi asing secara langsung di dalam aktivitas ekonomi sebuah negara.

Globalisasi ekonomi dapat dilihat melalui perluasan perusahaan melampaui batas negara. Perspektif ini dapat dilihat melalui tiga tahap yaitu

- a. Pertama, perusahaan internasional yang mempunyai aktivitas di luar batas nasional dan meliputi eksport, import dan produksi bukan bahan mentah,
- b. Kedua, perusahaan multi nasional yaitu perusahaan yang menjalankan aktivitasnya di berbagai negara, dan
- c. Ketiga, perusahaan global yang melihat ekonomi dunia sebagai satu. Perusahaan tersebut mendapatkan bahan mentah dan menjual barang secara global.

3. Politik

Kecanggihan penawaran ilmu dan teknologi komunikasi yang mampu membawa dan menyebarkan segala informasi akan menyebarkan globalisasi politik ke seluruh belahan dunia

dalam waktu singkat. Untuk itu, kita perlu menghadapi tantangan penyebaran ide-ide dan paham politik yang salah seperti demokrasi ala Barat, pluralisme dan hak-hak asasi manusia.

Fenomena penghilangan wilayah "*deteritorialization*" merupakan salah satu isu terpenting dalam dimensi globalisasi politik. *Deteritorialization* ialah satu proses dan tindakan politik yang melintasi perbatasan wilayah. Dalam menggunakan kuasa terdapat pemaksaan dan pemantauan secara sistematis melalui badan-badan yang berwenang seperti pihak polisi dan lain-lain. Adanya ide mengenai demokrasi dan hak asasi manusia yang telah dianggap sebagai prinsip sejagat yang harus diterima oleh seluruh umat manusia. Adalah Amerika yang mempraktikkan ide-ide seperti itu.

Pada saat ini, makna kemerdekaan sebuah negara sudah semakin kecil, selain dari tampuk pemerintahan diserahkan kepada masyarakat lokal (daerah). Politik internasional didominasi sepenuhnya oleh beberapa buah negara kuasa besar (super power), yang secara tidak langsung menggambarkan dominasi dunia Barat. Contohnya Iraq pada hari ini, dengan kuasa hak vetonya, Amerika Syarikat yang mendominasi Dewan Keamanan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) dan bersama-sama dengan negara Rusia, United Kingdom serta Perancis telah campur tangan dalam politik dalam negeri Iraq.

Hampir semua persengketaan wilayah dan internasional sama ada di Somalia, Bosnia-Herzegovina, Palestin, Kashmir, Iraq dan lain-lain, Amerika Syarikat – yang menggambarkan diri mereka sebagai "polisi dunia" - akan terlibat secara langsung dengan berbagai masalah tersebut. Kekuatan ketenteraan dan militer Amerika Serikat telah menyebabkan kedudukan mereka sebagai sebuah kuasa besar dunia tidak dapat ditandingi. Setelah berakhirnya Perang Dingin dan dengan kejatuhan Soviet Union, Amerika Syarikat muncul sebagai satu-satunya kuasa besar dunia yang tidak dapat ditandingi.

4. Budaya

Dunia Barat pada saat ini, terutama Amerika Serikat telah membanjiri dunia dengan eksport budayanya. Terjadi pertukaran dan pernyataan simbol yang mencerminkan kehidupan manusia dari segi gaya hidup, kepercayaan, citarasa, dan lain-lain dari Barat ke

dunia luar. Kebudayaan merupakan cara hidup sehari-hari manusia dalam sebuah masyarakat atau organisasi. Pada zaman dahulu manusia dalam sebuah masyarakat sanggup berperang karena mempertahankan budaya hidup mereka yang dicemari atau dicabuli oleh pihak lain. Antara tantangan globalisasi yang perlu dibahas adalah tantangan aspek sosial budaya (Amran et al. 2001).

Azhar dan Amriah menyatakan bahwa terdapat beberapa kategori kebudayaan yang telah mengalami proses globalisasi. Pengaruh-pengaruh globalisasi budaya yang menunjukkan dan membuktikan fenomena perubahan gaya hidup adalah sebagai berikut:

- a. Budaya Makan: Berbagai jenis makanan dan minuman Barat telah dapat dinikmati dan semakin populer di seluruh dunia. Bahkan, makanan Jepun pun sudah dapat diterima oleh masyarakat Malaysia. Spaghetti, pasta, minuman bersoda seperti Coca Cola sudah bukan merupakan benda asing lagi di Malaysia dan bahkan di seluruh dunia.
- b. Budaya Mode: Segala perubahan mode yang terjadi di Barat tidak terlepas dari pandangan golongan anak-anak muda. Mereka semakin bernaflu mengikuti segala perubahan mode tersebut. Merek-merek alat hias seperti Maybeline dan Christian Dior, merek pakaian seperti Versace, Bonia, dan Padini menjadi pilihan generasi muda walaupun harganya mahal.
- c. Budaya Kerja: Perusahaan-perusahaan produksi di era globalisasi juga terdiri dari beragam kaum dari negara-negara di dunia. Umpamanya, perusahaan Espirit di mana ketua grafiknya dari Jepang, juru gambarnya dari Itali, arsiteknya dari Perancis dan Itali.
- d. Budaya Hidup: Pesta-pesta sosial, dunia keartisan dan pembuatan film menonjolkan ala Barat. Selain dari itu, masyarakat dunia hari ini lebih terpengaruh kepada budaya hidup yang menggunakan produk rokok yang mensponsori budaya hidup Barat.
- e. Budaya Musik dan Hiburan: Musik jazz, rock, disco dan yang terkini musik 'black metal' telah mulai menguasai dunia.

Tempat hiburan seperti Disneyland juga didirikan di luar dari negara Amerika. Pada tahun 1987, di Tokyo Jepang, Disneyland didirikan dengan panggilan Tokyo Disneyland. Pada tahun 1992, di Marne-La-Valle di Paris dengan panggilan Euro Disneyland.

- f. Budaya Bahasa: Bahasa Inggris adalah alat hubungan dan komunikasi terpenting internasional dan digunakan secara global. Ini menunjukkan kejayaan globalisasi bahasa yang diprakarsai oleh Amerika.

D. Globalisasi dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga dan Kesehatan Mental

Globalisasi dikaitkan dengan perubahan pesat dan signifikan dari manusia. Pergerakan orang-orang yang cepat dari luar kota ke kota, dan pertumbuhan kota di negara membangun terutamanya dikaitkan dengan kehidupan substandard. Gangguan keluarga, keganasan sosial dan domestik semakin meningkat. Konsep identitas kebangsaan, keluarga, pekerjaan dan tradisi berubah dengan pesat dan jelas. Terdapat juga kerisauan bahwa daya saing yang diperkenalkan oleh globalisasi dapat membawa kepada masyarakat yang lebih individualistik (Pais 2006).

Selain dari itu, perubahan yang pesat telah menggalakkan fundamentalisme, keinginan kepada masa lalu, dan hilangnya toleransi pada perbedaan dalam agama dan budaya. Negara kehilangan pengaruh relatif kepada tekanan ekonomi global, dan di setengah negara terjadi kegagalan – ragu-ragu untuk membangun dasar-dasar sosial. Semua perubahan ini meningkatkan kemungkinan bahwa orang-orang yang terpengaruh akan dieksploitasi, dan ancaman kepada hak asasi manusia terhadap orang yang kurang mampu akan meningkat.

Pais (2006) meneliti kembali globalisasi menurut prespektif perdagangan. Dalam pasaran kapitalis, perusahaan-perusahaan multinasional menjadi pemimpin dalam mewujudkan diri mereka dan kehadirannya hampir di setiap bagian dunia. Coca Cola, McDonalds, dan Nike adalah contoh pertumbuhan dan perkembangannya. Media

kemudian memainkan peranan utama dalam manfaat pengiklanan dari produk dan pelayanan baru seperti “lebih baik dan lebih unggul” dari apa yang dipunyai pasaran lokal. Perlahan-lahan tetapi terus-menerus makanan yang kita makan, pakaian kita pakai dan gaya hidup kita cenderung mulai berubah. Proses ini menjadi faham konsumen dalam budaya kapitalistik.

Pada satu tingkat, globalisasi mungkin kelihatan tidak mempunyai pengaruh yang besar kepada keluarga. Dan bahwa kehidupan kita adalah ‘biasa’ dalam kebanyakan keadaan. Banyak orang tidak sadar tentang bagaimana globalisasi membentuk sebagian hal penting dari fenomena ini. Realitasnya adalah bahwa setiap individu tunggal terpengaruh ke dalam berbagai cara. Perubahan ini memberi pengaruh kepada identitas masyarakat dan nilai-nilai budaya, yang kadang-kadang berubah secara signifikan. Baik perubahan antara generasi atau intra-peribadi, dimana nilai-nilai baru yang hadir dapat menyebabkan pertentangan dan konflik dengan nilai-nilai yang ada. Kadang-kadang peralihan dan perubahan juga dapat menyebabkan kesulitan dalam pertumbuhan dan pembangunan dalam sebuah masyarakat.

E. Dampak Globalisasi Secara Psikologi

Akibat yang paling penting dari globalisasi secara psikologi adalah bahwa globalisasi dapat mengubah identitas seseorang dari segi bagaimana orang itu berfikir tentang diri mereka dalam berhubungan dengan lingkungan sosial. Menurut Arnett, terdapat empat isu utama yang berkaitan dengan identitas, yang dibangun oleh globalisasi.²⁰¹

Isu pertama adalah pembangunan identitas bikultural - mungkin suatu identitas hibrid yang bertujuan bahwa sebagian dari identitas seseorang yang berakar dalam budaya lokal, sedangkan bagian yang lain berawal dari kesadaran seseorang yang berhubungan dengan dunia global. Pembangunan identitas global tidak lagi hanya disebabkan oleh sebagian dari para pendatang (immigrants) dan minoritas etika. Rakyat hari ini - terutamanya golongan muda membangun identitas yang dapat memberikan mereka rasa kekitaan

kepada budaya di seluruh dunia, termasuk kesadaran tentang peristiwa, praktik, gaya dan informasi yang merupakan sebagian dari budaya global. Media seperti televisi dan terutamanya internet, yang memungkinkan orang-orang berkomunikasi dengan segera dengan setiap tempat di dunia, telah memainkan peranan penting dalam membangun identitas global. Namun, bersama-sama dengan identitas global baru ini, rakyat terus berupaya untuk mempertahankan dan membangun identitas lokal mereka dalam interaksi sehari-hari dengan keluarga, rakan-rakan dan masyarakat.

Satu contoh yang baik dari identitas bicultural adalah di kalangan orang yang berpendidikan di Malaysia, walaupun mereka sedang diintegrasikan ke dalam dunia global dengan teknologi yang serba cepat, namun mereka masih mengamalkan nilai-nilai tradisional yang berkenaan dengan kehidupan peribadi mereka seperti adat dalam perkawinan, dan kebiasaan menjaga orang tua mereka. Walaupun membangun identitas bicultural berarti bahwa identitas lokal dipertahankan di samping identitas global, namun tidak ada keraguan bahwa budaya lokal sedang dimodifikasi oleh globalisasi. Seperti praktik budaya tradisional dan perubahan kepercayaan, bicultural atau identitas budaya hibrid mungkin terjadi dengan memasukkan unsur budaya asli, lokal dan global.

Isu kedua ialah kekeliruan identitas, dimana individu dari budaya bukan barat mengalami suatu reaksi kepada globalisasi. Sementara orang-orang mungkin dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dan membangun bicultural, dan identitas budaya, namun setengah orang mungkin mengalami kesukaran untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pesat tersebut. Cara budaya global mungkin kelihatan di luar jangkauan, terlalu asing, atau bahkan melemahkan nilai budaya dan kepercayaan mereka. Sebaliknya menjadi bicultural, mereka mungkin merasa asing dan dikecualikan dari kedua budaya lokal dan budaya global.

Delocalization terma dan displacement telah digunakan untuk menggambarkan proses ini. Untuk setengah orang muda, delocalization dapat mengakibatkan rasa pengasingan dan kefanaan karena mereka membesar dengan kekurangan kepastian budaya, dan kekurangan garis panduan yang jelas untuk menjalani kehidupan.

Di kalangan orang muda, kekeliruan identitas dapat dilihat dalam masalah seperti kemurungan, bunuh diri, penggunaan narkoba dan sebagainya. Hal ini terjadi sejak mereka berubah secara pesat ke arah menyertai budaya global.

Isu ketiga dari perubahan yang dibawa oleh globalisasi adalah pertumbuhan budaya yang dipilih sendiri. Hal ini bermakna bahwa orang-orang memilih untuk membentuk kelompok dengan orang-orang yang berfikir seperti ingin mempunyai identitas yang dicemari oleh nilai-nilai budaya global. Nilai-nilai budaya global, yang berdasarkan individualisme, ekonomi pasar bebas dan demokrasi - termasuk kebebasan, pilihan, hak individu, keterbukaan kepada perubahan, dan toleransi kepada perbedaan adalah sebagian dari nilai-nilai barat. Bagi kebanyakan orang di seluruh dunia, apa yang ditawarkan oleh budaya global adalah menarik. Salah satu kritikan yang paling keras dari globalisasi adalah bahwa globalisasi ingin mewujudkan satu budaya yang homogen di seluruh dunia, dimana semua anak-anak yang membesar dapat menjadi seperti bintang musik pop terbaru, memakan makanan Big Mac, berlibur ke Disney World, memakai celana jeans biru, Nikes dan sebagainya. Hasil ini adalah tidak mungkin karena kebanyakan orang akan membangun identitas bicultural, termasuk identitas lokal bersama-sama dengan identitas di tingkat global. Sedangkan kebanyakan orang muda dengan mudah dapat menerima globalisasi dan segala perubahannya

Akibat keempat dari globalisasi secara psikologi adalah penyebaran munculnya masa dewasa. Masa peralihan peranan orang dewasa seperti kerja, perkawinan dan peranan orang tua yang terjadi kemudian. Di berbagai tempat di dunia, kebutuhan untuk menyediakan pekerjaan yang berasaskan kepada teknologi dan informasi secara perlahan-lahan diperluas dari masa remaja kepada umur pertengahan dua puluhan. Bahkan, kuasa hirarki tradisional menjadi lemah karena tekanan globalisasi, remaja dipaksa untuk membangun kontrol terhadap kehidupan mereka sendiri termasuk perkawinan.

Penyebaran munculnya masa dewasa berkaitan dengan isu-identitas. Jika kurun munculnya masa dewasa hadir, orang muda mempunyai kurun yang lebih lama dalam menjelajahi identitas

mereka, seperti dalam hubungan cinta dan kerja, sebelum mereka melakukan pilihan jangka panjang. Oleh karena mereka mengalami hubungan cinta, pendidikan, dan pekerjaan yang berbeda, maka mereka dapat belajar lebih banyak tentang diri mereka sehingga mereka dapat menjelaskan keutamaan dan kemampuan mereka sendiri. Munculnya masa dewasa mungkin hanya dalam masyarakat di mana pembangunan ekonomi cukup tinggi, di mana buruh orang muda tidak diperlukan dengan segera. Mereka dibenarkan untuk menggunakan masa-masa awal remaja hingga ke pertengahan dua puluhan untuk menjelajahi berbagai kemungkinan bagi pembangunan diri mereka sendiri, karena tidak ada keperluan yang mendesak untuk menyumbang kepada kesejahteraan ekonomi keluarganya.

Globalisasi muncul menjadi sebuah kenderaan yang penting dalam psikologi pembangunan masyarakat abad ke-21. Globalisasi telah terjadi di dalam bentuk tertentu selama berabad-abad. Budaya telah lama saling mempengaruhi antara satu sama lain melalui perdagangan, migrasi, dan sebagainya. Sebagai akibat dari globalisasi adalah tantangan mewujudkan identitas yang berdaya maju adalah mungkin lebih besar dari tantangannya pada masa lalu. Menurut Giddens bahwa apabila globalisasi dapat mengubah dan mengikis cara tradisional, identitas telah diwujudkan dan diciptakan secara lebih aktif berbanding sebelumnya. Identitas kurang dipengaruhi oleh peranan sosial tetapi lebih berdasarkan kepada pilihan individu, bahwa setiap orang membuat keputusan sendiri tentang nilai apa yang akan dianut dan jalan apa yang akan ditempuh untuk meneruskan kerja dan sebagainya.

F. Pengaruh Globalisasi Terhadap Budaya Dalam Keluarga

Menurut Pais perubahan sosial mempunyai dampak yang luas dan sering menyokong pengaruh perubahan dalam keluarga. Malaysia yang terdiri dari berbagai budaya, suku dan kaum, berbagai bahasa dan dialek yang dituturkan serta banyak penduduk dunia yang tinggal di negara ini. Perbedaan kawasan-kawasan, topografi, suku dan kaum serta agama mendapatkan berbagai jenis gaya hidup dan budaya dapat tumbuh di negara ini.

Globalisasi adalah suatu kuasa baru yang mempengaruhi Malaysia. Berfikir demikian adalah bertujuan untuk mengabaikan keberbagaian dan kemajemukan budaya lama yang telah dibentuk oleh daftar panjang “serangan” budaya globalisasi, dan telah menjadi apa yang kita kenal sekarang. Pemecahan rangkaian keluarga tradisional membawa kepada korosi dukungan yang ada dalam keluarga terdekat dan keluarga jauh. Migrasi generasi muda dari luar kota ke kota, dan dari satu pusat kota ke pusat kota yang lain serta penghijrahan transnasional telah menyebabkan warga tua (orang tua) dibiarkan untuk hidup sendiri, ketika kepentingan keluarga menjadi lebih utama. Dengan lebih banyak wanita menjadi tenaga kerja, penjagaan warga tua (orang tua) dalam keluarga telah menurun. Bagi orang-orang yang hidup dalam keluarga besar, warga tua perlu hidup dalam keharmonian dengan generasi muda untuk menghadapi globalisasi dunia yang semakin kompetitif. Sistem dan budaya keluarga dekat semakin menjadi kebiasaan, gaya hidup modern, perubahan profesional dan prediksi pribadi memberi pengaruh kepada hubungan perkawinan dan komitmen.

Bagi wanita, pengaruh globalisasi telah membenarkan mereka untuk menjadi sebagian besar tenaga kerja, dengan kesempatan-kesempatan dan gaji yang lebih tinggi sehingga lebih meningkatkan keyakinan diri dan kebebasan mereka. Globalisasi telah memberikan kuasa untuk mencabut budaya dan pandangan tradisional tentang wanita sebagai ibu rumah tangga. Perkembangan komputer dan sektor teknologi menyiapkan wanita kelas menengah yang terpelajar dengan gaji yang lebih baik, dan keupayaan untuk berbicara mengenai peranan dan status mereka dalam keluarga dan masyarakat. Namun, pada saat ini masih ada wanita yang terus bekerja dalam situasi gaji yang murah, mental dan fisik yang tidak sihat dan tidak aman. Hal ini karena pengaruh dari globalisasi, di mana kebutuhan hidup dan keinginan hidup tidak lagi dapat dibedakan.



BAB
11

GLOBALISASI HUKUM

Memahami dinamika globalisasi dengan segala dimensinya, maka globalisasi juga akan memberi pengaruh terhadap hukum. Globalisasi hukum akan menyebabkan peraturan-peraturan negara-negara berkembang mengenai investasi, perdagangan, jasa-jasa dan bidang-bidang ekonomi lainnya mendekati negara-negara maju (*Convergency*). Globalisasi hukum ada juga yang menyebutnya sebagai reformasi hukum lintas batas komersial, tetapi apa pun istilah yang dilekatkan pada globalisasi hukum itu, ia pada intinya hendak menegaskan bahwa disamping hukum nasional suatu negara bangsa berkembang suatu hukum-hukum yang melampaui batas-batas kedaulatan negara bangsa.

A. Globalisasi

Dalam perspektif perbandingan sistem hukum benar adanya Hari Purwadi, bahwa Indonesia merupakan laboratorium hukum yang paling excelen di dunia. Karena memang tidak bisa diingkari, bahwa sebagian besar sistem hukum di Indonesia adalah sistem hukum import sejak dari zaman penjajahan sampai saat ini. Oleh karena itu, globalisasi hukum di Indonesia sudah berlansung sejak lama, akan tetapi globalisasi hukum yang terjadi masa lalu itu hanya menjadi sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam suatu negara bangsa yang berdaulat. Globalisasi hukum dalam perkembangannya justeru tumbuh dan berkembang melampau batas-batas kedaulatan negara dan kalau pun ia hidup dalam suatu negara nasional, tetapi perubahan dan penyesuaian sistem hukum itu lahir dari suatu kesepakatan internasional.

Dari sudut perkembangan globalisasi hukum yang demikian tentu bisa dipahami apabila pada abad mendatang akan berkembang apa yang disebut dengan "*the era of comparative law*", meskipun saat ini geraknya belum tampak terlalu kuat. Namun demikian, yang terpenting sebenarnya dalam kaitan ini memaksa kita untuk mendalami globalisasi hukum pada satu pihak dan sistem hukum global dipihak lain. Apakah kemudian sistem hukum global menjadi bagian dari globalisasi hukum atau globalisasi hukum melahirkan sistem hukum global, merupakan tema-tema yang menjadi focus pada bagian ini. Kalau secara nasional sudah jelas bagaimana pengaruh globalisasi itu menjaral dalam kehidupan sistem hukum nasional. Di Indonesia saja saat ini berkembang beberapa sistem hukum, yakni:

1. Civil Law System
2. *Common Law Sistem*
3. *Islamic Law*
4. *Socialisme Law*
5. *Customary Law* atau Sistem Hukum Adat

Oleh karenanya, jika globalisasi hukum bergulir ke ranah publik bersamaan dengan pengejewantahan globalisasi, bagi Indonesia tidak sepenuhnya benar, karena jauh sebelum Indonesia merdeka sudah terjadi impor sistem hukum ke Indonesia. Dengan demikian, pembicaraan terhadap globalisasi hukum di Indonesia beberapa waktu belakangan, tampaknya lebih merupakan suatu pembicaraan berkaitan dengan pergerakan globalisasi di bidang lain. Dalam banyak pembicaraan dan bahasan sering diutarakan, bahwa globalisasi hukum diberbagai bidang, semisal globalisasi di bidang ekonomi, teknologi harus di ikuti dengan globalisasi hukum. Artinya globalisasi hukum berada dibelakang globalisasi bidang lain. Jika disetujui, bahwa globalisasi ekonomi merupakan manifestasi baru dari perkembangan kapitalisme sebagai sistem ekonomi sosial, dimana transaksi dan lalu lintas ekonomi dan perdagangan tidak lagi terikat pada asal negara dari berbagai sistem hukum dan tradisi, maka globalisasi ekonomi harus diikuti globalisasi hukum. Meskipun demikian, tetap saja ada keraguan, dimana globalisasi hukum itu tetap diharapkan berlansung pada sistem hukum yang berbeda. Artinya,

model ini tidak menjelaskan apakah globalisasi hukum memiliki sistem sendiri atau sistem hukum yang berbeda menjadi kekayaan dari globalisasi hukum.

Terkait dengan globalisasi itu, Soetandyo Wigjosoebroto mengemukakan, bahwa proses nasionalisasi setakat ini belum selesai, namun proses baru yang dikenali sebagai proses globalisasi sudah memasuki ambang pintu. Ini suatu proses yang lebih berhakikat sebagai proses ekonomi dan sosial kultural daripada sebatas proses politik, nota bene proses politik yang diilhami oleh semangat dan paham nasionalisme, dengan cita-citanya yang tak mau ditawar untuk mewujudkan kesatuan bangsa di bawah kontrol kepemimpinan yang berlegalitas kuat. Akan tetapi, kini kenyataan telah kian menjadikan cita-cita seperti itu bagaikan ilusi belaka. Kini, perkembangan kehidupan tidak lagi berhenti pada jalannya proses integrasi komunitas-komunitas lokal ke satuan-satuan nasional, melainkan bersiterus ke prosesnya yang kian berlanjut. Hal ini memperkuat globalisasi hukum menjadi suatu yang tidak terhindarkan dan akhirnya meminta kita untuk mengamini, bahwa kehidupan nasional di manapun, baik yang menyatukan manusia-manusia yang terbilang 'bangsa tua' yang muncul dalam sejarah sebagai bangsa penjelajah maupun yang terbilang 'bangsa muda' yang terjelajahi, kini ini telah terkocok ulang dalam suatu kekisruhan yang namun begitu bolehlah tetap direspons secara optimistik sebagai suatu proses yang secara progresif menuju ke bentuk-bentuknya yang baru.

Dalam perpesktif seperti dikemukakan di atas, bagaimana sistem hukum global memainkan peran dan eksistensinya tidaklah mudah, sementara dilain pihak diyakini global society bukanlah suatu global state. Adanya juga yang menyebut Global state lebih tepat kalau dikatakan sebagai "masyarakat pasar" yang boleh juga disebut a global economy. Hal ini tentu menjadi integral dengan global society, dimana masyarakat negara bangsa terbebas dari ikatan-ikatan hukum nasional mereka. Dalam perkembangan saat ini, globalisasi berkembang lebih jauh dari pada global state (masyarakat pasar) atau global state dalam pemahaman yang lebih luas sebagai "negara dunia" yang hadir dalam bentuknya yang nyata, tetapi berkembang dalam apa yang disebut dengan "tanggung jawab global".

Keadaan itu tampak rumit dibanding memahami globalisasi hukum dalam perspektif tuntutan dari globalisasi ekonomi-perdagangan atau bidang lainnya. Jika, global economy bekerja melampaui batas-batas *nation state* yang selama ini dirasakan sebagai hambatan, sekarang Jika terjadi silang sengketa dalam hubungan kontratual yang tidak bersanksi negara itu, maka penyelesaiannya akan dilakukan lewat apa yang disebut ADR (*alternative dispute resolution*), mulai dari yang bermodel renegosiasi atau mediasi sampai ke yang disebut arbitrase. Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti ini mulai banyak dipilih daripada penyelesaian-penyelesaian adjudikatif lewat litigasi-litigasi di badan-badan peradilan nasional. Pada tataran ini tampak globalisasi hukum sebagai dampak dari globalisasi ekonomi melahirkan suatu sistem hukum. Pilihan penyelesaian sengketa dari hubungan perdagangan dalam ranah globalisasi seperti yang terjadi pada bidang ekonomi/perdagangan itu, tentu akan tampak berbeda dalam konteks "*global state*" yang berwujud dalam tanggung jawab global.

Bagi Indonesia sendiri pengaruh globalisasi itu, selain menuntut penyesuaian sistem hukum nasional, globalisasi hukum sekaligus menghadapkan Indonesia pada berbagai penuntasan persoalan hukum yang harus diselesaikan. Tidak saja menyangkut grand desain hukum nasional yang belum ada, ada sejumlah keadaan hukum Indonesia atau apa yang dinamakan dengan (*the existing legal system*) yang menunjukkan hal sebagai berikut :

Dilihat dari substansi hukum asas dan kaidah hingga saat ini terdapat berbagai sistem hukum yang berlaku sistem hukum adat, sistem hukum agama, sistem hukum barat, dan sistem hukum nasional. Tiga sistem hukum yang pertama merupakan akibat politik hukum masa penjajahan. Secara negatif, politik hukum tersebut dimaksudkan untuk membiarkan rakyat tetap hidup dalam lingkungan hukum tradisional dan sangat dibatasi untuk memasuki sistem hukum yang diperlukan bagi suatu pergaulan yang modern.

Ditinjau dari segi bentuk, sistem hukum yang berlaku lebih mengandalkan pada bentuk-bentuk hukum tertulis. Para pelaksana dan penegak hukum senantiasa mengarahkan pikiran hukum pada peraturan-peraturan tertulis. Pemakaian kaidah hukum adat atau

hukum Islam hanya dipergunakan dalam hal-hal yang secara hukum ditentukan harus diperiksa dan diputus menurut kedua hukum tersebut. Penggunaan jurisprudensi dalam mempertimbangkan suatu putusan hanya sekedar untuk mendukung peraturan hukum tertulis yang menjadi tumpuan utama.

Bagaimana globalisasi hukum dan perkembangannya merasuki sisten hukum nasional, maka dipihak lain globalisasi hukum pun menampakkan wujudnya sendiri yang tidak sekedar berupa adaptasi yang dilakukan dalam sistem hukum nasional. Bahwa keberadaan ADR sebagai sistem hukum global tentulah tidak akan sama keberadaanya dengan keberadaan Mahkamah Internasional yang mengurus peradilan atas pelanggaran hak azasi manusia. Globalisasi hukum kemudian memperlihatkan wujudnya yang lain, dimana Mahkamah Internasiona; sebagai sistem hukum global sebagai suatu intrumen negara dunia (global state). Meskipun tidak terang-terangan dimaksudkan demikian, namun pengadilan-pengadilan nasional bukan satu-satunya tempat berproses bagi suatu kejahatan –yang meskipun masih dibatasi objek dan subjeknya--, tetapi ada lagi Mahkamah Internasional sebagai alternative. Mahkamah Internasional akan bekerja atas suatu pengaduan/tuntutan, sekalipun yang teradukan adalah suatu tindakan dari pejabat pemerintah negara nasional yang sah.

Berdasarkan dinamika globalisasi yang mempengaruhi bidang hukum, maka globalisasi hukum sepertinya berakar pada dua hal, Pertama globalisasi hukum yang berakar pada globalisasi ekonomi dan bidang lainnya yang menempatkan global state sebagai “masyarakat pasar. Kedua globalisasi hukum yang berakar pada global state yang menampakkan wujudnya dalam apa yang disebut dengan “tanggung jawab global”. Hal ini mengindikasikan, globalisasi hukum ternyata lebih rumit dibanding globalisasi ekonomi. Globalisasi hukum dalam artian tanggung jawab global telah menempatkan dirinya sebagai alat bagi global state. Kondisi ini mirip dengan hukum sebagai alat kekuasaan sebagaimana terjadi pada negara-negara bangsa (negara nasional).

Dengan demikian, globalisasi dan pengaruhnya pada kehidupan hukum, yang kini ini kian tak lagi gampang dikontrol oleh kekuasaan

sentral negara nasional, telah mengundang perhatian yang serius dari berbagai pengkaji dan pembuat kebijakan di manapun, baik yang nasional maupun yang internasional. Hukum berformat macam apakah yang kini ini mesti beroperasi di berbagai kancah, mulai yang transnasional, nasional dan juga subnasional. Tatkala negara-negara nasional terpaksa banyak membuka perbatasan-perbatasannya, dan perubahan-perubahan kehidupan ekonomi yang berimbas ke kehidupan politik, sosial dan kultural – telah meningkatkan jumlah manusia berikut ide dan ideologinya yang melintasi berbagai sekatan, masalah penataan tertib dan kekuasaan struktural penertibnya akan menjadi pekerjaan rumah para pemimpin masa depan.

B. Globalisasi hukum

Terlepas dari bagaimana hubungan yang menyelimuti antara hukum nasional dan globalisasi hukum itu, berkaca pada apa yang mengarus pada globalisasi ekonomi, maka globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi dalam arti substansi berbagai undang-undang dan perjanjian yang menyebar melewati batas-batas negara. Globalisasi hukum dapat terjadi melalui perjanjian dan konvensi internasional, hukum privat, dan institusi ekonomi baru. Globalisasi hukum itu kemudian diikuti dengan praktek hukum, dimana antara lain konsultan hukum suatu negara dan suatu sistem hukum, dapat bekerja dinegara lain yang mempunyai sistem hukum yang berbeda. Akan tetapi dibalik globalisasi hukum ada hukum global.

Jika demikian halnya, maka dalam bertumbuhnya globalisasi sedemikian rupa suka atau tidak suka pengaturan-pengaturan hukum kita akan dihadapkan pada apa yang digambarkan Paul Schiff Berman, *“we need to realize that normative conflict among multiple, overlapping legal systems is unavoidable and might even sometimes be desirable, both as a source of alternative ideas and as a site for discourse among multiple community affiliations”*. Persoalannya menjadi tidak hanya sekedar menyangkut pertempuran hukum lokal yang dihadapan pada globalisasi hukum, tetapi sekaligus dengan hukum global. Persoalannya kemudian, bagaimana sistem hukum global bekerja dan eksis.. hidup berdampingan dengan hukum nasional.

C. Sistem Hukum Global dalam Perspektif Politik Hukum Nasional

Hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa bersangkutan, maka sebenarnya pembentukan hukum suatu negara harus bebas dari pengaruh dan kepentingan negara lain. Kalau belakangan terdengar nyaring disuarakan, kita butuh pembentukan hukum yang demokratis, namun pembentukan hukum yang demokratis tidak sekaligus berarti hukum yang dibentuk akan efektif. Dalam konteks ini misalnya, mission dari sebuah undang-undang bukan terletak dari seberapa demokratis pembentukan undang-undang yang dibentuk, tetapi terletak pada sejauh mana apa yang ingin dituju dari pembentukan undang-undang dapat dicapai atau tercapai. Artinya, keuntungan dari pembuatan hukum partisipatif lebih merupakan sebagai upaya meningkatkan karakter demokratis dan legitimasi hukum dari undang-undang yang dibentuk.

Jika hukum suatu bangsa merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa bersangkutan, maka ia menjadi paradoks dengan globalisasi hukum. Meskipun dalam beberapa hal tertentu globalisasi hukum dipahamkan pula globalisasi hukum akan tetap berlangsung dalam sistem hukum yang berbeda. Betapa pun globalisasi hukum sesuatu yang sukar dihindari, tetapi negara bangsa tidak akan begitu saja menyerahkan fungsi kedaulatan mereka, dan dalam suatu system global tidak akan berlangsung bebas control dari negara bangsa karena globalisasi bukanlah jalan tol tanpa mekanisme. Mekanisme bagaimana lalu lintas hubungan masyarakat negara bangsa, justeru dibangun atas suatu perjanjian atau kontrak, konvensi, sehingga bedanya yang tadinya pembatas itu adalah hukum nasional, kemudian pembatasan itu adalah kesepakatan antara negara bangsa.

Kebanyakan pandangan melihat Globalisasi sebagai proses transpormasi bebas hambatan dan mekanismenya terserah pada “masyarakat pasar”. Padahal tidaklah demikian, globalisasi sesungguhnya lebih tampak sebagai “membuka pagar” rumah, tetapi dalam rumah dan perkarangan tetap ada aturan main. Dalam konsep kehidupan mana pun tidak ada suatu kelompok masyarakat yang membiarkan kehidupannya dan teritorialnya tanpa hukum.

Dalam perspektif ini, kekeliruan utama dalam menyikapi globalisasi seakan-akan orang boleh melakukan kesepakatan menurut kemauan mereka sendiri, dan mengabaikan peran, fungsi negara. Kesalahan lain adalah dengan globalisasi selalu ditekankan, kedaulatan negara bangsa akan melemah, tetapi tidak dijelaskan melemahnya dalam hal apa dan itu mungkin terjadi jika globalisasi diterjemahkan sebagai bentuk “penjajahan” model baru.

Tidaklah selalu benar pandangan-pandangan terhadap soal melemahnya kedaulatan negara nasional lantaran globalisasi. Bila McGrew, yang menyatakan bahwa: “Keberadaan jaringan aktivitas global dan regional, rezim internasional, tata pemerintahan global dan regional, gerakan sosial di tataran transnasional, interaksi hukum global dan transnasional, dan berbagai jenis asosiasi transnasional, dapat diinterpretasikan sebagai munculnya ‘ruang politik (dan hukum) ‘ jenis baru yang melepaskan diri dari ikatan wilayah negara. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan Jayasuriya (2001) yang menyatakan bahwa, perubahan utama dari karakteristik kedaulatan terletak pada pergeseran dari Pemerintahan (*Government*) menjadi Tata Pemerintahan (*Governance*). Jayasuriya lebih lanjut menyatakan bahwa kekuasaan pemerintah menjadi semakin terpecah dan tersebar luas di antara di pasar dan masyarakat sipil atau dengan kata lain kedaulatan telah terdistribusikan di berbagai lembaga dan aktor. Negara dan kedaulatannya tidak menghilang atau berkurang – bahkan sebaliknya, mereka mendapatkan peran baru – namun mereka tidak lagi dapat melaksanakan kekuasaan mereka secara efektif seperti sebelumnya.

Mencermati pendekatan-pendekatan terhadap globalisasi dan hubungan dengan kedaulatan negara –termasuk kedaulatan hukum—nasional, memang berdampak terhadap hukum nasional. Meskipun demikian, Teubner (2004) menyatakan bahwa munculnya globalisasi hukum yang tidak berakar pada undang-undang dan tata urutan norma telah membuat kita perlu untuk mendiskusikan kembali doktrin tradisional mengenai sumber hukum. Karena itu globalisasi hukum seperti lebih tampak sebagai interaksi hukum masa kini telah merubah pembangunan karakter hukum nasional dan internasional dan itu pun tidak untuk seluruhnya.

Meningkatnya ketergantungan pada pasar selama rezim globalisasi juga tidak dapat dipisahkan dari gerakan ekonomi liberalisme yang berasal dari “Konsensus Washington” yang menghendaki reduksi secara sistematis terhadap peran Negara dalam sistem ekonomi nasional hingga ke titik minimal. Neoliberalism pada umumnya juga berpihak pada tekanan politik multilateral melalui organisasi-organisasi internasional atau perjanjian perangkat seperti WTO, Bank Dunia, IMF atau ADB. Neoliberalism berpihak pada privatisasi dan mengukur keberhasilan pembangunan berdasarkan keuntungan ekonomi yang didapat secara keseluruhan. Namun dalam prakteknya kontrol atas kebijakan ekonomi politik dalam negeri tidak sepenuhnya terlepas dari kontrol Negara dan Negara tetap melakukan intervensi politis atas kebijakan-kebijakan ekonomi. Bahkan aktor-aktor dalam pasar internasional juga sesungguhnya merupakan representasi kepentingan negara-negara industri, dan bukan digerakkan oleh *‘invisible hand’* (kepentingan pasar). Beberapa pemikiran terhadap globalisasi hukum seperti dikemukakan di atas, tentu tidak dalam frame anti globalisasi, tetapi secara substantif globalisasi hukum dengan sistem hukum globalnya harus mampu menjawab keterpeliharaan prinsip-prinsip kedaulatan suatu negara dan disisi lain adalah perdamaian dunia yang substansial. Globalisasi, termasuk globalisasi hukum, bergerak kearah bentuk model “penjajahan” dalam bentuk baru. Bahkan yang harus dihindarkan adalah pengingkaran terhadap hak asasi suatu warga negara bangsa yang tidak terlihat, tetapi ia tampak sebagai globalisasi sebagai sebuah kebutuhan dalam pergaulan dan hubungan ekonomi lintas negara nasional.

Terkait dengan uraian di atas, globalisasi hukum semestinya tidak dipersamakan atau dipandang sama sebangun dengan globalisasi di bidang ekonomi maupun teknologi. Banyak para pengamat mengingatkan, bahwa keberadaan Mahkamah Internasional cenderung dipergunakan negara bangsa yang mengemban tanggung jawab internasional untuk menjalankan kepentingannya. Meskipun kecurigaan itu selalu ditepis dengan dalih nilai-nilai dan pelanggaran-pelanggaran atas kesepakatan internasional. Di lain hal, tidak sedikit pula muncul kritik, bahwa dalam area pembentukan hukum dan kebijakan, globalisasi menimbulkan dampak negative dalam

hal berkurangnya tingkat kebebasan negara dalam penyusunan kebijakan ekonomi –dan terkadang harus dilakukan dengan merobak kebijakan tertentu yang sudah ditetapkan dengan undang-undang negara nasiona--, hal ini utamanya terjadi pada negara-negara berkembang atau negara-negara yang memiliki ketergantungan pada negara-negara maju.

Santos (2004) sebagaimana dikutip Dian Rositawati, meyakini bahwa ketidakseimbangan kekuatan antara Utara dan Selatan telah mengancam kedaulatan Negara yang lebih lemah. Santos lebih lanjut menambahkan bahwa berbagai tekanan terhadap kedaulatan Negara-negara berkembang sebagian besar berasal dari lembaga-lembaga transnasional. Negara-negara berkembang yang terperangkap dalam hutang dan memperoleh bantuan keuangan dari berbagai Institusi Keuangan Internasional (International Finance Institutions - IFIs), dituntut untuk melakukan reformasi ekonomi dan pembuatan kebijakan sebagaimana ditetapkan dalam berbagai perjanjian perbaikan struktural (structural adjustment) oleh IFIs. Keadaan mana pernah juga dialami Indonesia, sebagai organisasi donor, IMF memberikan sejumlah syarat dan meminta perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai syarat untuk mengucurkan pinjaman. Bahkan IMF secara terang-terangan pernah meminta pemerintah Indonesia membatalkan sekitar ratusan peraturan daerah (Perda) untuk dibatalkan karena dinilai telah menghambat kelancaran arus barang dan jasa. Kejadian itu tentu saja mengidikasikan, bahwa globalisasi ekonomi melalui organisasi pembiayaan internasional seperti IMF telah menempatkan Indonesia otonominya melemah untuk tidak mengatakan tidak punya dalam hukum dan kebijakan nasionalnya. Bahkan yang terjadi sampai kepada pemerintahan yang lebih bawah dari pemerintah pusat.

D. Dampak Globalisasi Hukum

Dari kenyataan yang demikian terlihat bagaimana dampak negatif dari globalisasi dan sekaligus globalisasi hukum, dimana negara-negara industri memiliki kemampuan untuk dapat mengambil keuntungan terhadap negara yang lebih miskin yang umumnya memiliki fungsi kelembagaan yang lebih buruk (sistem administrasi,

sistem hukum, dan sebagainya) dalam konstalasi ekonomi dan politik internasional. Negara berkembang yang memiliki kelemahan posisi tawar, seringkali tidak memiliki mekanisme efektif untuk mengartikulasikan pandangan dan kepentingan mereka di hadapan aktor privat atau kelompok industri besar dalam proses negosiasi multilateral.

Dengan demikian, globalisasi dan pengaruhnya pada kehidupan hukum, yang kini ini kian tak lagi gampang dikontrol oleh kekuasaan sentral negara nasional, telah mengundang perhatian yang serius dari berbagai pengkaji dan pembuat kebijakan di manapun, baik yang nasional maupun yang internasional. Hukum berformat macam apakah yang kini ini mesti beroperasi di berbagai kancah, mulai yang transnasional, nasional dan juga subnasional. Tatkala negara-negara nasional terpaksa banyak membuka perbatasan-perbatasannya, dan perubahan-perubahan kehidupan ekonomi yang berimbas ke kehidupan politik, sosial dan kultural – telah meningkatkan jumlah manusia berikut ide dan ideologinya yang melintasi berbagai sekatan, masalah penataan tertib dan kekuasaan structural penertibnya akan menjadi pekerjaan rumah para pemimpin masa depan. Beberapa hal yang telah kemukakan di atas, maka tentu dengan sendirinya globalisasi hukum menjadi suatu pemikiran dalam politik hukum nasional. Meskipun di awal tulisan ini telah dikemukakan, bahwa menguatnya arus globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan, sebenarnya tidak sulit bagi Indonesia untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi. Secara sosial maupun historis, masyarakat Indonesia sudah terbiasa hidup dalam pruralisme dan keberagaman, termasuk pruralisme dan keberagaman hukum. Indonesia sebagai negara bekas jajahan Belanda dikenal sebagai Negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*European Continental Legal System*). Sedangkan sistem hukum Anglo Saxon atau disebut juga dengan *Common law system* dianut oleh negara Inggris dan negara-negara bekas jajahan Inggris.

Sistem hukum Indonesia banyak dipengaruhi sistem hukum Belanda yang sistem hukum Belanda sendiri adalah sistem hukum Eropa yang awalnya bersumber dari sistem hukum Romawi. Sistem hukum Romawi itu kemudian lebih dikenal dengan sebutan sistem

hukum *Civil Law*. Dalam konteks ini Rene Devid dan Jon EC Brierly, mengatakan selain sistem hukum civil law dikenal pula sistem hukum cammon law.

Dalam berbagai literature pada umumnya mengambil garis tegas, bahwa ada 3 bentuk sitem hukum yang dominan, --artinya masih ada sistem hukum yang lain seperti sistem hukum adat, sistem hukum islam sebagaimana ada di Indonesia—yaitu: Sistem hukum Romawi Jerman (*civil law*); cammon law system; dan socialist law system. Meskipun demikian masih terdapat beberapa pandangan mengenai keberadaan sistem hukum tersebut, tetapi pada intinya hanyalah memberikan informasi dan perluasan pandangan, bahwa sebenarnya terdapat banyak sistem hukum apabila diselediki kebanyakan negara-negara dunia.

Persoalannya kemudian, disamping sistem hukum yang diterapkan suatu negara yang sudah mapan dihadapkan pada era globalisasi, yang ternyata kemudian membentuk suatu tatanan lingkungan hukum baru dalam pergaulanan internasional. Dalam konteks ini, Era Globalisasi ternyata tidak hanya menuntut pembaharuan hukum nasional suatu negara, tetapi memunculkan suatu sistem hukum sendiri yang dinamai dengan sistem hukum global.

Terdapat contoh yang tepat bagaimana sistem hukum global kemudian mempengaruhi sistem hukum nasional, seperti berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Dalam konteks ini Prof.Syafrinaldi mengemukakan, bahwa bila kita berbicara mengenai suatu bidang ilmu hukum secara khusus, seperti hukum hak kekayaan intelektual (HKI), maka bidang hukum yang relative masih baru di Negara Indonesia juga memiliki sistem hukum tersendiri. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum (*legal protection*) kepada karya intelektual manusia, baik itu dalam bidang hak cipta dan hak-hak terkait, paten, merek, perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Lebih jauh dikemukakan, dalam bidang hak kekayaan intelektual, system hukum yang berkembang di masing-masing Negara, termasuk juga di Indonesia, sangat dipengaruhi oleh hukum internasional dan juga oleh hukum negara-negara lain. Hal ini tidak bisa dinafikan, karena bagaimana pun sistem hukum internasional yang mengatur mengenai

hak kekayaan intelektual lebih duluan lahir dan berkembang secara dinamis dan progresif dibandingkan dengan hukum nasional.

Selain itu, pengaruh globalisasi telah memasuki kehidupan hukum di Indonesia dengan adanya bidang-bidang hukum baru seperti Hukum Perusahaan (*corporative law*), Hukum Komputer (*computer law*), Hukum Siber (*cyber law*) dan sebagainya. Pembentukan bidang hukum baru itu merupakan adopsi dari ketentuan dan norma hukum asing untuk dijadikan norma dan ketentuan hukum kita padahal terkandung hal itu tidak cocok dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian, tampak bagaimana suatu sistem hukum tumbuh dan berkembang pada suatu negara. Perkembangan industrialisasi dan paham kapitalisme yang diikuti perubahan sosial, kultur dan hubungan masyarakat dengan negara yang terjadi di Eropa Barat pada abad 19, telah mewarnai corak sistem hukum modern. Bahkan bisa jadi seperti ada pendapat yang menyatakan, bahwa saintifikasi dan sistem hukum modern yang tumbuh pada abad 19 itu sesungguhnya dimaksudkan untuk melayani tatanan sosial yang bercorak pasar bebas yang kompetitif melalui kebebasan yang dijamin oleh sistem demokrasi.

Terkait dengan dinamika sistem hukum yang demikian, Donald Black menyebutkan hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah (*law is the governmental social control*), sehingga sistem hukum adalah sistem kontrol sosial yang didalamnya diatur tentang struktur, lembaga, dan proses kontrol sosial tersebut. Walaupun demikian ia mengakui tidak semua kontrol sosial adalah hukum, kontrol sosial yang bukan hukum adalah sifat tidak resmi karena tidak memiliki daya paksa. Sementara itu Lawrence M. Friedman mengatakan sistem hukum tidak saja merupakan serangkaian larangan atau perintah, tetapi juga sebagai aturan yang bisa menunjang, meningkatkan, mengatur, dan menyanggahkan cara mencapai tujuan. Dia juga percaya bahwa hukum tidak saja mengacu pada peraturan tertulis atau kontrol sosial resmi dari pemerintah, tetapi juga menyangkut peraturan tidak tertulis yang hidup ditengah masyarakat (*living law*), menyangkut struktur, lembaga dan proses sehingga berbicara tentang hukum, kita tidak akan terlepas dari pembicaraan tentang sistem hukum secara keseluruhan.

Pembangunan hukum di Indonesia sampai saat ini masih menjadi diskursus yang hangat dikalangan ahli hukum khususnya. Pasang surut dan dinamika pembangunan hukum di Indonesia telah memberikan banyak pelajaran dalam mewujudkan tujuan negara. Pada zaman Orde Lama dalam bentuknya yang “primitif” mulai dituangkan secara garis besarnya dalam “Pembangunan Semesta Berencana”, namun isinya sangat kental dengan nuasa politik ketimbang nuasa hukumnya. Bahkan HAS Natabaya lebih jauh mengemukakan, bahwa pembangunan hukum hanya sebagai pendukung atau legitimasi politik pemerintah/penguasa (politik) sebagai panglima, bukan untuk kepentingan rakyat dan kepentingan menegakkan hukum dan keadilan atau kepentingan hukum itu sendiri.

Setelah rezim Orde lama di gantikan rezim Orde Baru, dimulai era baru pembangunan hukum dengan diakomodasinya pendapat Rescoe Pound yaitu *law as tool of social engineering* (hukum adalah sebagai alat rekayasa masyarakat) yang dimodifikasi oleh Muchtar Kusumaatmadja dengan istilah “hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat”. Meskipun demikian pada zaman Era Orde Baru ini, pembangunan hukum masih menjadi subsistem dari pembangunan politik. Keadaan itu baru berubah pada sekitar tahun 1993, dimana pembangunan hukum ditempatkan sebagai sub-sistem pembangunan nasional yang mandiri, tetapi pengaruh dan intervensi politik terhadap pembangunan hukum sudah terlanjur kuat.

Tekait dengan pembangunan hukum pada kedua era rezim itu, Natabaya mengungkapkan, bahwa dengan diadopsinya pendapat Muchtar Kusumaatmadja, bahwa hukum adalah sebagai sarana pembangunan, maka pandangan Mazhab Sejarah von Savigny ditinggalkan. Dengan demikian adagium tradisional yang berbunyi “het recht ging achter de feiten aan” sejak tahun 1974 telah ditinggalkan dan menuju ke adagium baru yaitu hukum sebagai alat rekayasa social dan berjalan didepan untuk mengubah masyarakat dari kehidupan yang tidak/kurang baik ke kehidupan yang lebih baik (sejahtera).

Dari fakta yang berbicara pada dua rezim pemerintahan yang pernah berkuasa di Indonesia terlihat dengan jelas, pembangunan

hukum bukanlah sekedar pembangunan hukum, tetapi sekaligus pertarungan aliran atau paham hukum. Disisi lain kepentingan politik atau intervensi politik terus memaikan taringnya, meskipun kemudian hukum ditempatkan sebagai sub-sistem pembangunan nasional yang mandiri. Lalu, bagaimana keadaannya setelah Orde baru tumbang dan bergulir era Reformasi yang sampai saat ini (2011) sudah berlasung belasan tahun, adakah yang berubah dengan pembangunan hukum nasional?

Pembangunan hukum di era reformasi tampaknya masih menjadi debatable, dimana pada ada ketidakpuasan untuk tidak mengatakan menyalahkan konsep pembangunan hukum yang diterapkan selama Orde Baru dan disisi lain Indonesia belum pula menemukan paradigma pembangunan hukum yang ideal dan cocok. Sekalipun UUD 1945 sudah diamandemen, tetapi pembangunan hukum belum dapat dikatakan terarah dan terpadu sebagaimana pada masa Orde Baru. Atas kenyataan ini, maka sebenarnya pembangunan hukum di Indonesia sedang dihadapan pada keadaan tidak “menentu”, kecuali adanya keinginan untuk mengembangkan suatu konsep pembangunan hukum yang lebih demokratis dan kearah masyarakat sipil (*civil society*) yang lebih sejahtera.

Dilema yang dihadapi dalam pembangunan hukum nasional itu, secara tidak langsung tentu mempengaruhi segala aspek kehidupan hukum di Indonesia. Bahkan Indonesia belum memiliki grand disain pembangunan hukum nasional, disisi lain penyelenggaraan pemerintahan harus berjalan dan berjalan di atas ketentuan hukum yang ada, termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibentuk pada zaman Orde Baru. Keadaan itu sebenarnya sangat berpengaruh pada sistem hukum sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional. Dapat dipahami bagaimana eksistensi sistem hukum yang mempunyai fungsi dan peran yang menentukan dalam pengembangan hukum di Indonesia, ini setidaknya dapat ditelusuri ketika hukum di Indonesia yang ada sebagian besar terbentuk dibawah konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat atau sebagai tool social of engineering. Parahnya lagi, dimana selama rezim Orde Baru GBHN berisi kebijakan-kebijakan nasional yang berisikan garis-garis besar pembangunan hukum nasional yang

kemudian dapat diacu oleh semua pihak penyelenggara negara untuk kemudian dituangkan dalam berbagai macam kebijakan (beleid/policy) yang lebih konkrit/normative baik dalam wujud UU maupun peraturan lainnya, tetapi tidak demikian halnya pasca amandemen UUD 1945 sebagai salah satu hasil reformasi. Pasca amandemen UUD 1945 tidak dikenal lagi GBHN dan setiap lembaga negara dalam hal ini administrasi negara—berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi serta wewenangnya masing-masing dan kemudian saling mengawasi dan saling mengendalikan (*cheks and balances*) dan tidak berpuncak pada pertanggung jawab kepada MPR. Akibatnya menurut Natabaya, pembangunan hukum nasional yang akan dituangkan dalam UU harus dalam bentuk norma (*normative*) tidak bisa UU berisi program/rencana jangka pendek, menengah dan panjang. UU harus mengatur secara normative yang berisi larangan (*verbod*), suruhan, perintah (*gebod*) dan kebolehan (*toestimming*).

Memahami ciri-ciri sistem hukum global dan akar sistem hukum global yang tumbuh dan berkembang dari pergaulan internasional dalam segala dimensi dan aspeknya, keberadaan sistem hukum global sepertinya mengarah pada suatu tatanan hukum yang meliputi negara-negara dunia, dan disepakati sebagai aturan bersama. Namun masih menjadi pertanyaan, biasanya suatu sistem hukum hidup dalam lingkup suatu negara yang berdaulat dengan hukumnya yang berdaulat pula, tetapi sistem hukum global hidup di atas negara-negara berdaulat, karena tidak ada Global State.

Apabila demikian halnya, apakah memang ada yang disebut dengan sistem hukum global itu. Sebagaimana layaknya pada sistem hukum civil law atau common law system ia hidup dalam suatu state. Dalam hubungan ini dengan cara bagaimana sistem hukum global itu hidup dan eksis layaknya sebagai sebuah sistem hukum. Tidak mudah memang untuk memberikan jawaban yang tepat ketika kita membandingkannya dengan keberadaan suatu sistem hukum di dalam sebuah negara.

Namun demikian, dalam faktanya sistem hukum global itu ada yang dalam banyak pembahasan tidak selalu disebut dengan sistem hukum global. Sekalipun diembeli dengan sistem hukum global, tapi belum tentu berlaku global. Karena suatu ketentuan

hukum yang telah dibuat atas kesepakatan bersama negara-negara belumlah tentu netral dan tidak berpihak serta belum tentu pula sepenuhnya cocok disuatu negara. Keberpihakan hukum pada kekuatan yang lebih dominan pada sistem hukum global bisa terjadi karena sesungguhnya basis social hukum penuh dengan hubungan yang kompleks, tidak kaku, bahkan bisa mengarah pada keadaan yang tidak seimbang.

Menurut teori ini, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional. (Burhan Tsani, 1990; 26)

Memperhatikan hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional tersebut, maka sistem hukum global yang dicirikan terbentuknya Mahkamah Hukum Pidana Internasional (ICC) berkaitan dengan masalah War Crimes, Genocida, Crimes against corruption dan lain-lain, ia jelas menunjukkan sistem hukum global berada di atas sistem hukum nasional. Di pihak lain prinsip-prinsip sistem hukum global adakalanya menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Artinya, sukar untuk menarik pemisah yang tegas, karena antara sisten hukum nasional dan sistem hukum nasional secara subtansial terkadang terlihat integral.

Meskipun demikian, terlepas dari kesulitan itu, pembanguna sistem hukum nasional saat ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sistem hukum global. Artinya, telah terjadi transpalasi hukum, yang tidak hanya dalam sistem hukum nasional, tetapi juga berlansung dari sistem hukum yang satu ke sistem hukum yang lain dan dapat dilihat adanya perubahan dari sistem hukum kepailitan misalnya. Apabila diperhatikan sejarah hukum kepailitan ini diketahui terjadi perubahan dari hukum kepailitan yang lama (*Failisement Verordening*) yang bercirikan Sistem Eropah Kontinental ke arah Sistem Hukum Anglo Saxon.

Dalam kaitan itu, sejak terjadinya krisis moneter di Indonesia hukum kepailitan selanjutnya diganti oleh Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian dikuatkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998. Dan sebagai salah satu negara penganut Civil Law Country, maka hukum kepailitan di Indonesia tidak jauh berbeda dengan negara-negara yang termasuk ke dalam kelompok hukum Civil Law Country. Bila ditelusuri dari akar

sejarahny hukum kepailitan Indonesia sesungguhnya sama dengan hukum kepailitan di Negeri Belanda yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Bagaimana implementasi hukum kepailitan itu di Indonesia, selain memiliki sejumlah kelemahan dan lahir dengan latar belakang yang berbeda disbanding dengan hukum kepailitan di Amerika Serikat.

Dalam konteks itu, Joseph Dainow menyebutkan *However, in order to understand the two system properly, there are disparities which must be recognized and evaluated. For more specific identification of ideas, it is useful to consider five points of reference : the training and recruitment of judges, the method of arriving at decisions, the personalization of opinions or the colegiality of judgements, the manner of writing opinions, and the atitude of the judge in case of silence and insufficiency of the written or estblished law.* Oleh sebab itu pada akhirnya globalisasi hukum, sekalipun dengan tema yang sama tetapi prakteknya berbeda. Artinya, globalisasi hukum tidak identik dengan uniformitas hukum. Ini lagi-lagi menampakkan karakternya yang berbeda dengan globalisasi ekonomi yang mungkin cenderung menampakkan wujudnya yang relative sama. Bila dalam hukum kepailitan di Amerika Serikat dikenal adanya Reorganization perusahaan, maka hal ini tidak dikenal dalam hukum kepailitan di Indonesia Di lain pihak, masalah kepailitan di Amerika Serikat terjadi karena adanya adanya utang piutang antara debitor dan kreditor. Permasalahan baru muncul apabila debitor berheni membayar utangnya pada waktu jatuh tempo, baik karena tidak mau membauar maupun karena tidak mampu membayar. Hal ini seperti dikemukakan Henry Cheeseman, *Bankruptcy judges decide core proceedings (e.g., allowing creditor claims, deciding preferences, confirming plans of reorganization) regarding bankruptcy cases. Noncore proceedings concerning the debtor (e.g., decisions on personal injury, divorce, and other civil proceedings) are resolved in federal or state court .*

Sekilas perbedaan dari hukum kepailitas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari globalisasi ekonomi, setidaknya memberi keyakinan kepada kita bagaimana globalisasi hukum itu tumbuh dan berkembang mengikuti globalisasi dibidang lain, namun globalisasi hukum itu tidak sepenuhnya akan mengubah atau

menggantikan sistem hukum nasional. Artinya globalisasi hukum akan hidup di atas perbedaan sistem hukum negara bangsa. Dalam konteks ini jelas yang menentukan adalah politik hukum dari negara bangsa bersangkutan sebagaimana juga halnya dengan Indonesia. Masalah kemudian, bagaimana hal itu bisa bertahan, memang ditentukan pula oleh daya tawar dari suatu negara bangsa dan seberapa besar negara bangsa itu mampu mempertahankan politik hukumnya ditengah-tengah berkembangnya sistem hukum global atau apa yang lebih umum disebut dengan globalisasi hukum.

Politik hukum nasional akan menjadi sangat berperan dan memberi arahan bagi perkembangan hukum nasional ditengah-tengah menguatnya tuntutan globalisasi hukum, terutama besarnya kemungkinan terdapat ruang kosong ketika terjadi transplansi sistem hukum, atau pada saat suatu negara bangsa melakukan integrasi dengan sistem hukum global. Sebab bagaimana pun juga tidak ada satu sistem hukum pun yang sempurna dan masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan. Dalam hubungan ini Satjipto Raharjo mengemukakan, bahwa sejak semula hukum tidak pernah dapat memuaskan keinginan manusia sebagai suatu alat yang mematoki antara perbuatan yang “benar” dan yang “salah” secara sempurna. Salah-salah mengatur bahkan bisa dikatakan seperti ungkapan “Summum ius summa iniuria” bahwa hukum yang bekerja terlalu hebat justru menimbulkan ketidakadilan

DAFTAR PUSTAKA

- Adeney, Bernard T. (1995). *Etika Sosial Lintas Budaya*. Yogyakarta: Kanisius. Al-Hadar Smith, “
- Amran, M., Chandra, M., & Mohd Zuhdi, M. (2001). *Tamadun Islam dan Tamadun Asia: Cabaran Semasa dan Masa Depan*. Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Kuala Lumpur: University of Malaya Press.
- Amriah, B. (2005). Globalisasi ekonomi dan impaknya kepada ruang budaya bandar Malaysia. *Malaysian Journal of Society and space* 1.
- Amung Ma'mun. (2004). *Isu Global Olahraga*. Bandung : UPI
- Arndt, Heinz W. (1987), *Economic Development: The History of An Idea*; Chicago: The University of Chicago Press,
- Astrid S. Susanto, Sunario. (1993). *Globalisasi dan Komunikasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Azizy, A. Qodri, MA. (2003). *Melawan Globalisasi – Reinterpretasi Ajaran Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Baran, P.A., (1975) *The Political Economy of Growth*; New York: Monthly Review Press.
- Bawake, B., (2012). *Negative Impact Of Globalization And Changing Values, Morals*. In Arvind Adiga's *The White Tiger Some Reflections*. ISSN No: 2230-7850 RNI: MAHMUL/2011/38595. Vol - II , ISSUE – III.
- Becker, Gary S. (1994). *Human Capital: A Theoretical Approach and Empirical Analysis with Special Reference to Education*; New York: Columbia University Press,
- Beebe, James. (1995) “*Basic Concepts and Techniques of Rapid Appraisal*”. *Human Organization*, vol. 54, No. 1, Spring.

- Bina Cipta. Suparjo. (2006) . *Just in Time Mungkinkah Diterapkan Pada Sektor Publik*
- Brautigam, Deborah. (2005). *“Reducing Poverty: Lesson from Taiwan”*. Uner Kirdar dan Leonard Silk (eds.), *People: From Impoverishment to Empowerment*. New York: New York University
- Donald Black, (1976). *The Behaviour of Law*, New York, USA, Academic Press, 1976, hal. 2
- Ernest Aryeetey and Natalia Dinello (eds). (2007). *Testing Global Interdependence Issues on Trade, Aid, Migration and Development, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, Inc.*
- Fan Hong. (2003). *Into The : Asian Sport and Globalization*. England De Monfort University.
- Firor, John (Otto Soemarwoto). (1990). *Perubahan Atmosfer (Sebuah Tantangan Global)*. Jakarta: Penerbit Rosda Jayaputra.
- Fuad Hassan. 2004. *“Pokok-pokok Bahasan Mengenai Budaya Nusantara Indonesia”*.
- FX. Sudarsono. (2001). *Aplikasi Penelitian Tindakan Kelas. Proyek Pengembangan UT*. Ditjen Dikti Depdiknas, Jakarta.
- Garcia, RL. (1991). *Teaching In A Pluralistic Society; Concepts, Models, Strategies*. Harper Collins Publisher:
- Giddens, A., (2001). *Runaway World*. Edisi Terjemahan. Jakarta. Gramedia;
- Gramedia Mu'in, Idianto. (2005). *Sosiologi Jilid III*. Jakarta : PT. Erlangga.
- HAS Natabaya, (2008) *Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; hlm 203
- Hari Purwadi, (2000). *Pendekatan Baru Dalam Studi Perbandingan Hukum : “Critical Comparative Law” Dan Transplantasi Hukum Di Indonesia, dalam Wajah Hukum di Era Reformasi*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 225.

- Hui, L.K., & Mun, H.W. (2008). *Globalisasi, Media Dan Budaya: Antara Hegemoni Barat Dengan Kebangkitan Asia*. DBP. NO. KK: 303 2047651 ISBN:
- Ikatan Alumni IKIP Bandung. (1989). *Mimbar Pendidikan Nomor IV Tahun IX: Dampak Globalisasi terhadap Pendidikan*. Bandung: University Press IKIP Bandung.
- Imam Barnadib. (2003). *Hakekat Pendekatan Global*. Yogyakarta: UNY.
- Joko Supriyanto, Suparjo. (2007). *Badan Layanan Umum Sebuah Pola Pemikiran Baru atas Unit Pelayanan Masyarakat*.
- Joseph, A.C., & Chandra, M. (2006). *Globalization*. 2nd edisi.
- Julia Zinkina *et al.* (2019). *A Big History of a Globalization: The Emergence of a Global World System*, Switzerland: Springer.
- Kementrian komunikasi dan informatika RI (2011). *Pancasila, Negara Kesejahteraan , dan Ketahanan masyarakat .* Jakarta : Direktorat jenderal informasi dan komunikasi public .
- Kuntowijoyo.(1997). *Budaya Elite dan Budaya Massa dalam Ecstasy Gaya Hidup: Kebudayaan Pop dalam Masyarakat Komoditas Indonesia*, Mizan
- Koenjaraningrat. (1990). *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta:
- Lawrence M. Friedman, (1984) *American Law: An Introduction*, W.W.. Norton & Company, New York,hal. 5-14.
- Makagiansar, M., Sudarmono P., Hamijoyo, S. (1989). *Mimbar Pendidikan: Dampak Globalisasi. Jurnal Pendidikan No. 4 Tahun IX* Desember 1990. Bandung: University Press IKIP Bandung: Bandung.
- Marshall McLuhan. (1962). *The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man*, Toronto: University Toronto Press, dan Marshall McLuhan.1964. *Understanding Media : The Extensions of Man*, New York and London.
- Merryfield M.M, Jarchow E., Pichert S, (1997). *Preparing Teacher to Teach Global Perspectives*. A Handbook For Teacher Educator. California: Corwin Press Inc.

- Mohd Ayob, A.R. (2012). *Globalisasi Ekonomi Tuntut Negara Lakukan Transformasi. Jabatan Hal Ehwal Khas (JASA)*. Kementerian Penerangan Komunikasi & Kebudayaan.
- Naisbit, J. (Drs. Budiyanto, Ed.). (1994). *Global Paradox*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Pais, S., (2006). *Globalization and Its Impact on Families.4thViennese conference on Mediation, Vienna, Austria*, h. 1-7.
- Ricardo Ernst & Jerry Haar. (2019). *Globalization, Competitiveness, and Governability: The Three Disruptive Forces of Business in the 21st Century*, Switzerland : Palgrave Macmillan, p viii .
- Roland Robertson.(1998). *Globalization : Social Theory and Global Culture Theory*, Culture & Society, London: SAGE Publications Ltd.
- Saidihardjo. (2003). *Perspektif Global dari Berbagai Sudut Ilmu*. Yogyakarta :UNY
- Samsudin. (2006). *Kewarganegaraan*. Surakarta : PT. Widya Duta Grafika.kebudayaan daerah
- _____. (2000). *Globalisasi, Media dan Budaya*. ARKIB. Jabatan Komunikasi. Universiti Kebangsaan Malaysia.
- _____. (2001). *Media dan Identiti Budaya : Membangunkan Industri Kandungan Tempatan Yang Budaya Tahan*. Journal Komunikasi Jilid 17 – 21.
- Sapardi Djoko Damono. (1997). *Kebudayaan Massa dalam Kebudayaan Indonesia: Sebuah Catatan Kecil dalam Ecstasy Gaya Hidup: Kebudayaan Pop dalam Masyarakat Komoditas Indonesia*, Mizan.
- Satjipto Rahardjo, 1986. *Hukum Dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial, dalam Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum nasional*, Editor Artdjo Alkostar dkk, Rajawali, Jakarta, hlm 27
- Slack, Fan Hong. (2002). *Commercialisation and Sport in China*. *Journal of Sport Management*, 346-349.

- Soedjatmoko. (1991). *Soejatmoko dan keprihatinan Masa Depan*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Soekanto, Soerjono. (1990). *Sosiologi : Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Soetandyo Wigjosoebroto, (2008). Pluralisme Hukum Dalam Kehidupan Global, Hukum Dalam Masyarakat:Perkembangan dan Masalah. Malang: Bayumedia, , hlm. 237-252
- Steiner, M. (Ed). (1996). *Developing The Global Teacher: Theory and Practice in Initial Teacher Education*. England: Trentham Books Limited.
- Suparjo. (2007). *One Stop Shopping, Arsitektur Website Pemerintah Yang Ideal*
- Susanto AB. (1997). *Visi Global Para Pemimpin: Sinkretisme Peradaban*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Susanto, Phil, Astrid. 1978. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Bandung :
- Schultze, QJ. (Wahyuni, Terj.). (1991). *Menangkan Anak-anak dari Pengaruh Media*. Indonesia: Metanoia.
- Tilaar, HAR. (1998). *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional, dalam Perspektif Abad 21*. Jakarta: Penerbit Tera Indonesia.
- Tim MGMP Kewarganegaraan (2013) . *Memahami dampak globalisasi dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara .* Sidoarjo : Drs. Supratman , MM .
- Tim MGMP Kewarganegaraan (2012) . *Perilaku yang sesuai dengan nilai – nilai Pancasila .* Sidoarjo : Dra.Hj.Umu Maria U.,M.Pd
- Thimothy Lindsey and Veronica Taylor, (2000). *Rethinking Indonesian Insoveny Reform : Contexts and Frameworks, dalam Tim Lindsey (Editor)*, Indonesia Bankruptcy, Law Reform & The Commercial Court, Ausaid, Desert Pea Press, page 2.
- Ulrich Teicher. (1997) *Enhancing Productivity : Higer Education and a Changing Job Requirement*. A world Congress.

William R. Nester. (2010). *Globalization: A Short History of the Modern World*, New York : Pargrave McMillan.

Yaya, M (Ed.) (1998). *Visi Global; Antisipasi Indonesia memasuki Abad ke-21*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.